

**PERAN PARTAI POLITIK
DALAM MOBILISASI PEMILIH
STUDI KEGAGALAN PARPOL
PADA PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN DEMAK 2009**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Magister Ilmu Politik
Pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro**

Oleh :

GEORGE TOWAR IKBAL TAWAKKAL

NIM. D4B007031

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2009**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS



Sertifikat

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, George Towar Ikbal Tawakkal menyatakan bahwa Tesis yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri yang belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada program Magister Ilmu Politik ini ataupun pada program lainnya. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawabannya sepenuhnya berada di pundak saya.

George Towar Ikbal Tawakkal
28 Desember 2009

PENGESAHAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Tesis berjudul:

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM MOBILISASI PEMILIH
STUDI KEGAGALAN PARPOL PADA PEMILU LEGISLATIF
DI KABUPATEN DEMAK 2009**

Yang disusun oleh George Towar Ikbal Tawakkal, NIM D4B007031 telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 28 Desember 2009 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Ketua Penguji

Drs. Purwoko, MS

Sekretaris Penguji

Drs. Priyatno Harsasto, MA

Anggota Penguji Lain

1. Drs. Suwanto Adhi, SU

2. Dra. Puji Astuti, M.Si

Semarang, 28 Desember 2009
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi Magister Ilmu Politik
Ketua Program

Drs. Purwoko, MS

MOTTO

“Karna kau manusia, maka manusia mempercayaimu”

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan kepada.....

Seluruh makhluk politik

ABSTRACT
THE ROLE OF POLITICAL PARTY IN VOTERS MOBILIZATION
(THE STUDY OF POLITICAL PARTIES FAILURE IN LOCAL
LEGISLATIVE ELECTION IN DEMAK REGENCY 2009)

On general election 2009, Indonesia applied a different general election system with systems that have applied on previous general elections. Based on Undang Undang Number 10, 2008, and Ketetapan Mahkamah Konstitusi Number 22-24/PUU-VI/2008, opened proportional system was applied on general election 2009. It was mean, when a political party get legislative chair, so party candidate that get more voter than others is get the chair. On previous general elections, its have applied proportional system, that based on serial number candidate. General election system change in Indonesia, from proportional system to opened proportional system, generate actor behavior change and generate new phenomenons which not emerge on voter mobilization on previous general elections.

Research method that is used at this research is qualitative description. Purposive sampling method is used to determine political parties as research objects. The parties are Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, and Partai Gerakan Indonesia Raya. As in qualitative research, so interview is used. Snowballing method is used to determine informants. Observation method is used to follow up some data.

The result of research cover several thing. First, political parties condition before mobilization phase: Political party experience of intern consolidation problems. In early general election phase, some political parties had serial number orientation for legislative member determining. Though in midd of phase, Ketetapan Mahkamah Konstitusi force them to change their orientation. Some political parties have had party machine completely, while others did not have party machine completely. Various party decision generate various attitude on voter mobilization. Second, Legislative candidate position: Candidates who were from serial number party, were claimed to change the mobilization strategy. Self-supporting mobilization has been a way for acquirement voters. Candidates have exploited out-party factors more than party machine. Third, relation between party institution and candidates: Cooperation has been happened when voter mobilization has been done. Party institution has tend to silent, and delivered to candidates. Candidates of course have accepted the conditions, and no other choice. Fourth, voter mobilization categorizes: Voter mobilization which been done by candidates, divisible become two categorizes, based on emotional tying and based on aids. From datas which was analysed comprehensive, have been known that political parties as political institution have experienced of failure in mobilization role.

This research have limitation. This research only explain political parties (PDIP, Partai Demokrat, PKB, dan Partai Gerindra) in local legislative election, 2009, in Demak regency. It is mean that other political condition, other intern party condition, and other voter condition, there is possibility of different result. So, continuation research is required to explain more general condition.

Keywords: Political party, Voter mobilization, failure.

ABSTRAKSI
PERAN PARTAI POLITIK DALAM MOBILISASI PEMILIH
STUDI KEGAGALAN PARNAS
PADA PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN DEMAK 2009

Pada Pemilu 2009, Indonesia menerapkan sistem pemilu baru yang berbeda dengan sistem pemilu yang telah dipakai pada Pemilu-pemilu sebelumnya. Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, sistem pemilu 2009 menggunakan sistem proporsional terbuka, dengan penentuan kandidat peraih kursi yang telah diperoleh partainya, berdasar suara terbanyak. Sedangkan pada Pemilu-pemilu sebelumnya, sistem yang digunakan adalah sistem proporsional yang berdasar nomor urut kandidat. Perubahan sistem pemilu Indonesia dari sistem proporsional menjadi sistem proporsional terbuka, membawa perubahan perilaku para aktor dan memunculkan fenomena-fenomena baru yang tidak dijumpai pada Pemilu-pemilu sebelumnya, terkait dengan pengarahan pemilih yang dilakukan oleh para aktor.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan informasi data penelitian, metode purposive sampling digunakan untuk menentukan partai-partai politik yang menjadi obyek penelitian. Partai yang dipilih adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Metode wawancara dengan penentuan informan melalui teknik snowballing. Peneliti juga melakukan observasi untuk mendapatkan data yang lebih lengkap..

Temuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, dari sisi dinamika Partai politik sebelum tahapan kampanye Pemilu: Partai mengalami permasalahan konsolidasi internal. Partai berorientasi pada nomor urut dan berorientasi pada suara terbanyak. Beberapa partai memiliki mesin partai yang lengkap dan lebih banyak partai yang belum. Sikap partai yang beragam dalam keterlibatan mobilisasi. Kedua, dari sisi Calon Legislatif: Caleg yang berasal dari partai yang berorientasi nomor urut, dituntut untuk merubah strateginya. Caleg dituntut untuk mobilisasi mandiri. Caleg lebih memanfaatkan faktor di luar partai. Ketiga, dari sisi harmonisasi antara Partai dan Caleg: Tidak terjadi kerjasama yang baik dalam mobilisasi pemilih. Partai cenderung lepas tangan, dan menyerahkan kepada Caleg. Keempat, bentuk-bentuk mobilisasi yang dilakukan oleh Caleg secara mandiri: Bentuk mobilisasi terbagi menjadi 2 kriteria, yakni berdasarkan hubungan emosional, dan bantuan-bantuan. Dari berbagai data yang kemudian dianalisa secara menyeluruh, maka dapat dikatakan bahwa partai politik telah gagal melaksanakan peran organisasi politik.

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya digunakan untuk menjelaskan partai politik (PDIP, Partai Demokrat, PKB, dan Partai Gerindra) di Kabupaten Demak pada Pemilu legislatif 2009. Artinya, pada kondisi politik yang lain, perbedaan kondisi internal partai, serta pada kondisi masyarakat yang berbeda, terdapat kemungkinan perbedaan penjelasan. Sehingga dibutuhkan penelitian lanjutan untuk menjelaskan kondisi yang lebih luas.

Kata Kunci: Partai Politik, mobilisasi pemilih, kegagalan.

KATA PENGANTAR

Sembah sujud dan puja puji syukur ter-sentralisasi pada Dzat Satu. Dzat Maha Ber-ilmu, yang telah menciptakan pengetahuan bagi yang berakal maupun tak berakal. Dzat Maha Cerdas, yang telah memunculkan pemahaman-pemahaman bagi para pencari pencerahan. Dzat Maha Gerak, yang telah melahirkan sikap dan perbuatan. Dzat Maha Kuasa, yang telah menganugrahkan kekuasaan-kekuasaan bagi yang terpilih dan termandat. Kasih sayang dan keselamatan ter-aspirasi bagi Si Terpercaya dan Si Terpilih, penuntun kebijakan. Semoga kesejahteraanmu terdistribusi hingga lintas ruang dan waktu. Tersadar sepenuhnya peran kedua makhluk yang menopang eksistensi jiwa dan raga, hormat dan kasih terlimpah padanya.

Atas itu semua, tesis berjudul **Peran Partai Politik Dalam Mobilisasi Pemilih (Studi Kegagalan Parpol Pada Pemilu Legislatif Di Kabupaten Demak 2009)** dapat berbentuk demikian. Tesis ini tersusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Magister Ilmu Politik pada Program Pascasarjana (S2) Universitas Diponegoro Semarang. Pada bagian ini, terucap dan terasa terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Purwoko, MS., pejabat Ketua Program Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, dan Pembimbing I yang telah menghadirkan bimbingan yang segar dan menyenangkan.
2. Bapak Drs. Priyatno Harsasto, MA., Pembimbing II yang telah menuntun dan membantu penyusunan tesis ini. Terima kasih buku-buku dan bahan kajian pendukung.

3. Bapak Drs. Suwanto Adi, SU., Penguji yang telah menyadarkan bahwa tesis ini banyak kekurangan. Mohon maaf kalau banyak *ngeyel*.
4. Ibu Drs. Puji Astuti MSi., Penguji yang telah memberikan usul-usul sehingga tesis ini menjadi lebih baik.
5. Bapak dan Dosen pengajar di Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro, yang men-*transfer* pengetahuannya. Semoga terbalas segala ke-ikhlasan.
6. Bunda Nur Balistik, yang sudah memberikan semangat. Magister Ilmu Politik jadi ramai dan hidup karna ada Bunda.
7. Bapak Budi, Dosen Magister Ilmu Lingkungan, yang sering membagi pengalaman kehidupan akademiknya.
8. Seluruh teman-teman mahasiswa Magister Ilmu Politik. Meski sedikit, tapi asik. Kapan ada waktu lagi kumpul-kumpul karaokean?
9. Staf Magister Ilmu Politik: Mas Toha, Mbak Aya, Pak Han, Mas Yatin, dan lain-lain. Keberadaan kalian membantu, mempermudah, dan menyegarkan suasana kantor MIP.
10. Para Pengurus maupun politikus Partai yang telah membantu data ataupun informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
11. Segenap pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penelitian ini. Saudara-saudara, sahabat-sahabat dan teman-teman semuanya.
12. Seluruh pihak yang tidak mampu tersurat maupun tersirat satu per satu.
Terima kasih atas dukungannya.

Demikian kata pengantar ini terkemuka. Tersadar dan terakui bahwa Tesis ini masih melekat sifat tak sempurna, sehingga dibutuhkan kritik, saran, ataupun penelitian lanjutan dari pihak manapun. Semoga dilimpahkan kemanfaatan dari Yang Maha Manfaat melalui Tesis ini, bagi para pencari kemanfaatan.

Demak, 28 Desember 2009

Penulis

George Towar Ikbal Tawakkal

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup.....	10
1.2.1. Pokok masalah.....	10
1.2.2. Obyek Penelitian.....	10
1.3. Perumusan Masalah.....	11
1.4. Tujuan Dan Manfaat.....	13
1.4.1. Tujuan.....	13
1.4.2. Manfaat.....	14
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	16
2.1. Kerangka Teori.....	16
2.1.1. Peran.....	16
2.1.2. Partai Politik.....	19
Fungsi Partai Politik.....	22
2.1.3. Mobilisasi Politik.....	29
Praktek mobilisasi.....	34

	Jenis Mobilisasi.....	45
	Mobilisasi Politik Di Indonesi.....	46
2.2.	Kerangka Konseptual.....	50
	2.2.1. Peran.....	50
	2.2.2. Partai Politik.....	50
	2.2.3. Mobilisasi Politik.....	50
	2.2.4. Political Marketing.....	50
BAB III	METODE PENELITIAN.....	51
3.1.	Jenis Data.....	51
3.2.	Sampling.....	52
3.3.	Tekhnik Pengumpulan Data.....	57
	1. Dokumentasi.....	57
	2. Observasi.....	58
	3. Wawancara.....	59
3.4.	Lokasi Penelitian.....	59
3.5.	Teknik Analisa Data.....	61
BAB IV	GAMBARAN UMUM.....	62
4.1.	Kabupaten Demak.....	62
	4.1.1. Pemerintahan.....	62
	4.1.2. Demografi.....	63
	4.1.3. Pendidikan.....	64
	4.1.4. Agama.....	65
4.2.	Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Demak 2004.....	66
	4.2.1. Daerah Pemilihan.....	66
	4.2.2. Daftar Pemilih Tetap.....	67
	4.2.3. Partai Peserta Pemilu DPRD Kabupaten Demak Tahun 2004.....	68
	4.2.4. Perolehan Suara Partai Pada Pemilu DPRD Kabupaten Demak Tahun 2004.....	69

4.2.5.	Perolehan Kursi DPRD	
	Kabupaten Demak Tahun 2004.....	70
4.2.6.	Nama dan Nomor Urut Calon Anggota DPRD	
	Kabupaten Demak terpilih.....	72
4.3.	Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Demak 2009.....	74
4.3.1.	Daerah Pemilihan.....	74
4.3.2.	Daftar Pemilih Tetap.....	75
4.3.3.	Partai Peserta Pemilu DPRD	
	Kabupaten Demak Tahun 2009.....	76
4.3.4.	Perolehan Suara Partai Pada Pemilu DPRD	
	Kabupaten Demak Tahun 2009.....	77
4.3.5.	Perolehan Kursi DPRD	
	Kabupaten Demak Tahun 2009.....	79
4.3.6.	Nama dan Nomor Urut Calon Anggota DPRD	
	Kabupaten Demak Terpilih.....	81
4.4.	Perubahan Peta Perolehan Kursi Partai.....	84
4.5.	Profil Partai Di Kabupaten Demak.....	85
4.5.1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.....	85
4.5.2.	Partai Kebangkitan Bangsa.....	91
4.5.3.	Partai Demokrat.....	98
4.5.4.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)....	104
BAB V	MOBILISASI PEMILIH.....	107
5.1.	Eksistensi Partai.....	107
5.1.1.	Partai Pra Pemilu.....	107
	5.1.1.1.Konsolidasi Internal Partai.....	110
	5.1.1.2.Penentuan Calon Legislatif.....	118
5.1.2.	Kemampuan Partai Dalam	
	Mengarahkan Pemilih.....	128
	5.1.2.1.Metode Pengarahan.....	129
	5.1.2.2.Organisasi Sayap Di Seputar Pemilu..	135

5.2.	Orientasi Calon Legislatif.....	142
5.2.1.	Perubahan Prilaku Caleg.....	142
5.2.1.1.	Dinamika Perubahan Sistem Pemilu...	142
5.2.1.2.	Semangat Perolehan Suara.....	148
5.2.2.	Pengarahan Pemilih.....	162
5.2.2.1.	Pemanfaatan Mesin Partai.....	163
5.2.2.3.	Pemanfaatan Jaringan Sosial.....	176
5.3.	Dinamisasi Partai Dan Caleg.....	186
5.4.	Respon Pemilih.....	205
5.4.1.	Partai Dan Caleg.....	205
5.4.1.1.	Intensitas Pengarahan.....	205
5.4.1.2.	Bentuk Pengarahan Yang Dijumpai Pemilih.....	209
5.4.2.	Efektivitas Pengarahan.....	214
BAB VI	PENUTUP.....	223
5.1.	Kesimpulan.....	223
5.2.	Saran-Saran.....	230
	DAFTAR PUSTAKA.....	232

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.2.1	Partai-Partai Peserta Pemilu DPRD Kabupaten Demak..... 53
Tabel 3.2.2	Daftar Partai Yang Memperoleh Kursi DPRD Kabupaten Demak Pada Pemilu 2004 dan 2009.....55
Tabel 3.2.3	Daftar Partai Yang Baru Memperoleh Kursi DPRD Kabupaten Demak Pada Pemilu 2009..... 55
Tabel 4.2.2	Daftar Jumlah Pemilih Tetap Pemilu Legislatif Kabupaten Demak Tahun 2004..... 67
Tabel 4.2.4	Daftar Perolehan Suara Sah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Pemilihan Umum Tahun 2004..... 69
Tabel 4.2.5	Daftar Perolehan Kursi Dprd Kabupaten Demak Tahun 2004..... 71
Tabel 4.2.6.1	Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Pemilihan Umum Tahun 2004 Daerah Pemilihan: Demak I.....72
Tabel 4.2.6.2	Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Pemilihan Umum Tahun 2004 Daerah Pemilihan: Demak II..... 72
Tabel 4.2.6.3	Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Pemilihan Umum Tahun 2004 Daerah Pemilihan: Demak III.....73
Tabel 4.2.6.4	Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Pemilihan Umum Tahun 2004 Daerah Pemilihan: Demak IV.....73
Tabel 4.2.6.5	Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Pemilihan Umum Tahun 2004 Daerah Pemilihan: Demak V..... 73
Tabel 4.3.2	Daftar Jumlah Pemilih Tetap Pemilu Legislatif Kabupaten Demak Tahun 2009..... 75
Tabel 4.3.4	Daftar Perolehan Suara Sah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

	Kabupaten Demak Pemilihan Umum Tahun 2009.....	77
Tabel 4.3.5	Daftar Perolehan Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Pemilihan Umum Tahun 2009.....	80
Tabel 4.3.6.1	Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Pemilihan Umum Tahun 2009 Daerah Pemilihan: Demak I.....	81
Tabel 4.3.6.2	Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Pemilihan Umum Tahun 2009 Daerah Pemilihan: Demak II.....	82
Tabel 4.3.6.3	Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Pemilihan Umum Tahun 2009 Daerah Pemilihan: Demak III.....	82
Tabel 4.3.6.4	Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Pemilihan Umum Tahun 2009 Daerah Pemilihan: Demak IV.....	83
Tabel 4.3.6.5	Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Pemilihan Umum Tahun 2009 Daerah Pemilihan: Demak V.....	83
Tabel 5.1.1.2	Daftar Jumlah Anggota Calon Legislatif DPRD Kabupaten Demak Pada Pemilu 2009.....	119
Tabel Kesimpulan 5.1	141
Tabel Kesimpulan 5.2	185
Tabel Kesimpulan 5.3	204
Tabel Kesimpulan 5.4	222

BAB I

PENDAHULUAN

1.5. Latar Belakang

Pemilihan Umum di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dari periode Pemilu ke periode Pemilu yang lain. Selama pemilu Orde Baru, kita mengenal sistem pemilu proporsional dengan daftar tertutup. Keterpilihan calon legislatif bukan ditentukan pemilih, melainkan menjadi kewenangan elite partai politik sesuai dengan susunan daftar caleg beserta nomor urut. Dalam sistem demikian, kedudukan parpol menjadi sangat kuat terhadap kadernya di parlemen. Namun di satu sisi, basis sosial dan relasi politik para wakil rakyat dengan konstituen menjadi lemah. Inilah yang menyebabkan kedudukan caleg terpilih mereka menjadi "jauh" dalam hubungannya dengan konstituen.

Sistem pemilu demikian juga dianggap membuat lembaga perwakilan rakyat menjadi elitis, eksklusif, tidak tersentuh oleh masyarakat, serta tidak sensitif terhadap problem rakyat. Seiring tuntutan reformasi tahun 1998, sistem pemilu tersebut mulai ditinggalkan. Pada Pemilu 1999, sistem yang digunakan pada dasarnya tidak mengalami perubahan dibandingkan pemilu Orde Baru dengan menggunakan sistem proporsional berdasarkan daftar tertutup. Pemilih masih terbatas mencoblos tanda gambar parpol.

Semangat memilih langsung wakil rakyat baru mulai diakomodasi pada Pemilu 2004 melalui UU No. 12 Tahun 2003, dengan menggunakan sistem

proporsional dengan daftar calon terbuka. Pemilih tidak hanya memilih tanda gambar parpol, tetapi juga diberi kesempatan memilih caleg. Namun, penerapan ketentuan ini terkesan sengaja dilemahkan dengan pengaturan ketentuan suara sah dan penetapan calon terpilih. Suara sah parpol harus dicoblos bersamaan pada kolom tanda gambar parpol dan calegnya. Pemilih yang mencoblos caleg saja dianggap tidak sah. Sementara mencoblos tanda gambar parpol saja sah. Peraturan yang terkesan rumit dan tidak mempermudah pemilih untuk memilih caleg mereka secara langsung ini, dimanfaatkan oleh parpol dalam sosialisasi dan kampanye mereka untuk mencoblos tanda gambar parpol saja dengan dalih menghindari suara rusak atau tidak sah.

Peraturan yang menggambarkan berlakunya sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka setengah hati ini masih dipersulit lagi dengan ketentuan penetapan caleg yang langsung terpilih, yang harus memenuhi ketentuan bilangan pembagi pemilihan (BPP). Jika tidak ada caleg yang memperoleh angka BPP, kursi yang didapat parpol di daerah pemilihan, menjadi hak caleg berdasarkan nomor urut terkecil. Sementara itu untuk mencapai angka BPP dengan membagi jumlah suara sah seluruh parpol peserta pemilu dengan jumlah kursi di daerah pemilihan (DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) sungguh sangat kecil kemungkinannya.

Hanya dua calon yang perolehan suaranya mencapai BPP, yaitu Hidayat Nur Wahid (262.019 suara, dapil DKI II-PKS) dan Saleh Djasit (195.348 suara, dapil Riau-PG). Hampir seluruh anggota DPR terpilih pada Pemilu 2004 karena posisinya pada nomor urut atas (nomor jadi) dalam daftar calon. Bahkan, tidak kurang dari

30% calon terpilih telah "menyalip" calon lain dalam daftar tersebut yang nyata-nyata memperoleh suara lebih banyak.¹

Semangat pilih langsung yang menjadi ikon Pemilu 2004 saat itu menjadi tidak berarti. Banyak caleg terpilih bukan karena banyaknya dicoblos oleh pemilih, melainkan lebih karena ditempatkan pada nomor urut kecil (jadi) dalam daftar caleg oleh parpol. Oligarki parpol masih menentukan.

Tanggal 31 Maret 2008, menjadi awal dari perubahan sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Pemerintah mengesahkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara umum, diberlakukannya Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengakibatkan berubahnya sistem pemilu di Indonesia, dari sistem proporsional terbuka "setengah hati", menjadi sistem proporsional yang memberi harapan semangat pilih langsung.

Pasal 5 Ayat (1) UU 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, tidak tampak berbeda dengan Pemilu 2004, tetap mendasarkan pada prinsip proporsional atau perwakilan berimbang. Artinya, suatu daerah pemilihan diwakili sejumlah wakil yang didapat dari perolehan suara partai-partai politik peserta pemilu. Yang membedakan, ketentuan penetapan caleg terpilih yang diatur dalam Pasal 214 yang didasarkan pada sistem nomor urut setelah tidak ada caleg yang memperoleh

¹ Rahmatul Ummah, *Memperkuat Sistem Pemilu 2009*,
<http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2008111222412611>

sekurang-kurangnya 30% BPP. Sementara caleg yang memenuhi ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 30% lebih banyak dari jumlah kursi yang diperoleh parpol peserta pemilu, kursi diberikan kepada caleg yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara caleg yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% dari BPP. Dengan demikian sistem proporsional terbuka yang digunakan pada Pemilu 2009, masih tetap menerapkan pembatasan ketentuan perolehan suara sekurang-kurangnya 30% BPP bagi caleg untuk langsung ditetapkan sebagai caleg terpilih.

Bila kita menerapkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 pada hasil Pemilu 2004, dari 550 anggota DPR yang terpilih, hanya 116 orang (21,1%) yang memperoleh suara terbanyak dan sekurang-kurangnya mencapai 30% BPP. Sementara yang lain, sebagian besar anggota DPR 434 orang (78.9%) terpilih karena nomor urut dalam daftar calon. Artinya, posisi dalam nomor urut daftar calon tetap menjadi faktor yang lebih utama dalam menentukan seorang calon terpilih.

Sistem Proporsional terbuka penuh memperoleh angin segar ketika kemudian muncul putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan dalam rapat pemusyawaratan hakim oleh delapan hakim konstitusi pada Jumat, 19 Desember 2008 dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada Selasa 23 Desember 2008 oleh delapan hakim konstitusi. Putusan MK itu menanggapi permohonan uji materi yang diajukan Mohammad Sholeh, Sutjipto, Septi Notariana, dan Jose Dima S. Sholeh

adalah caleg dari PDI-P untuk DPRD Jawa Timur. Sutjipto dan Septi adalah caleg dari Partai Demokrat untuk DPR. Jose adalah warga negara biasa.²

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi atas pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU No 10/2008 tentang Pemilu 2009. Pasal 214 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 214

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:

- a. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
- b. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
- c. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon

² Irsan, *Keputusan MK Soal Suara Terbanyak Didukung Caleg Sumut*, <http://www.antarasumut.com/berita-sumut/pemilu-2009-berita-sumut/keputusan-mk-soal-suara-terbanyak-didukung-caleg-sumut/>

terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP;

- d. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut;
- e. Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.³

Keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU No 10/2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, bertentangan dengan UUD RI 1945. Selanjutnya, menyatakan pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU No 10/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan dari putusan ini di antaranya, ketentuan pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU No 10/2008 yang menyatakan bahwa calon anggota legislatif terpilih adalah calon yang mendapat suara di atas 30 persen dari bilangan pembagian pemilu (BPP) atau menempati nomor urut lebih kecil, dinilai bertentangan dengan makna substantif dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 28 d ayat 1 UUD 1945.⁴

³ Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008

⁴ Yuni Herlina Sinambela, *MK Kabulkan Uji Materi Caleg Sistem Suara Terbanyak*, <http://pemilu.okezone.com/read/2008/12/23/267/176428/mk-kabulkan-uji-materi-caleg-sistem-suara-terbanyak>

Dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka penetapan calon anggota legislatif pada Pemilu 2009 tidak lagi memakai sistem nomor urut dan digantikan dengan sistem suara terbanyak. Hal ini memunculkan berbagai respon dari berbagai kalangan dan dari berbagai sisi.

Dari segi hukum perundang undangan, keputusan Mahkamah Konstitusi dinilai melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang sebenarnya hanya menafsirkan dan tidak menciptakan produk hukum baru. Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM), AAGN Ari Dwipayana, menilai, keputusan MK tersebut tidak sekadar membatalkan pasal 214 Undang Undang No.10/2008, tapi juga menghasilkan produk hukum baru. Peran MK dalam konstitusi, menjadi tidak sekadar negative legislation, tetapi juga positive legislation. Karena dengan putusan tersebut, MK telah merambah kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menghasilkan undang-undang dan keputusan untuk menentukan pilihan dalam penetapan caleg. Peran DPR dalam legislasi dapat dimentahkan oleh MK. Hasil kerja DPR dapat dibatalkan hanya oleh enam orang anggota MK.⁵

Keputusan MK yang menyatakan penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak dinilai oleh mantan Wakil Ketua KPU dan guru besar FISIP Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti, sebagai keputusan yang amburadul. Sebab, merusak sistem atau tahapan pemilu yang sudah dibentuk sebelumnya. Kekacauan itu karena dalam sistem pemilu mengandung empat tahapan. Yakni, besaran daerah pemilihan,

⁵ Arinto Tri Wibowo, *Putusan Mahkamah Konstitusi timbulkan produk hukum baru*, http://politik.vivanews.com/news/read/18096-putusan_mk_picu_masalah_baru

pola pencalonan tertutup atau terbuka, sistem zigzag caleg perempuan, model pemberian suara kepada parpol atau caleg dan berdasarkan suara terbanyak. Empat tahapan itu merupakan satu kesatuan dalam tahapan pemilu. “Putusan MK hanya mengambil ekornya saja. Sehingga membuat pemilu tidak lagi sistemik. Antara kepala dan kaki tidak cocok. Meski pasal 214 UU No 10/2008 tentang Pemilu itu multitafsir atau campur aduk, bukan berarti MK harus menganulir semua ayat dalam pasal tersebut. Sebab yang perlu diluruskan dalam pasal 214 adalah ayat b (*Berbunyi: Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;*). Bukan semua ayat seperti dalam putusan MK yakni ayat a, c, d, dan e. Jadi bukan berarti yang tertutup itu (berdasarkan nomor urut) tidak demokratis. Karena di negara-negara demokratis juga menerapkan nomor urut.⁶

Dari kalangan politikus juga memunculkan berbagai respon. Menurut Ganjar Pranowo, Sekretaris FPDIP DPR, PDIP sudah siap dari awal menerima apa pun yang akan diputuskan MK. Putusan MK ini membuat para caleg yang sebelumnya merasa 'aman' dengan nomor urut jadi, menjadi harus bekerja keras meraih suara konstituen. Ini menandakan kita akan memasuki liberal, di mana persaingan tidak hanya

⁶ Djibril Muhammad, *Putusan MK Suara Terbanyak Amburadul*,
<http://www.inilah.com/berita/politik/2008/12/24/71166/putusan-mk-suara-terbanyak-amburadul/>

antarpartai, tetapi juga antarcaleg.⁷ Ketua DPR Agung Laksono, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Agung mengatakan, Golkar sudah menggunakan metode penetapan caleg dengan suara terbanyak. Diharapkan partai yang tidak setuju dengan metode tersebut menghargai putusan MK itu. Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir menyebut Keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai kemenangan rakyat. Menurut dia, PAN selama ini memang memperjuangkan suara terbanyak. Kini atas hasil ini, partainya juga menggelar syukuran. Dengan suara terbanyak itulah peranan partai harus berbagi dengan caleg yang dipilih rakyat langsung. Ini demokrasi yang benar-benar adil. Presiden PKS Tifatul Sembiring menyatakan, sebenarnya yang mengusulkan suara terbanyak itu PKS dan PAN, tetapi kemudian justru ditolak partai-partai besar. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menyatakan, pihaknya siap melaksanakan putusan MK yang mengabulkan permohonan uji materi UU Pemilu sehingga penetapan calon terpilih nantinya berdasarkan suara terbanyak, meskipun sebenarnya waktunya tidak tepat karena tahapan penyusunan calon anggota legislatif (caleg) sudah selesai⁸.

Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto mengatakan, putusan itu mencerminkan MK menghormati hak rakyat. Namun komentar pedas muncul dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Tjahjo Kumolo yang mempertanyakan apakah MK punya wewenang menentukan sistem pemilu. Ia juga menilai, putusan

⁷ Laurencius Simanjuntak, *PDIP Pasrah Putusan MK Soal Caleg Suara Terbanyak*, <http://www.detiknews.com/read/2008/12/24/075051/1058711/10/pdip-pasrah-putusan-mk-soal-caleg-suara-terbanyak>

⁸ Putusan MK ‘ Suara Terbanyak ‘ Kurangi Konflik Internal Partai, sumber: beritasore.com, inilah.com, pikiran-rakyat.com, <http://andika-pemilu.blogspot.com/2008/12/putusan-mk-suara-terbanyak-kurangi.html>

MK itu menjungkirbalikkan mekanisme sistem proporsional dalam pemilu yang ditetapkan UU sebab bukan distrik murni. Seharusnya tetap ada kebebasan pada partai untuk menentukan sistem yang dipakai dan dihormati sebab ada kedaulatan rakyat serta kedaulatan partai menentukan caleg.⁹

1.6. Ruang Lingkup

1.6.1. Pokok masalah

Penggunaan sistem pemilu tertentu mempengaruhi fenomena-fenomena yang muncul. Pada suatu sistem pemilu, mungkin akan memunculkan sebuah fenomena yang tidak dijumpai pada sistem pemilu yang lain. Melihat hal tersebut, maka peneliti akan memfokuskan pada fenomena mobilisasi yang muncul pada sistem proporsional terbuka penuh.

1.6.2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Gerakan Indonesia Raya di Kabupaten Demak. Pemilihan obyek ini dikarenakan ketertarikan peneliti terhadap PDIP dan PKB sebagai sebuah partai besar dan berpengalaman dalam menjadi peserta Pemilu. Pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004, PDIP berhasil menjadi pemenang di Kabupaten Demak, serta menjadi mayoritas di DPRD kabupaten Demak. Namun, pada Pemilu 2009, PDIP mengalami penurunan perolehan kursi yang sangat tajam, 100% dari kursi yang PDIP peroleh pada Pemilu 2004, dari 16 kursi menjadi 8 kursi.

⁹ Yes! Caleg terpilih oleh suara terbanyak
<http://www.kompas.com/read/XML/2008/12/24/04240134/yes.caleg.terpilih.oleh.suara.terbanyak>

Pengalaman sebagai partai besar dan beberapa Pemilu yang PDIP miliki, memunculkan pertanyaan pertanyaan kenapa penurunan terjadi begitu drastic dalam sistem pemilu yang berbeda dari pemilu 1999 dan 2004. PKB mengalami kenaikan 1 kursi, dan mampu menjadi partai yang memperoleh kursi terbanyak. Begitu juga dengan Partai Demokrat yang mengalami kenaikan kursi sebesar 100% pada Pemilu 2009.

Partai Gerindra merupakan partai pendatang baru pada Pemilu 2009. Secara pengalaman, Partai Gerindra belum pernah menjadi peserta Pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 2009, pemilu pertama, Partai Gerindra berhasil memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Demak, yakni 3 kursi. Dari sisi masa, Partai Gerindra merupakan partai yang tidak jauh beda dari PDIP. Kedua partai mengklaim basis massa mereka adalah rakyat kecil. Upaya-upaya yang dilakukan oleh DPC PDIP dan Partai Gerindra maupun para calon anggota DPRD nya dalam memobilisasi pemilih, di dalam mengimplementasikan sebuah system pemilihan umum yang baru inilah yang kemudian menjadi obyek penelitian.

1.7. Perumusan Masalah

Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan diberlakukannya Ketetapan Mahkamah Konstitusi, maka memunculkan perubahan model kampanye, baik oleh Partai Politik maupun oleh Calon Anggota Legislatif. Partai Politik, sebagai sebuah organisasi Partai, tentu akan mengkampanyekan visi misi yang akan diperjuangkan. Namun, ada yang menarik pada Pemilu 2009, dimana

eksistensi kampanye Caleg, dalam komunitas masyarakat langsung, melebihi eksistensi kampanye Partainya. Hal ini disebabkan karena penentuan anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak, sebagaimana yang dijelaskan di atas. Suasana ini tidak ditemukan pada kampanye Pemilu 2004.

Seorang Caleg dituntut untuk mengkampanyekan 2 hal. Pertama, mengkampanyekan Partai yang mengusung Caleg. Kedua, mengkampanyekan pribadi Caleg tersebut. Caleg dipacu untuk memperkenalkan dirinya kepada pemilih, agar memilih dirinya, di samping memilih Partainya, pada pemungutan suara. Namun, dapat dipastikan, para Caleg cenderung mengedepankan kampanye pribadinya dari pada mengkampanyekan Partainya. Model kampanye seperti ini tentu akan mengarahkan pemilih pada pemilihan caleg. Beberapa Partai juga tampaknya menyadari hal ini, dan bahkan mengharapkan hal ini. Sehingga Partai mempersiapkan orang-orang yang populer di masyarakat sebagai caleg dari partai tersebut.

Dalam Pemilu Legislatif, kondisi ini dirasa baru oleh para pemilih. Namun, mungkin kondisinya tidak jauh beda dengan Pilkades, Pilkada, atau Pilpres. Jumlah aktor (Kandidat) lah yang membedakan antara Pilkades, Pilkada, Pilpres, dengan Pemilu Legislatif 2009. Pada Pilkades, jumlah aktor/ kandidat, mungkin hanya berkisar antara 2 sampai 5 kandidat. Di Pilkada, jumlah aktor/ kandidat hanya berkisar 2 sampai 5 pasang. Begitupun dengan Pilpres. Namun, jumlah aktor/ kandidat dalam Pemilu Legislatif 2009, bisa mencapai 50 bahkan ratusan orang lebih per Daerah Pemilihan. Jumlah aktor yang banyak dalam Pemilu Legislatif 2009, serta

model kampanye yang dilakukan, memunculkan tekanan yang kuat pada perubahan cara pandang pemilih, dari memilih Partai menjadi memilih Caleg.

Setelah melihat fenomena di atas, penulis ingin melihat kinerja partai politik sebagai sebuah lembaga dalam melakukan mobilisasi pemilih, perilaku Calon legislatif dalam memobilisasi pemilih untuk mendapatkan suara bagi dirinya, serta melihat bentuk-bentuk mobilisasi yang muncul sebagai akibat dari perubahan sistem pemilu.

1.3. Tujuan Dan Manfaat

1.3.1. Tujuan

Berkaitan dengan pengkajian ini, penulis memiliki beberapa tujuan. Tujuan-tujuan tersebut terbagi menjadi tujuan subyektif dan obyektif.

a. Tujuan Subyektif

Pertama, penulis menjadikan pengkajian ini sebagai Tesis yang menjadi persyaratan bagi penyelesaian studi penulis di Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

Kedua, penulis ingin menemukan jawaban mengenai keingintahuan penulis tentang kinerja Partai dalam menghadapi perubahan sistem Pemilu.

b. Tujuan Obyektif

Pertama, penulis ingin menyajikan gambaran mengenai perilaku Partai dalam mempertahankan dan meningkatkan perolehan suaranya dalam sebuah sistem Pemilu yang baru.

Kedua, penulis ingin memberikan gambaran mengenai peran Partai dalam mempengaruhi pemilih untuk memilih Caleg-calegnya pada Pemilu 2009.

1.3.2. Manfaat

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dari pengkajian ini. Penulis membagi manfaat-manfaat tersebut menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat teoritis

Pertama, pengkajian ini dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu politik, khususnya dalam kajian kepartaian.

Kedua, pengkajian ini dapat memunculkan argumen-argumen ilmiah baru dalam melihat peran Partai dalam pelaksanaan sebuah sistem Pemilu.

b. Manfaat praktis

Pertama, pengkajian ini diupayakan dapat digunakan sebagai acuan Partai politik dalam menjalankan sebuah sistem politik.

Kedua, pengkajian ini dapat dijadikan referensi oleh partai politik maupun caleg untuk meningkatkan electabilitas-nya dikemudian hari.

Partai bisa melakukan suatu tindakan sebaik mungkin untuk meningkatkan perolehan suara. Begitu juga dengan para Caleg, dapat melakukan hal serupa.

Tujuan-tujuan serta manfaat-manfaat diatas merupakan sesuatu yang diharapkan oleh penulis setelah melakukan pengkajian secara mendalam mengenai peran partai dalam sebuah system pemilu. Semoga itu semua terwujud sebagaimana harapan penulis.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Kajian mengenai peran partai dalam system Pemilu ini pada dasarnya adalah sebuah studi tentang kepartaian. Partai sebagai peserta pemilu tentunya akan masuk pada sebuah sistem pemilu yang dipakai. Apa yang dilakukan partai dalam rangka meningkatkan perolehan suara, tentu tidak akan keluar dari sistem pemilu yang dipakai, yakni sistem proporsional terbuka. Untuk menjelaskan bagaimana Partai menghadapi dan mendukung sistem proporsional terbuka, serta mempertahankan dan meningkatkan perolehan suara, maka diperlukan kerangka teoritis yang mampu memberi alasan-alasan ilmiah.

2.3. Kerangka Teori

2.3.1. Peran

Istilah peran pada awalnya merupakan terjemahan dari kata "*function*", "*job*", atau "*work*". Adapun makna dari kata "peran" dapat dijelaskan lewat beberapa cara. **Pertama**, suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari keluarga drama atau teater yang hidup subur pada jaman Yunani Kuno (Romawi). Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakteristik yang disandang untuk dibawakan oleh seseorang aktor dalam sebuah pentas drama. **Kedua**, suatu penjelasan yang menunjuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. **Ketiga**, suatu penjelasan yang lebih

bersifat operasional, menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu “penampilan/unjuk peran (*role performance*).”

Pada dasarnya ada dua paham yang dipergunakan dalam mengkaji teori peran yakni **paham strukturalis** dan **paham interaksionis**. Paham strukturalis lebih mengaitkan antara peran-peran sebagai unit cultural, serta mengacu ke perangkat hak dan kewajiban, yang secara normatif telah dicanangkan oleh system budaya. System budaya tersebut, menyediakan suatu system posisional, yang menunjuk pada suatu unit dari struktur social, yaitu suatu”..... *location in a system of social relationship*”. Pada intinya, konsep struktur menonjolkan suatu konotasi pasif-statis, baik pada aspek permanensi maupun aspek saling-kait antara posisi satu dengan lainnya.

Paham interaksionis, lebih memperlihatkan konotasi aktif-dinamis dari fenomena peran; terutama setelah peran tersebut merupakan suatu :perwujudan peran (*role performance*), yang bersifat lebih hidup serta lebih organis, sebagai unsur dari system sosial yang telah diinternalisasi oleh *self* dari individu pelaku peran. Dalam hal ini, pelaku peran menjadi sadar akan struktur social yang didudukinya. Karenanya ia berusaha untuk selalu Nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh pelaku lainnya sebagai “tak menyimpang” dari system harapan yang ada dalam masyarakatnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku seseorang sangat diwarnai oleh banyak faktor, serta persepsinya tentang faktor-faktor tersebut. Persepsi yang dimiliki itu pulalah yang turut menentukan bentuk sifat dan intensitas peranannya

dalam kehidupan organisasional. Tidak dapat disangkal pula, bahwa manusia sangat berbeda-beda, seorang dengan yang lainnya, baik dalam arti kebutuhannya – bagi kategori umum – maupun dalam niatnya yang kesemuanya tercermin dalam kepribadian masing-masing.¹⁰

Peran yakni serangkaian pola perilaku yang diharapkan diberbagai lingkungan social berhubungan dengan fungsi individu di berbagai kelompok social. Peran yang ditetapkan adalah peran yang dijalani dan seseorang tidak mempunyai pilihan. Peran yang diambil adalah yang terpilih atau dipilih oleh individu. Peran adalah sikap dan perilaku nilai serta tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Peran yang ditetapkan adalah peran dimana seseorang tidak punya pilihan, sedangkan peran yang diterima adalah peran yang terpilih atau dipilih oleh individu. Posisi dibutuhkan oleh individu sebagai aktualisasi diri.

Stress peran terdiri dari konflik peran yang tidak jelas dan peran yang tidak sesuai atau peran yang terlalu banyak. Peran yang tidak jelas, terjadi apabila individu diberikan peran yang kabur, sesuai perilaku yang diharapkan. Misalnya : individu yang ditetapkan sebagai ketua panitia, tetapi tidak disertai uraian tugas apa yang ia harus lakukan atau kerjakan. Peran berlebihan terjadi jika seseorang individu memiliki banyak peran dalam kehidupannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan peran yang harus di lakukan menurut Stuart and Sundeen, 1998 adalah :

¹⁰ <http://www.damandiri.or.id/file/suwandiunairbab21.pdf>

- a) Kejelasan perilaku dengan penghargaan yang sesuai dengan peran
- b) Konsisten respon orang yang berarti terhadap peran yang dilakukan.
- c) Kesesuaian dan keseimbangan antara peran yang di emban.
- d) Keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran.
- e) Pemisahan situasi yang akan menciptakan ketidak sesuaian perilaku peran.

Hal – hal penting terkait dengan peranan. Peran dibutuhkan individu sebagai aktualisasi diri. Peran yang memenuhi kebutuhan dan sesuai ideal diri, menghasilkan harga diri yang tinggi atau sebaliknya. Posisi individu di masyarakat dapat menjadi stressor terhadap peran. Stress peran timbul karena struktur sosial yang menimbulkan kesukaran atau tuntutan posisi yang tidak mungkin dilaksanakannya. Stress peran terdiri dari, konflik peran, peran yang tidak jelas, peran yang tidak sesuai dan peran yang terlalu banyak.¹¹

2.3.2. Partai Politik

Sebuah negara dengan system demokrasi, membutuhkan sebuah organisasi politik yang menjadi instrument demokrasi. Organisasi tersebut biasa disebut Partai Politik. Secara definitif, Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisir untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan, dengan maksud mensejahterakan anggotanya, baik untuk kebijaksanaan keadilan, maupun untuk hal-hal yang bersifat materil. Sementara itu, R. H. Soltau

¹¹ <http://www.scribd.com/doc/22318053/konsep-diri>

mengemukakan definisinya tentang partai politik sebagai kelompok warga negara terorganisasi dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat¹².

Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik - (biasanya) dengan cara konstitusional - untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka¹³.

Jenis-jenis partai politik dikategorikan bermacam-macam oleh para ahli politik. Max Weber mengategorikan partai politik menjadi 2 jenis, yakni partai elit dan partai massa. Secara tidak langsung, Max Weber mengategorikannya berdasar dari model pembiayaan partai, yang secara otomatis menunjukkan pemilihnya. Partai elit didefinisikan sebagai partai yang didukung oleh kalangan elit dalam system masyarakat, semisal pengacara, doctor, pengusaha, dan lain-lain. Partai massa didefinisikan sebagai partai yang didukung oleh kalangan masyarakat bawah. Franz Neumann mengategorikan partai politik menjadi 2 jenis, yakni *democratic integrative party* and the *totalitarian integrative party*. Franz Neumann mengategorikannya berdasar pada usaha partai dalam mengintegrasikan nilai-nilai politiknya. *Democratic integrative party* didefinisikan sebagai partai yang melakukan

¹² Ahmad Heryawan, Selasa, 02 Juni 2009, *Latar Belakang Berdirinya Partai Politik*, <http://www.ahmadheryawan.com/kolom/94-kolom/4206-latar-belakang-berdirinya-partai-politik.html>

¹³ Budiarto, Miriam, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hal.159.

usaha-usaha pencapaian tujuan politik secara demokratis. Totalitarian integrative party didefinisikan sebagai partai yang melakukan usaha-usaha pencapaian tujuan politik tanpa melalui cara demokratis.¹⁴

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Partai Politik di Indonesia sejak masa merdeka adalah:

1. Maklumat X Wakil Presiden Muhammad Hatta (1945)
2. Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai
4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
5. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (berlaku saat ini)¹⁵

¹⁴ János Simon, The Change of Function of Political Parties at the Turn of Millennium, <http://www.slideshare.net/alafito/the-change-of-function-of-political-parties-at-the-turn-of-millennium-2003>

¹⁵ Partai Politik Di Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik_di_Indonesia

Fungsi Partai Politik

Partai politik melaksanakan suatu tugas penting di dalam pemerintahan. Partai politik bersama masyarakat berusaha mencapai kontrol pemerintahan, menciptakan kebijakan yang baik sesuai kepentingan mereka atau kelompok yang mendukung mereka, serta mengorganisir dan membujuk pemilih untuk memilih calon mereka agar menempati jabatan tertentu. Walaupun sangat banyak yang dilibatkan di dalam menjalankan pemerintahan pada semua tingkat, partai politik bukanlah pemerintah. Tujuan dasar partai politik adalah mencalonkan orangnya untuk jabatan public, dan untuk mendapatkan sebanyak mungkin suara pemilih. Ketika terpilih, pejabat-pejabat tersebut akan berusaha mencapai tujuan Partai mereka melalui proses legislasi dan inisiatif program.

Terdapat beberapa fungsi partai politik, yakni:¹⁶

1) Sarana komunikasi politik

Partai politik memiliki fungsi merumuskan berbagai usulan kebijakan yang bertumpu pada aspirasi rakyat baik yang berada dalam kelompok yang sama ataupun berbeda. Rumusan tersebut kemudian diartikulasikan dan diagregasikan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan. Partai politik memiliki peran yang cukup strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Mengartikulasikan dan mengagregasikan

¹⁶ Menggugat Efektifitas Fungsi Partai Politik, <http://bakpiajogja.blogspot.com/2008/07/menggugat-efektifitas-fungsi-partai.html>

kepentingan rakyat ini menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan agar eksistensi partai politik tetap terjaga dalam kancah perpolitikan dan tidak ditinggalkan oleh rakyat yang diwakilinya.

2) Sarana sosialisasi dan pendidikan politik

Partai politik mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan seluruh wacana politiknya kepada rakyat. Wacana politik ini dituangkan dan dapat dilihat melalui visi, misi, platform dan berbagai program yang diemban oleh partai politik. Rakyat dalam hal ini harus diperlakukan tidak hanya sebagai subyek tetapi sekaligus juga sebagai obyek. Dengan demikian rakyat akan tumbuh menjadi semakin dewasa dan terdidik dalam berpolitik dan berdemokrasi.

3) Sarana rekrutmen politik

Partai politik mempunyai kewajiban untuk melakukan rangkaian kegiatan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mempersiapkan pengisian berbagai posisi dan jabatan politik sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Diantaranya adalah jabatan presiden dan wakil presiden, menteri, gubernur, anggota dewan dan sebagainya. Rekrutmen politik menjadi sangat penting akan memberikan warna dan peluang bagi terjadinya dinamika politik yang dapat menekan terjadinya otoriterisme, diktatorisme, kemandegan dan kebuntuan politik dalam sistem tersebut.

4) Sarana peredam dan pengatur konflik

Partai politik dituntut untuk memiliki kepekaan dan sensitifitas yang tinggi terhadap berbagai potensi konflik yang dari waktu ke waktu intensitasnya semakin meningkat. Partai politik memiliki kewajiban untuk meredam dan mengatur potensi konflik agar tidak meledak dan menimbulkan masalah baru. Konflik memang secara alamiah ada, tetapi yang penting adalah bagaimana mengelola potensi konflik yang ada agar menjadi energi, spirit dan support dalam merumuskan sebuah kebijakan politik untuk semua yang menguntungkan semua pihak.

Dalam literature lain, ada 3 fungsi partai politik¹⁷, yakni:

1) Representing groups of interests

Dalam partai politik dikenal istilah konstituen, yakni orang-orang yang mendukung atau mempercayakan hak pilihannya kepada Partai atau kandidat partai. Partai politik menyajikan kelompok seperti halnya individu. Kelompok-kelompok kepentingan ini mempunyai perhatian khusus. Semisal, partai politik yang merepresentasikan petani, partai politik yang merepresentasikan buruh, dan lain sebagainya. Di Indonesia, beberapa partai berhasil memposisikan dirinya. Salah satunya adalah PDIP, yang memposisikan dirinya sebagai partai politik yang merepresentasikan wong cilik.

¹⁷ The Functions of Political Parties, <http://www.cliffsnotes.com/WileyCDA/CliffsReviewTopic/The-Functions-of-Political-Parties.topicArticleId-65383,articleId-65501.html>

2) Simplifying Choice

Di beberapa Negara, partai politik mampu menempatkan dirinya pada posisi ideology, filosofi, ataupun nilai-nilai politik tertentu. Pemilih dapat melihat partai politik tertentu berdiri pada sisi tertentu, walaupun dengan penilaian secara sederhana. Sehingga pemilih tidak melihat partai politik sebagai sesuatu yang semu tanpa perhatian khusus yang mencirikannya. Semisal di Amerika Serikat, Partai Republik ditempatkan sebagai partai pendukung kalangan bisnis, dan Partai Demokrat ditempatkan sebagai partai pendukung masyarakat bawah.

3) Making Policy

Partai politik, secara organisasi, bukanlah pembuat kebijakan. Namun, partai secara pasti mengambil posisi pada kebijakan-kebijakan penting, terutama untuk menyediakan alternative-alternatif kepada siapapun Partai yang berkuasa. Ketika sebuah partai berkuasa, partai tersebut mencoba untuk meletakkan filosofinya ke dalam praktek perundang-undangan. Jika seorang calon memenangkan jabatan dengan mayoritas besar, hal itu berarti bahwa pemberi suara sudah memberikan suatu mandat untuk menyelesaikan program yang dikampanyekan.

Jason Simon, seorang peneliti politik dari Institut Ilmu Politik Hungarian Academy of Sciences, mengemukakan dalam tulisannya yang berjudul *The Change of Function of Political Parties at the Turn of Millennium*¹⁸, beberapa fungsi partai politik.

1) The Functions of Political Socialization

Sosialisasi politik adalah proses selama seseorang menjadi sadar dan memperoleh norma-norma, nilai-nilai dan aturan tentang perilaku politik. Selama proses ini, keluarga, sekolah, komunitas pertemanan, saluran informasi (semisal ceramah kuliah, media, hubungan telepon, dll.), dan peristiwa yang secara langsung dialami oleh individu, merupakan aspek yang penting dalam sosialisasi politik. Proses sosialisasi juga dipengaruhi oleh kebiasaan dari individu, terutama kemampuannya untuk menerima nilai-nilai baru, dan berapa banyak nilai-nilai ini menjadi inklusif atau eksklusif terhadap nilai-nilai lain. Faktor-faktor ini mendefinisikan ketertarikan dan respon individu terhadap politik, toleransi politiknya, serta identitas partai atau kelompok.

2) The Functions of Mobilization

Melalui mobilisasi politik (menghimbau untuk bertindak, mengerahkan) partai politik melibatkan warganegara ke dalam kehidupan publik. Tujuan mobilisasi politik meliputi tiga bidang:

¹⁸ János Simon, *The Change of Function of Political Parties at the Turn of Millennium*, <http://www.slideshare.net/alafito/the-change-of-function-of-political-parties-at-the-turn-of-millennium-2003>

untuk mengurangi ketegangan sosial yang dimunculkan oleh kelompok yang dikerahkan, untuk mengelaborasi program dalam rangka memperoleh suara bagi partai, dan untuk membangun suatu struktur kelompok yang dapat dijadikan referensi bagi partai politik. Tujuan dari semua mobilisasi politik adalah untuk mencapai suatu efek baik dari aspek-aspek diatas, sehingga dapat memastikan posisi yang lebih baik untuk mobilisasi partai politik.

3) The Functions of Participation

Fungsi partisipasi politik yang dilakukan oleh partai politik dapat dibedakan dari fungsi mobilisasi. Dengan memobilisasi warganegara, partai sedang mengarah pada pembentukan dan pemengaruhan peristiwa-peristiwa politik dengan bantuan dari lingkaran yang terlembagakan dan organisasi-organisasi dalam sistem politik. Sedangkan Partisipasi memastikan perasaan dan kemampuan demokrasi, serta kompetisi didalam partai politik.

Partai politik dapat memastikan partisipasi politik dalam berbagai cara. Menurut Milbrath, sebagai fungsi partai politik, partisipasi politik melibatkan dua dimensi, yakni partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif meliputi instrumen kerja partai (aktifitas konkret partai, pemilihan pemimpin) dan ketertampilan kerja partai (demonstrasi,debat politik). Partisipasi pasif meliputi kepatuhan partai terhadap hukum.

4) The Function of Legitimacy

Fungsi legitimasi mengacu pada bentuk opini publik. Hal tersebut didasarkan pada kepercayaan dan dukungan Partai kepada pemerintah dan sistem, melalui eksistensi partai tersebut. Fungsi legitimasi merupakan efek kolektif dari sosialisasi politik, mobilisasi politik, dan partisipasi politik. Pengenalan dan dukungan suatu sistem pemerintahan tergantung pada berapa banyak warganegara yang taat, menghormati norma-norma, menerima perbedaan dan pemikiran alternatif-alternatif yang muncul dalam rangka menerima sistem institusi dan mekanisme demokrasi. Partisipasi dan Mobilisasi memberikan kepercayaan dan pengalaman bagi pemilih bahwa opini mereka, kepentingan mereka, dan sistem nilai mereka, berperan dalam sistem demokrasi. Menurut beberapa ahli, hal tersebut merupakan aspek yang membedakan antara demokrasi dan non-party/ single-party dictatorship. Oleh karena itu, fungsi legitimasi adalah fungsi utama dari partai politik.

5) The Function of Representation

Fungsi representasi merupakan hasil dari keikutsertaan partai pada pemilihan umum. Sistem pemilihan umum pada negara demokrasi harus memenuhi dua kriteria: representasi dan pemerintahan. Prinsip representasi menjamin ekspresi keinginan pemilih, sebagai hasil akhir dari suara yang telah diberikan kepada partai maupun kandidat.

2.3.3. Mobilisasi Politik

Pemilu Legislatif 2009 baru saja dilakukan. Terlepas dari apa pun hasil dan siapa pemenangnya, ada hal tercecer yang tidak diamati. Sistem yang dilakukan telah mengarah kepada politik mobilisasi daripada demokratisasi itu sendiri. Mobilisasi secara sederhana selalu dilawankan dengan Partisipasi. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik.¹⁹

Mobilisasi didefinisikan sebagai pengembangan sebuah hubungan sosial (merujuk pada istilah yang digunakan Weber) antara dua actor, individu dan Partai. Konsep aktivitas Mobilisasi terdiri dari 3 proses: proses kepentingan (dimensi kognitif), proses pembentukan komunitas (dimensi affectif), dan proses pemanfaatan instrumen (dimensi instrumental). Mobilisasi politik didefinisikan sebagai usaha actor untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan. Suatu variabel directional diperkenalkan dalam rangka menggambarkan dengan tepat jenis hubungan yang berkembang antara Partai dan Individu. Ada 2 model dalam mobilisasi. Pertama, mobilisasi vertical, yakni mobilisasi yang bekerja dalam hubungan vertical. Mobilisasi vertical meliputi Downward mobilization model, grass-root or populist mobilization model, dan ideal democratic model. Kedua, mobilisasi horizontal, yakni

¹⁹ wikipedia

menyertakan segala kemungkinan dari proses-proses internal dalam mobilisasi yang berlangsung diantara Partai dan Individu. Model-model ini membantu untuk menganalisis keadaan politik saat ini sebagaimana ditandai oleh kesinambungan proses mobilisasi horisontal dan vertika. Hal ini menyisakan sebuah tugas riset mobilisasi untuk menyelidiki pernyataan yang dibuat di sini bahwa hubungan hirarkis yang dilembagakan antara Partai dan individu sedang melemah sebagai sebuah hasil dari terus meningkatnya orientasi aktor ke dalam diri mereka ketika sadar akan artikulasi kepentingan, pengembangan loyalitas, dan pemanfaatan instrument-instrumen mobilisasi.²⁰

Mobilisasi Politik bukan sekedar sebagai proses dimana warga Negara diarahkan pada keterlibatan politik. Definisi tersebut dianggap masih umum dan mungkin dilihat sebagai kelebihan ataupun kekurangan sebuah “pendapat umum” dari konsep-konsep di masa lalu mengenai terminology mobilisasi politik. Bagaimanapun, pendefinisian secara umum ini bukan berarti bahwa konsep tersebut bisa digunakan untuk melihat konteks politik, semisal di China. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Verba, Scholzman & Brady (1995, 133) bahwa mobilisasi memiliki banyak makna. Mobilisasi dapat diartikan sedikitnya dalam tiga gejala sosial yang berbeda. Pertama, dalam aspek sosial ekonomi, sebagaimana didefinisikan dalam teori mobilisasi sosial tradisional, mobilisasi mengacu pada suatu proses “pertimbangan sosial dan pembangunan ekonomi”. Di dalam proses ini, besarnya “jumlah individu yang telah terurbanisasi sudah menjadi terpelajar, dan telah ditunjukkan pada pembagian peran dalam ekonomi” (Almond & Powell 1966, 284),

²⁰Birgitta Nedelmann, 1987, *Individuals and Parties - Changes in Processes of Political Mobilization*, European Sociological Review, Oxford University Press. Hal 181-202

dan pada “media komunikasi” (Almond, Powell& Mundt 1996, 184). Kedua, Mobilisasi dapat berarti usaha pembersihan oleh rejim totaliter sebagaimana dilukiskan dalam “ Mobilization model”. Barnett (1962, 31), sebagai gambaran yang terjadi pada rezim Maoist di China. Ketiga, “ Mobilisasi” dapat juga mengacu pada proses selektif untuk melibatkan warganegara di dalam politik²¹.

Mobilisasi terkadang dianggap sebagai sebuah kondisi awal dari evolusi menuju Partisipasi Politik. Partisipasi Politik dianggap sebagai kondisi ideal sebuah iklim demokrasi yang baik. Namun, pada praktiknya, hal tersebut tidak selamanya berjalan seperti itu. Hasil dari kajian tentang mobilisasi dan partisipasi yang dilakukan oleh Jeffrey A. Karp and Susan A. Banducci di negara- negara yang telah lama menjalankan sistem Demokrasi (Jerman, Denmark, Australia IslandiA, Israel, Spanyol, Swedia, Belgia, Irlandia, New Zealand, Norwegia, Finlandia, Prancis, Amerika, Portugal, Switzerland) dan di negara-negara yang baru menjalankan sistem Demokrasi (Brazil, Hungaria, Bulgaria, Korea, Czech Republic, Mexico, Polandia) menyatakan bahwa Mobilisasi terjadi bukan hanya pada New democracy, tetapi juga pada Old Democracy²².

Bookchin, dalam tulisan yang dimuat dalam River Valley Voice²³, memberikan komentar terhadap kampanye yang dilakukan oleh Partai Demokrat di Amerika Serikat yang hanya melakukan aksi yang lebih bersifat sebagai pembalasan terhadap Partai Republik. Dengan kata lain, kampanye politik dan tujuan politik dari

²¹Chapter 3 Mobilization and Party Recruitment,
<http://www.olemiss.edu/courses/pol324/guo02ch3.pdf>. Hal, 23.

²² Jeffrey A. Karp and Susan A. Banducci, 2007, *Party Mobilization And Political Participation In New And Old Democracies*, SAGE Publications

²³ Dikutip dari Benny D Setianto, Dogma Dangkal Politik Mobilisasi.
[http://suamerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak=](http://suamerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=)

Partai Demokrat hanya untuk merebut kekuasaan dari Partai Republik sebagai "balasan" akan kekalahan mereka pada pemilu sebelumnya. Dalam melakukan upaya pembalasan tersebut, maka Partai Demokrat mengandalkan pemimpin yang karismatis, gugusan public figure, organisasi yang semibirokratik, diikuti oleh segerombolan massa mengambang yang tergiur dan tertarik oleh pimpinan partai atau jajaran public figure tersebut. Parahnya menurut Bookchin, sering dukungan yang muncul lebih disebabkan oleh tindakan media yang secara terus-menerus, entah disadari atau tidak, memunculkan para public figure tersebut dengan citra yang dibangun oleh mereka.

Model pengelolaan semacam ini, diyakini oleh Bookchin memang bisa efektif untuk memenangi proses pemilihan tetapi sama sekali tidak mendidik dan mengembangkan demokratisasi itu sendiri. Oleh Bookchin, proses tersebut disebut sebagai politik mobilisasi. Gaya politik mobilisasi lebih didasarkan kepada mobilisasi pemilih daripada mendidik para pemilih. Politik ini dihidupi oleh polling, penciptaan citra di media massa dan tindakan-tindakan lain dalam pemasaran.

Manifestasi lain dari politik mobilisasi adalah orientasi partai-partai politik yang lebih terfokus kepada pemilihan pejabat-pejabat dan perebutan kekuasaan atas jabatan-jabatan tertentu daripada memperkuat basis ideologi anggota partai politik. Akibatnya, koalisi-koalisi antarpantai dilakukan bukan karena partai-partai yang berkoalisi memiliki kesamaan ideologi untuk membangun negara tetapi lebih kepada peningkatan jumlah anggota partai untuk bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu. Karena itu jargon seperti "dalam politik tidak ada yang abadi kecuali kepentingan itu sendiri" menjadi dogma yang diyakini dan memang terjadi. Koalisi-koalisi tersebut

sangat semu dan dangkal yang dengan mudah berubah sesuai dengan "lowongan" jabatan yang ada. Politikus-politikus yang terlibat juga semakin profesional dan berubah seolah-olah menjadi politikus adalah jabatan karier dan mata pencaharian, dan bukan merupakan pejuang-pejuang prinsip atau ideologi tertentu. Akibatnya, politikus bisa dengan mudah berpindah dari satu partai ke partai lain, meski sebenarnya kedua partai tersebut memiliki ideologi yang berbeda atau bahkan berseberangan. Terkait dengan hal ini, kemampuan pengorganisasian partai menjadi salah satu aspek yang penting dalam perilaku Partai (Jeffrey A. Karp and Susan A. Banducci: 2007)

Proses politik dalam gaya politik mobilisasi semakin menjauhkan masyarakat ke dalam tujuan politik yang sebenarnya, yaitu demi pengaturan kehidupan bersama. Lingkaran politik menjadi lingkaran profesi yang menghidupi para politikus dalam arti yang sebenar-benarnya. Mereka hidup dari proses politik mobilisasi tanpa memiliki sumber-sumber keuangan lain di luar jabatan-jabatan politik yang disandang itu. Akibat yang kemudian bisa diamati karena gaya politik mobilisasi adalah sikap apatis masyarakat terhadap proses pemilihan umum dan tindakan-tindakan yang terkait dengan mobilisasi massa tersebut. Tingginya angka golput menjadi parameter yang gampang diikuti. Bagi kehidupan berbangsa, karena rasa percaya diri yang berlebihan pada para pemimpin, karena merasa didukung oleh seluruh mayoritas, maka proses pengambilan keputusan bagi kebijakan sehari-hari justru semakin dijauhkan dari masyarakat konstituen. Sehingga mekanisme yang terjadi di partai menjadi tertutup dari kehidupan politis warga. Akhirnya ketika diminta untuk memilih pun sebenarnya warga tidak memiliki pengetahuan yang

cukup kecuali dari pencitraan yang dimunculkan oleh media massa. Pencitraan ini hanya membuat warga memilih kucing dalam karung, karena sebenarnya tidak mengetahui apa yang dipilihnya.

Pernyataan yang paling keras dari Bookchin terhadap gaya politik ini adalah bahwa politik mobilisasi-lah yang mengantarkan Hitler kepada kekuasaan dengan melakukan mobilisasi massa terhadap Partai Nazi. Dukungan melalui proses yang seolah-olah demokratis dan populer telah menjerumuskan proses demokratisasi ini.

Praktek mobilisasi

Dalam menjalankan mobilisasi, sebuah partai politik mampu memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemanfaatan sumberdaya tersebut dapat dilakukan melalui political marketing. Marketing Politik adalah ilmu baru yang mencoba menggabungkan teori-teori marketing dalam kehidupan politik. Sebagai cabang ilmu, marketing politik memang bisa dikatakan masih bayi, tetapi kehadirannya telah menjadi trend dalam ranah politik di negara maju yang menganut demokrasi.²⁴ Partai politik dan kandidat perseorangan berlomba memanfaatkan ilmu ini untuk strategi kampanye baik untuk memobilisasi pemilih, mendapatkan dukungan politik dalam pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu) maupun untuk memelihara citra sepanjang saat dalam jeda Pemilu. Pokok kajian marketing politik, secara konseptual sebagai "Political marketing in simple terms is a marriage

²⁴ Firmansyah, Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007. Hal. 6; 21

between two social science disciplines – political science and marketing”²⁵ Sebagai kajian keilmuan, marketing politik terus mengalami perkembangan definisi yang beragam dan berubah. Shama (1975) & Kotler (1982) memberikan penekanan pada proses transaksi yang terjadi antara pemilih dan kandidat. O’Leay & Iradela (1976) menekankan penggunaan marketing-mix untuk mempromosikan partai-partai politik. Lock & Harris (1996) mengusulkan agar political marketing memperhatikan proses positioning. Wring (1997) menggunakan riset opini dan analisis lingkungan. Sedangkan menurut Nursal yang pertama kali menerbitkan buku mengenai marketing politik di Indonesia, mendefinisikan sebagai serangkaian aktivitas terencana, strategis tapi juga taktis, berdimensi jangka panjang dan jangka pendek, untuk menyebarkan makna politik kepada pemilih. Sehingga political marketing bertujuan membentuk dan menanamkan harapan, sikap, keyakinan, orientasi dan perilaku pemilih. Perilaku pemilih yang diharapkan adalah secara umum mendukung dengan berbagai dimenasinya, khususnya menjatuhkan pilihan pada partai atau kandidat tertentu.²⁶

Pada dasarnya marketing politik adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih menjadi orientasi perilaku yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih partai politik atau konstestan tertentu. Makna inilah yang menjadi output penting marketing politik yang menentukan pihak, pihak mana yang akan dicoblos para pemilih.²⁷

²⁵ J. Lees-Marshment, *Political Marketing and British Political Parties: The Party’s Just Begun*, Manchester University Press, 2001.

²⁶ Adman Nursal, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004. Hal. 23-24

²⁷ Adman Nursal, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, Hal. 295-298.

Pembentukan makna-makna politis tersebut dapat dilaksanakan melalui metode 9P (Positioning, policy, person, party, presentation, push marketing, pull marketing, pass marketing dan polling)²⁸.

- 1) Positioning adalah strategi komunikasi untuk memasuki jendela otak pemilih agar konstestan mengandung arti tertentu yang mencerminkan keunggulannya terhadap konstestan pesaing dalam bentuk hubungan asosiatif.
- 2) Policy adalah tawaran program kerja jika terpilih kelak. Policy yang efektif harus memenuhi tiga syarat, yakni meraiik perhatian, mudah terserap pemilih, attributable.
- 3) Person adalah kandidat legislatif atau eksekutif yang akan dipilih melalui Pemilu. Kualitas person dapat dilihat nelalui tiga dimensi, yakni kualitas instrumental, dimensi simbolis, dan fenotipe optis.
- 4) Party juga dilihat sebagai substansi produk politik. Partai politik mempunyai identitas utama, asset reputasi, dan identitas estetis. Ketiga hal tersebut akan dioertimbangkan oleh para pemilih dalam menetapkan pilihannya.
- 5) Presentation adalah bagaimana ketiga substansi produk politik disajikan. Presentasi sangat penting karena dapat mempengaruhi makna pemilih. Presentasi disajikan dengan medium presentasi. Produk politik disampaikan kepada pasar politik (political market) melalui push marketing pull marketing, pass marketing, polling.
- 6) Push Marketing adalah penyampaian produk langsung kepada masyarakat

²⁸ Oman Heryaman, S.IP, M.Si, Political Marketing Dan Kualitas Demokrasi, <http://www.scribd.com/doc/5988402/Political-Marketing-dan-Kualitas-Demokrasi>

- 7) Pull marketing adalah penyampaian produk melalui pemanfaatan media massa
- 8) Pass marketing adalah penyampaian produk kepada influencer group.
- 9) Agar produk politik disampaikan tepat pada sasaran dilakukan polling dan berbagai aktivitas riset lainnya. Riset ini merupakan kebutuhan penting untuk pemetaan isu, pemetaan segmentasi dan pemetaan program

Metode 9P diatas, biasa disebut dengan Totally political marketing. Totally Political Marketing yakni²⁹ partai politik memasarkan semua yang bisa dijual, baik potensi, kelebihan dan performa partai politik. Di dalam kajian ini, usaha-usaha tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu metode dalam melakukan mobilisasi. Semua unit dalam sistem kinerja partai politik layak dan harus dijual. Antara lain yang sering dilupakan orang misalnya kinerja institusi partai politik rapi tidak konflik negatif, anggota dan perilakunya, kinerja kandidat terpilih dalam Pemilu sebelumnya, dan lainnya yang memiliki citra positif. Jadi praktisi political marketing yang canggih tidak hanya memfokuskan diri pada penggarapan isu dan program kerja saja, meskipun program kerja itu penting dan harus menarik. Pengertian Totally Political Marketing juga diartikan apabila partai politik mampu melaksanakan dua model kampanye sekaligus secara konsisten dan berkesinambungan (continuity), yaitu kampanye Pemilu dan Kampanye Politik. Dalam kampanye pemilu maupun kampanye politik, marketing politik adalah sebuah proses. Proses tersebut harus ditempuh melalui dua hal utama, yaitu marketing

²⁹ Oman Heryaman, "Memenangkan Pemilu dengan Political Marketing", makalah Orientasi Pemenangan Pemilu DPD PKS Kabupaten Bandung, 2007 dalam <http://digilib.unpas.ac.id>.

program dan voters segmentation. Marketing program adalah menyampaikan produk politik yang disebut dengan 4P (Product, Price, Promotion dan Place). Voters segmentation adalah menentukan para pemilih pada beberapa level kategori, sehingga pengemasan produk politik dapat dilakukan sesuai kategori tersebut.

Bagi partai-partai politik maupun kandidat, sekurang-kurangnya konsep marketing politik dapat dilakukan melalui beberapa metode³⁰: Mengkomunikasikan pesan dan gagasan. Mengembangkan identitas jati diri, kredibilitas dan transparansi. Interaksi dan respons dengan komunitas internal dan eksternal dengan melakukan pencitraan partai politik. Menyediakan pelatihan, mengolah dan menganalisis data untuk kepentingan kampanye. Secara terus menerus mempengaruhi dan mendorong komunitas untuk mendukung partai politik.

Kampanye sebagai salah satu bentuk marketing politik, dapat diterapkan dalam 2 model. Pertama, kampanye pemilu yang bersifat jangka pendek dan biasanya dilakukan menjelang Pemilu. Kedua, kampanye politik yang bersifat jangka panjang dan dilakukan secara terus menerus. Pendapat ini didukung Fritzs Plasser dan Gunda Plasser,³¹ yang menyatakan telah terjadi pergeseran dalam bentuk kampanye dewasa ini, dari model kampanye modern ke mode kampanye pasca modern. Kampanye modern menggunakan "logika media" dan menempatkan pemilih sebagai audiens, sedangkan kampanye pasca modern menerapkan logika "pemasaran" yang menempatkan masyarakat sebagai konsumen. Dengan demikian marketing politik tepat diterapkan dalam model kampanye politik yang bertujuan

³⁰ Paul Baines, Fritz Plasser & Christian Scheucher, "Operationalising Political Marketing: A Comparison of US and Western European Consultants and Managers". Middlesex University Discussion Paper Series, No. 7, July 1999

³¹ Fritzs Plasser dan Gunda Plasser, *Global Political Campaigning: A Worldwide Analysis of Campaign Professionals and Their Practices*. Greenwood Pub Group, 2002

memobilisasi. Melalui logika pemasaran, kedekatan partai politik dengan konstituen dan massa mengambang tetap terjaga setiap saat. Tercipta pendidikan politik masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek politik. Bukan sekedar sebagai obyek politik yang terjadi pada saat hingar bingar kampanye Pemilu saja, dimana setelah itu terputus hubungan antara masyarakat dan partai politik yang dapat menyebabkan antipati dan apolitis masyarakat terhadap politik.

Hal diatas antara lain disebabkan oleh dua hal³². Pertama, intensitas interaksi partai politik dan masyarakat seringkali hanya terjadi pada waktu menjelang Pemilu melalui pelaksanaan kampanye. Pada masa ini partai-partai berlomba menawarkan produk-produk politik berupa ideologi, gagasan, kebijakan dan rekam jejak. Masyarakat dijadikan 'pasar sesaat (pasar kaget)' untuk mendengar, melihat dan memilih dari produk-produk mereka. Di luar masa ini, komunikasi partai politik dengan masyarakat seperti terputus dengan kesibukannya masing-masing. Disatu sisi partai politik sibuk dengan agendanya masing-masing yang sering tidak bersentuhan dengan masyarakat, dan disisi lain masyarakat seringkali lupa dan apatis, apakah program-program yang dikampanyekan telah dilaksanakan atau belum. Masyarakat kehilangan daya kritisnya untuk mengontrol partai politik dan pemerintahan. Dengan demikian partai politik menempatkan marketing politik hanya pada kampanye Pemilu saja.

Kedua, dunia politik seringkali salah memaknai kata marketing. Marketing secara sempit diartikan sebatas memasarkan atau menjual. Dengan demikian marketing politik berarti menjual atau memasarkan produk-produk politik saja. Bagi

³² Oman Heryaman, S.IP, M.Si, Political Marketing Dan Kualitas Demokrasi, <http://www.scribd.com/doc/5988402/Political-Marketing-dan-Kualitas-Demokrasi>

partai politik waktu yang tepat untuk menjual dan memasarkan produk politik hanyalah waktu kampanye Pemilu. Padahal makna marketing jauh lebih kompleks ketimbang menjual atau memasarkan. Dalam marketing juga mengandung makna product inovasion, new product research, pengambilan keputusan, dan resources yang dilakukan setiap saat. Apabila hal tersebut dimaknai dengan benar maka seharusnya partai politik melakukan kampanye sepanjang masa (kampanye politik) dengan mengolah ide, gagasan dan program baru yang inovatif, riset aspirasi, kebijakan rasional yang menguntungkan masyarakat, dan melahirkan SDM dan leadership yang unggul untuk menjalankan roda pemerintahan dan kebijakan negara yang berpihak pada kemajuan dan kepentingan masyarakat.

Di dalam melakukan mobilisasi, partai atau kandidat juga dapat memanfaatkan figur. Hal ini tentunya dengan melihat kualitas figur yang coba ditampilkan, sehingga pemilih mampu menerimanya sebagai nilai politik yang akan dipilih. Kualitas dari seorang figur dapat dilihat dari tiga dimensi: kualitas instrumental, faktor simbolis, dan fenotipe optis.³³ Kualitas instrumental adalah kompetensi kandidat yang meliputi kompetisi manajerial dan kompetensi fungsional. Kompetensi manajerial berkaitan dengan kemampuan dalam mengelola organisasi yaitu planning, organizing, actuating, controlling. Kompetensi fungsional adalah kemampuan yang dianggap penting untuk melaksanakan tugas misalnya keahlian bidang ekonomi, hukum, keamanan, teknologi, dan sebagainya.

Kualitas instrumental dapat dilihat dari personal kandidat yaitu kemampuan kandidat tersebut untuk melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat. Hal ini bisa dilihat

³³ Adman Nursal, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru* Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004 hal. 207

dari track record ketika orang tersebut memimpin suatu kelompok atau organisasi. Kualitas instrumental ini sangat dibutuhkan karena jabatan politik memerlukan kemampuan seorang pemimpin yang respon terhadap segala tantangan di depannya.

Mengenai kualitas kandidat, Adman Nursal berpendapat bahwa terdapat 4 hal faktor yang merupakan bagian dari faktor simbolis yaitu:³⁴

1. prinsip- prinsip hidup yang meliputi sejumlah keyakinan atau nilai dasar yang dianut oleh seorang kandidat seperti integritas, keterbukaan, kesetiakawanan, ketulusan, kerelaan berkorban, kebersahajaan, keperdulian sesama, keimanan, ketakwaan, independen, bertanggungjawab, dsb.
2. Aura emosional adalah perasaan emosional yang terpancar dari kandidat seperti ambisius, berani, patriotis, bersemangat, gembira, optimis, cinta kasih, tegar, keharuan, halus, dsb.
3. Aura inspirational adalah aspek- aspek tertentu yang terpancar dari kandidat yang membuat orang terinspirasi, termotivasi, dan tergerak untuk bersikap atau melakukan hal- hal tertentu. Aura ini bisa meliputi dorongan semangat, kemampuan mempengaruhi, keteladanan, daya persuasi, sikap berbagi pengetahuan, pengalaman, dan harapan dsb. Aura insirational akan tercermin dalam reputasi, sikap, tindakan, termasuk substansi dan cara berbicara kandidat.
4. Aura sosial adalah representasi atau asosiasi terhadap kelompok sosial tertentu. Misalnya seorang kandidat tertentu merupakan representasi dari kaum muda, wong cilik, tokoh agama, akademisi, intelektual, seniman, teknolog, aktivis, bahkan artis

³⁴ Ibid, hal208-209

Mengenai kualitas kandidat dijelaskan bahwa terdapat faktor penampakan visual seorang kandidat. Dengan kata lain bisa dikatakan kualitas kandidat dipengaruhi juga oleh fenotipe optis. Fenotipe optis terdiri dari tiga faktor:³⁵

1. Pesona Fisik adalah keindahan postur dan bentuk tubuh dan bagian- bagiannya. Tanggapan para pemilih dari fenotipe ini yaitu: ganteng, cantik, berparas menarik, muda, tinggi, ramping, atletis, dsb.
2. faktor kesehatan dan kebugaran seorang kandidat terpancar dari kekuatan fisik, energic, aktif, sportif, riang, cerah, dsb.
3. Gaya penampilan meliputi cara dan pilihan pakaian dan bahasa tubuh yang terlihat dari kandidat.

Ketiga dimensi tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Kualitas instrumental yang berbicara tentang kemampuan manajeral dan kompetensi fungsional yang memadai harus juga didukung dimensi lain seperti dimensi simbolis.

Ada empat hal utama yang melandasi pentingnya penggunaan marketing politik bagi partai-partai politik³⁶. Pertama, terjadinya pergeseran paradigma pemilih dari ideologi ke program kerja. Adanya de-ideologisasi pasca berakhirnya Perang Dingin secara global telah merubah pula cara pandang dan preferensi para pemilih partai politik. Masyarakat cenderung menggantikan ikatan-ikatan ideologis (tradisional) dengan hal-hal yang lebih pragmatis, yaitu program kerja yang ditawarkan oleh konstestan. Masyarakat cenderung melihat apa yang bisa dan apa yang ditawarkan oleh partai politik maupun kontestan dibandingkan dengan alasan-

³⁵ Ibid, hal 209

³⁶ Firmansyah. Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007. Hal. 57-58

alasan ideologis yang ada dibalik satu partai politik atau kontestan. Hal ini terlihat nyata sekali dengan semakin membesarnya persentase pemilih non-partisan, yaitu para pemilih yang menunggu partai politik mana yang kiranya menawarkan solusi paling baik ketimbang yang lainnya. Partai politik macam inilah yang akan mereka pilih dalam Pemilu.

Kedua, meningkatnya pemilih non-partisan. Terdapat trend yang memperlihatkan semakin meningkatnya proporsi non-partisan dalam Pemilu. Non-partisan adalah sekelompok masyarakat yang tidak menjadi anggota atau mengikatkan diri secara ideologis dengan partai politik tertentu. Kaum non-partisan melihat pentingnya kemampuan dan kapasitas orang atau program kerja partai politik mana yang dapat memberikan solusi atas permasalahan bangsa dan negara ketika program-program itu dikomunikasikan selama periode menjelang Pemilu.

Ketiga, meningkatnya massa mengambang (floating mass). Dengan meningkatnya jumlah pemilih non partisan maka jumlah massa mengambang semakin besar. Massa mengambang ini seringkali sangat menentukan menang tidaknya suatu partai politik dalam Pemilu. Massa mengambang adalah kelompok masyarakat yang diperebutkan oleh partai-partai dan kandidat yang bersaing dalam Pemilu. Massa mengambang ini semakin besar seiring semakin kritisnya masyarakat.

Keempat, adanya persaingan politik. Sistem multipartai yang kini banyak dianut oleh negara yang sedang meniti ke arah demokrasi ataupun baru saja melaksanakan transisi dari otoriter menuju demokrasi, ditambah dengan semakin kritisnya masyarakat dalam memilih partai politik telah menempatkan partai politik pada iklim kompetisi yang ketat untuk memperebutkan pemilih.

Melalui pertimbangan diatas, marketing politik bertujuan untuk³⁷:

- 1) Menjadikan pemilih sebagai subyek dan bukan sebagai obyek politik. Dalam hal ini pemilih tidak hanya sekedar suara yang diperebutkan partai dengan berbagai tawaran produknya, tetapi pemilih ikut menentukan program dan produk-produk politik apa yang seharusnya dilakukan partai politik.
- 2) Menjadikan permasalahan yang dihadapi pemilih adalah langkah awal dalam menyusun program kerja yang ditawarkan dalam kerangka masing-masing ideologi partai politik.

Marketing politik tidak menjamin sebuah kemenangan, tapi menyediakan perangkat bagaimana menjaga hubungan dengan pemilih untuk membangun kepercayaan, mobilisasi, dan selanjutnya memperoleh dukungan suara.

Jenis Mobilisasi

Mobilisasi dikategorikan dalam 2 bentuk, yakni mobilisasi langsung dan mobilisasi tidak langsung. Mobilisasi langsung merupakan kegiatan mabilisasi dalam bentuk pengerahan terhadap pemilih agar melakukan tindakan politik sebagaimana yang dikehendaki partai politik. Mobilisasi tidak langsung merupakan kegiatan mobilisasi dalam bentuk pemengaruhan cara piker atau cara pandang pemilih, sehingga pemilih akan mengekspresikan pemahamannya dalam bentuk keputusan politik pemilih.

³⁷ J. Dermody & R. Scullion, dikutip dari Oman Heryaman, S.IP, M.Si, Political Marketing Dan Kualitas Demokrasi, <http://www.scribd.com/doc/5988402/Political-Marketing-dan-Kualitas-Demokrasi>

Pembedaan kategori antara mobilisasi langsung dan tidak langsung berdasar pada mekanisme-mekanisme mobilisasi yang dilakukan oleh partai politik. Mobilisasi langsung dapat dilakukan dengan memberikan instruksi-instruksi melalui mekanisme partai politik kepada para pemilih. Sedangkan mobilisasi tidak langsung dapat dilakukan dengan kampanye-kampanye langsung maupun melalui media-media. Mobilisasi langsung, semisal adalah menggerakkan simpatisan partai untuk melakukan konvoi jalanan, untuk melakukan aksi-aksi politik, dan lain sebagainya. Mobilisasi tidak langsung, semisal adalah iklan-iklan politik di media masa, seminar-seminar partai, kampanye dialogis, dan lain sebagainya.

Mobilisasi Politik Di Indonesia

Pada masa Orde Baru, Pemilu tidak berjalan secara Demokratis. Hegemoni dari pemerintah menempatkan Partai tertentu sebagai pemenang dalam setiap Pemilu. Kenapa hal itu terjadi? Setidaknya ada beberapa sebab. Pertama, keinginan pemerintah untuk memperkuat pilar-pilar kekuasaannya. Sebagaimana yang telah diketahui umum, kekuasaan pemerintahan Orde Baru ditopang oleh 3 pilar, yakni Militer, Birokrasi, dan Golkar. Terkait dengan hal ini, maka Golkar merupakan peserta Pemilu. Kedua, penciptaan sistem hegemonic party dalam rangka mewujudkan stabilitas politik. Sebagai peserta Pemilu, sangat memungkinkan kekuasaan politik Golkar bersifat tidak pasti. Dalam sebuah sistem demokrasi dengan Pemilu yang Demokratis, kekuasaan politik sebuah Partai dapat berubah dari periode ke periode, sesuai seberapa besar dukungan rakyat. Melihat hal tersebut, maka

penciptaan sistem hegemonic party penting dalam rangka menghilangkan sifat ketidak pastian dalam Pemilu. Ketiga, menutup peluang-peluang politik partai lain. PPP dan PDI selalu menjadi minoritas di Parlemen. Sehingga tidak cukup memiliki kekuatan politik untuk berposisi.

Akibat yang muncul dari situasi tersebut adalah tidak diperhatikannya kualitas Pemilu, khususnya terkait dengan konstituen. Partisipasi politik sebagai pilar demokrasi, merupakan sesuatu yang sulit diterima dalam perpolitikan Orde Baru. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah adalah memobilisasi rakyat untuk menjatuhkan pilihannya pada Partai tertentu, yakni Golkar. Sedangkan PPP dan PDI tidak cukup memiliki ruang gerak untuk melakukan mobilisasi. Mobilisasi yang dilakukan oleh pemerintah sangat kuat dirasakan oleh para Pegawai pemerintah. Pemecatan maupun penghambatan karir sangat mungkin terjadi bila berafiliasi dengan Partai selain Golkar. Mobilisasi terhadap masyarakat sipil terjadi dalam bentuk ketakutan-ketakutan. Ketakutan akan ketidak perolehan pelayanan publik, ketakutan akan label Komunis, dan lain sebagainya.

Setelah jatuhnya Orde Baru, muncul sebuah Pemilu yang berbeda dengan sebelumnya. Bagaimana dengan mobilisasi? PDIP sebagai “kelanjutan” dari PDI berhasil memanfaatkan simpati rakyat terhadap posisi Megawati. PDIP dengan mudah menguasai orientasi politik pemilih Indonesia. Hal ini merupakan mobilisasi yang bersifat lebih positif daripada apa yang terjadi pada masa Orde Baru. Figur yang muncul dari seorang Megawati, membuat pemilih melihat figur sebagai faktor kuat dalam pertimbangan politiknya. Sehingga memunculkan mobilisasi politik. Meskipun begitu, mobilisasi pada Pemilu 1999 berbeda dengan Pemilu pada masa

Orde Baru, yakni masih ada kebebasan memilih. Setelah Pemilu 1999, Liddle meneliti perilaku pemilih dalam Pemilu 1999 dengan cermat (bersama muridnya, Saiful Mujani, dan sejumlah peneliti UI, antara lain Eep Saifulloh Fatah, yang kini juga menjadi muridnya)³⁸, Liddle menyimpulkan bahwa perilaku pemilih sekarang belum banyak berbeda dengan perilaku pemilih pada 1955, sewaktu pemilu pertama diadakan. Empat puluh lima tahun silam, seperti yang dikatakan Clifford Geertz, basis pertarungan antarpolisi mengikuti garis primordial. Rakyat memilih tidak berdasarkan persetujuan mereka terhadap program partai secara rasional, tetapi lebih berdasarkan pada loyalitas dan identitas agama, daerah, dan suku. Sekarang, peran suku dan daerah mungkin agak berubah, tetapi peran agama tetap. Dulu dan sekarang, agama dan identitas keagamaan tetap menjadi basis mobilisasi politik dan legitimasi kekuasaan. Sewaktu Gus Dur terpilih sebagai presiden sepuluh bulan lalu, ia dipilih secara langsung oleh sekian ratus anggota MPR. Sekarang, anggaplah semua anggota MPR ini adalah keseluruhan penduduk Indonesia. Di sini kita bisa melihat ada banyak partai plus golongan di lembaga tertinggi ini. Tapi, dalam proses pemilihan presiden, ada berapa kubu besar yang tercipta? Ada berapa kandidat yang pada akhirnya bersaing ketat? Apa garis perbedaannya? Ternyata, hanya ada dua kubu dan dua kandidat dominan (Megawati dan Gus Dur), dan garis pemisahannya persis seperti yang diramalkan oleh Hukum Liddle itu.

Pada pemilu 2004, mobilisasi politik yang terjadi di Indonesia mengalami perubahan. Hal ini disebabkan adanya Pemilihan Presiden Langsung. Di dalam Pemilu legislatif, PDIP masih mendominasi peta mobilisasi politik. Bila pada Pemilu

³⁸ Artikel Umum, Hukum Liddle, Kolom, TEMPO, 27 Agustus 2000

1999 mobilisasi lebih fokus pada figur Megawati, maka pada Pemilu 2004 muncul mobilisasi yang berdasar pada identifikasi kepartaian. Pemilih mengikatkan dirinya pada PDIP. Hal ini dikatakan sebagai bentuk mobilisasi karena pemilih yang melakukan identifikasi kepartaian belum mencerminkan Partisipasi politik. Pemilih hanya terikat secara emosional dengan Partai tersebut. Pelaksanaan pemilihan presiden langsung, menempatkan media sebagai unsur penting mobilisasi. Munculnya figur SBY sebagai pemenang Pilpres 2004 menggambarkan betapa berperannya media dalam melakukan marketing politik yang bertujuan untuk memobilisasi pemilih untuk memilih SBY. Keberpihakan beberapa media massa kepada salah satu calon menyebabkan ini terjadi. Apa yang ditampilkan media selalu mengarahkan pada pilihan tertentu, tanpa secara obyektif. Sehingga tidak mengarahkan pada partisipasi politik pemilih.

Di Indonesia, implementasi marketing politik oleh partai politik merupakan fenomena baru dan masih dilaksanakan secara parsial, bahkan seringkali tanpa disadari partai-partai politik telah melaksanakan praktek-praktek marketing politik dalam berkomunikasi dengan komunitas konstituen dan masyarakat umum. Meskipun sampai saat ini penyelidikan dan publikasi yang membahas tentang marketing politik masih tergolong minim, bukan berarti selama ini aktivitas partai politik di masa lalu tidak melakukan aktivitas marketing politik. Disadari atau tidak partai politik di Indonesia telah melakukan serangkaian aktivitas ini. Pengumpulan massa (temu kader, tabligh akbar dan deklarasi), pawai di jalan-jalan, liputan media cetak (TV, Koran, majalah, radio) atas aktivitas sebuah partai politik sampai ke kunjungan wakil-wakil partai politik ke komunitas konstituen maupun komunitas

tertentu telah biasa dilakukan.³⁹ Hanya saja kalau dilihat dari intensitasnya, pelaksanaan marketing politik di Indonesia lebih bersifat sporadis pada saat pelaksanaan kampanye Pemilu saja. Padahal menurut Butler & Collins marketing politik tidak hanya dilihat selama periode kampanye Pemilu saja.⁴⁰

Pada pemilu legislatif 2009 lalu, mobilisasi juga terjadi. Perubahan sistem pemilu dari proposional menjadi proporsional terbuka, dengan penentuan berdasar suara Caleg, menyebabkan mobilisasi politik sangat mungkin menguat dibanding Pemilu sebelumnya. Jeffrey menyatakan bahwa pada system pemilu yang berdasar kandidat, terdapat dorongan yang lebih besar untuk melakukan mobilisasi⁴¹. Caleg-caleg Partai tentu akan melakukan gerakan-gerakan politik yang bersifat independen. Masih kuatnya pengerahan mobilisasi politik, menyebabkan caleg-caleg juga melakukan mobilisasi sendiri-sendiri, yang mungkin terlepas dari mobilisasi yang dilakukan Partainya. Sebagaimana yang dinyatakan Liddle, agama mungkin menjadi salah satu sumber mobilisasi di Indonesia. Faktor figur, politik identitas, hingga money politik, kemungkinan juga masih menjadi sumber mobilisasi.

³⁹ Firmansyah. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007. Hal. 18-19

⁴⁰ P. Butler & N. Collin, "Payment on Delivery: Recognising Constituency Service as Political Marketing. *European Journal of Marketing*. (35), 9-10, 2001. Hal. 1026-1037.

⁴¹ Jeffrey A. Karp, Susan A. Banducci And Shaun Bowle, 2007, *Getting Out the Vote: Party Mobilization in a Comparative Perspective*, Cambridge University Press. Hal. 110.

2.4. Kerangka Konseptual

2.4.1. Peran

Peran dalam kajian ini ditujukan pada keterlibatan partai politik dalam bentuk pemanfaatan mesin partai untuk mengarahkan pemilih agar bertindak sebagaimana yang diinginkan oleh partai politik.

2.4.2. Partai Politik

Partai Politik dalam kajian ini ditujukan pada partai politik yang lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pemilihan Umum 2009.

2.4.3. Mobilisasi Politik

Mobilisasi dalam kajian ini ditujukan pada usaha-usaha partai politik untuk menggerakkan pemilih agar melakukan tindakan politik berupa pemberian suara.

2.4.4. Political Marketing

Political marketing dalam kajian ini ditujukan pada strategi-strategi partai politik dalam mempengaruhi pemilih, agar menjatuhkan pilihannya pada partai politik atau kandidat tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan unsur pokok yang harus ada dalam penelitian Ilmu pengetahuan untuk mendapatkan data akurat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Pemilihan metode penelitian yang tepat merupakan unsure yang sangat penting dalam mencapai tujuan secara optimal. Metode penelitian yang akan digunakan dalam kajian ini adalah metode Deskriptif kualitatif, yang menyajikan fakta-fakta yang ditemukan, secara komprehensif melalui analisa analisa yang mendalam.

3.6. Jenis Data

Terdapat 2 jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1. Data Primer, yaitu sejumlah data atau keterangan yang secara langsung diperoleh melalui penelitian di lapangan, meliputi keterangan dari orang-orang yang diteliti yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Data Primer tersebut yakni terdiri dari:

- Hasil wawancara terhadap pengurus Partai di tingkat Kabupaten Demak
- Hasil wawancara terhadap calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Demak
- Hasil wawancara terhadap pemilih di Kabupaten Demak

2. Data Sekunder, yakni data-data penunjang yang telah diolah lebih lanjut

Data Sekunder tersebut yakni terdiri dari:

- Hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Demak, terkait perolehan suara Partai untuk DPRD Kab Demak pada Pemilu 2009.
- Hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Demak, terkait perolehan suara Partai untuk DPRD Kab Demak pada Pemilu 2004 dan Pemilu 1999.
- Dokumen-dokumen Partai yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan Pemilu legislatif di Kabupaten Demak.
- Pemberitaan media mengenai kegiatan-kegiatan Partai di Kabupaten Demak.

3.7. Sampling

Sampling merupakan target-target penelitian yang dipilih diantara populasi. Dalam penelitian ini, populasinya adalah partai-partai peserta pemilihan umum legislatif untuk DPRD Kabupaten Demak. Partai-partai tersebut adalah sebagai berikut:

Partai-Partai Peserta Pemilu DPRD Kabupaten Demak

No ParPol	Partai Politik	
1	1	Partai Hanura
2	2	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
3	3	Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia
4	4	Partai Peduli Rakyat Nasional
5	5	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
6	6	Partai Barisan Nasional
7	7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
8	8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	9	Partai Amanat Nasional (PAN)
10	10	Partai Perjuangan Indonesia Baru
11	11	Partai Kedaulatan
12	12	Partai Persatuan Daerah
13	13	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
14	14	Partai Pemuda Indonesia
15	15	Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme
16	16	Partai Demokrasi Pembaruan
17	17	Partai Karya Perjuangan
18	18	Partai Matahari Bangsa
19	19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia
20	20	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
21	21	Partai Republik Nusantara
22	22	Partai Pelopor
23	23	Partai Golongan Karya (Partai Golkar)
24	24	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
25	25	Partai Damai Sejahtera
26	26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan
27	27	Partai Bulan Bintang (PBB)
28	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
29	29	Partai Bintang Reformasi (PBR)
30	30	Partai Patriot
31	31	Partai Demokrat
32	32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia
33	33	Partai Inonesia Sejahtera
34	34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama
35	41	Partai Merdeka
36	42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
37	43	Partai Sarikat Indonesia
38	44	Partai Buruh

Sumber: KPUD Kabupaten Demak

Peneliti menentukan sampel yang akan diwawancarai dengan menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling didefinisikan sebagai *A form of sampling in which the selection of the sample is based on the judgement of the researcher as to which subjects best fit the criteria of the study*⁴². Purposive sampling tertuju pada sebuah kelompok tertentu.⁴³ Purposive sampling dimulai dengan suatu tujuan di dalam pikiran peneliti, dan kemudian sampel dipilih berdasarkan ketertarikan peneliti pada sampel, terkait pencapaian tujuan penelitian.⁴⁴ Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam melakukan purposive sampling adalah Pertama, mengidentifikasi sumber-sumber variasi yang penting dari populasi. Kemudian memilih kasus-kasus sesuai sumber-sumber variasi tersebut.

Peneliti mengidentifikasi populasi berdasarkan dua criteria, yakni partai yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten Demak pada Pemilu 2004 dan 2009, dan partai yang baru memperoleh kursi DPRD Kabupaten Demak pada Pemilu 2009. Pengkriteriaan ini disesuaikan dengan perubahan perolehan kursi DPRD Kabupaten Demak periode 2004 dan 2009. Berikut daftar partai berdasar criteria tersebut.

⁴² *Purposive Sampling*, <http://www.answers.com/topic/purposive-sampling>

⁴³ *Nonprobability Sampling Strategies: Purposive Sampling*, http://www.wadsworth.com/psychology_d/templates/student_resources/workshops/res_method/sampling/sampling_29.html

⁴⁴ *Purposive sampling*, http://changingminds.org/explanations/research/sampling/purposive_sampling.htm

Daftar Partai Yang Memperoleh Kursi DPRD Kabupaten Demak

Pada Pemilu 2004 dan 2009

	No ParPol	Partai Politik
1	8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
2	9	Partai Amanat Nasional (PAN)
3	13	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
4	23	Partai Golongan Karya (Partai Golkar)
5	24	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
6	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
7	29	Partai Bintang Reformasi (PBR)
8	31	Partai Demokrat

Daftar Partai Yang Baru Memperoleh Kursi DPRD Kabupaten Demak

Pada Pemilu 2009

	No ParPol	Partai Politik
1	1	Partai Hanura
2	2	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
3	5	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
4	16	Partai Demokrasi Pembaruan
5	34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama

Berdasarkan pengkriteriaan partai sebagaimana di atas, maka peneliti menentukan 4 partai dari kriteria partai tersebut, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, dan Partai Gerakan Indonesia Raya. PDIPd, PKB, dan Partai Demokrat merupakan sampel dari partai-partai yang sudah memperoleh kursi DPRD Kabupaten Demak pada Pemilu 2004. Sedangkan Partai Gerindra merupakan sampel dari partai-partai yang baru, untuk pertama kalinya, memperoleh kursi DPRD Kabupaten Demak pada Pemilu 2009. Pemilihan PDIP sebagai sampel dikarenakan perolehan suara PDIP yang mengalami pengurangan 100% kursi pada Pemilu 2009, dari 16 kursi pada 2004 menjadi 8 kursi

pada 2009. Pemilihan PKB sebagai sampel karena PKB mengalami kenaikan 1 kursi pada Pemilu 2009. Pemilihan Partai Demokrat dikarenakan mengalami kenaikan suara 100%. Pemilihan Partai Gerindra sebagai sampel dikarenakan perolehan suara Partai Gerindra yang cukup memuaskan sebagai partai baru, yakni memperoleh 3 kursi di DPRD Kabupaten Demak. Selanjutnya, karena PDIP, PKB, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra yang menjadi sampling berada pada lokasi penelitian Kabupaten Demak, maka direpresentasikan oleh DPC PDIP, DPC PKB, DPC Partai Demokrat, dan DPD Partai Gerindra Kabupaten Demak.

Dari keempat sampel tersebut, tidak dimungkinkan mewawancarai seluruh individu yang ada dalam keempat partai. Atas kondisi tersebut, maka selanjutnya DPC PDIP, DPC PKB, DPC Partai Demokrat, dan Partai Gerindra menjadi populasi baru yang akan ditentukan sampelnya.

Peneliti mengidentifikasi Partai-partai, terkait pemilu, sebagai sebuah lembaga dengan tiga elemen aktor di masing-masing partai. Partai meliputi pengurus harian, pengurus Badan Pemenangan Pemilu, serta Calon Anggota Legislatif.

Berdasar pada ketiga elemen yang ada di masing-masing partai, maka peneliti menentukan informan berdasarkan metode purposive sampling. Di samping itu, peneliti dalam melakukan pemilihan informan juga menggunakan metode Snowball sampling. Ketika mewawancarai informan dari sebuah group, peneliti dapat meminta kepada informan tersebut untuk merekomendasikan individu lain yang dapat memberikan informasi lebih. Biasanya, informan akan merekomendasikan individu yang pendapatnya sejalan dengan pendapatnya. Namun, peneliti boleh meminta agar merekomendasikan individu-individu yang memiliki pandangan sejalan maupun

berlawanan.⁴⁵ Penggunaan kedua metode, purposive sampling dan snowball sampling, diterapkan dengan pilihan sebagai berikut.

a) Pengurus Harian

Sampel: Ketua DPC, Sekretaris DPC, dan informan-informan lain yang mereka rekomendasikan.

b) Pengurus Badan Pemenangan Pemilu

Sampel: Ketua BPP, Sekretaris BPP, dan informan-informan lain yang mereka rekomendasikan.

c) Calon Anggota Legislatif

Sampel: 2 calon anggota legislative yang berhasil memperoleh kursi DPRD, dan 2 calon anggota legislative yang tidak berhasil memperoleh kursi DPRD, dan informan-informan lain yang mereka rekomendasikan.

d) Informan-informan dapat berkembang sesuai rekomendasi dari informan sebelumnya.

3.8. Teknik Pengumpulan Data

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengutip dan meneliti dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip, dan kumpulan peraturan-

⁴⁵ Sampling, <http://www.uiah.fi/projects/metodi/152.htm>

peraturan yang tersedia dalam rangka menunjang pelaksanaan penelitian. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut:

- Pengumpulan dokumen-dokumen, catatan-catatan, ataupun arsip-arsip partai dilakukan dengan meminta kepada pihak Partai di tingkat Kabupaten Demak. Data-data ini antara lain adalah AD ART Partai, dokumen-dokumen rapat pemenangan pemilu, dan lain sebagainya.
- Pengumpulan rekapitulasi perolehan suara dan perolehan kursi Partai untuk DPRD Kabupaten Demak, dilakukan dengan meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab Demak.
- Pengumpulan artikel maupun pemberitaan-pemberitaan terkait kegiatan Partai di Kabupaten Demak, dilakukan dengan mengutip pemberitaan-pemberitaan di media elektronik maupun cetak.

5. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung obyek penelitian. Di dalam kajian ini, observasi dilakukan dengan mengamati beberapa hal, yakni:

- Mengamati keberadaan lembaga DPC Partai di Kabupaten Demak seputar strategi perolehan suara di Kabupaten Demak.

6. Wawancara

Wawancara adalah suatu pengumpulan data secara sistemik dan berdasarkan kepada tujuan penelitian, dengan pembicaraan atau Tanya jawab antara peneliti dan informan atau para sumber secara langsung.⁴⁶

Wawancara ini akan dilakukan sebagai berikut:

- Melakukan wawancara kepada Ketua dan Sekretaris DPC, terkait peran lembaga tersebut dalam strategi perolehan suara.
- Melakukan wawancara kepada Ketua dan Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu DPC Partai.
- Melakukan wawancara kepada calon anggota legislative DPRD Kab Demak dari keempat partai, terkait dengan kampanye yang mereka lakukan. Calon anggota DPRD yang akan diwawancarai meliputi calon yang memperoleh kursi pada Pemilu 2009 kemarin dan calon yang gagal memperoleh kursi.
- Melakukan wawancara kepada pemilih, yang merupakan obyek dari strategi partai dalam perolehan suara, terkait dengan perilaku kampanye partai.

6.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di sebuah wilayah yang merupakan bagian dari struktur kewilayahan dalam perpolitikan di Indonesia. Struktur kepartaian juga

⁴⁶ Sutrisno Hadi, 1986, Metodologi Penelitian, hal.178

terbentuk pada tingkat kewilayahan ini. Rekrutmen anggota legislative sebagai salah satu fungsi Pemilihan Umum, juga dilakukan pada tingkat kewilayahan ini, yakni pemilihan umum untuk mengisi anggota DPRD. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Demak, yang masuk dalam Provinsi Jawa Tengah.

Penentuan Kabupaten Demak sebagai lokasi penelitian kajian ini, disebabkan beberapa hal:

Pertama, Pemilu 1999 dan 2004 di Kabupaten Demak dimenangkan oleh PDIP. Namun pada Pemilu 2009, PDIP mengalami penurunan perolehan kursi sebesar 100%. Pada Pemilu 2004, PDIP berhasil memperoleh 16 kursi. Sedangkan pada Pemilu 2009, turun menjadi hanya 8 kursi di DPRD Kabupaten Demak.

Kedua, terdapat 4 partai baru yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Demak. Pemilu 2009 merupakan Pemilu pertama bagi keempat partai tersebut. Keempat partai tersebut adalah Partai Gerindra, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Pembaruan, dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama.

Ketiga, pada pemilu 2009 kemarin tidak terdapat calon anggota DPRD Kab Demak, yang berhasil mendapatkan kursi dengan perolehan suara memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Seperti yang diketahui, semangat system pemilu 2009 adalah mengajak pemilih untuk melihat calon legislative, di samping juga partainya. Hal ini berbeda dengan system pemilu orde baru, pemilu 1999, maupun pemilu 2004.

6.5. Teknik Analisa Data

Analisa yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan untuk memahami data-data yang diperoleh dalam rangka menarik suatu pernyataan yang mendukung dari pemahaman atas keadaan sebenarnya, kemudian dilakukan pembahasan dan penyimpulan atas data hasil penelitian yang ditemukan. Hasil wawancara, hasil observasi, hasil dokumentasi, serta hasil pengutipan pemberitaan media, kemudian dibahas secara komprehensif.

Langkah-langkah dalam menganalisa data sebagai berikut:

Pertama, menganalisa dan memahami data-data berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip, maupun catatan-catatan yang diperoleh dari DPC Partai di Kabupaten Demak, dari KPU Kabupaten Demak, serta dari berbagai sumber media. Dari proses tersebut, kemudian dapat diketahui makna dan maksud dari data-data tersebut.

Kedua, menganalisa dan memahami data-data hasil observasi terkait kegiatan DPC Partai di Kabupaten Demak dalam rangka mengimplementasikan system pemilu 2009 dan memperoleh suara pemilih. Dari proses tersebut, kemudian dapat diketahui makna dan maksud dari data-data tersebut.

Ketiga, menganalisa dan memahami hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pengurus DPC Partai di Kabupaten Demak, calon anggota DPRD dari partai tersebut, serta masyarakat pemilih. Dari proses tersebut, kemudian dapat diketahui makna dan maksud dari jawaban para informan tersebut.

Keempat, menggabungkan berbagai analisa dan pemahaman yang telah diperoleh tersebut, sehingga dapat diketahui kesimpulan serangkaian peran Partai dalam memperoleh suara yang berdasar pada system pemilihan umum yang baru.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.4. Kabupaten Demak

Kabupaten Demak berada di wilayah Propinsi Jawa Tengah bagian utara dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan kota Semarang sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Tengah sehingga sangat potensial sebagai daerah penyangga roda perekonomian Jawa Tengah di samping itu dari sisi perhubungan darat berada pada lalu lintas yang cukup ramai yaitu jalur Pantai Utara Jawa.

Kabupaten Demak terletak di antara 6043' 26" – 70 09' 43" LS, dan 1100 48' 47" BT. Dengan batas-batas wilayah :

Sebelah utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa

Sebelah timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan

Sebelah selatan : Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang

Sebelah barat : Kota Semarang

4.4.1. Pemerintahan

Kabupaten Demak terbagi dalam 14 Kecamatan 243 desa dan 6 kelurahan. Keempat belas Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Kecamatan Demak
- 2) Kecamatan Wonosalam
- 3) Kecamatan Dempet

- 4) Kecamatan Kebonagung
- 5) Kecamatan Mijen
- 6) Kecamatan Gajah
- 7) Kecamatan Karanganyar
- 8) Kecamatan Karangtengah
- 9) Kecamatan Guntur
- 10) Kecamatan Sayung
- 11) Kecamatan Bonang
- 12) Kecamatan Wedung
- 13) Kecamatan Mranggen
- 14) Kecamatan Karangawen

4.4.2. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Demak berdasarkan hasil registrasi tahun 2008 adalah sebanyak 1.073.187. Terdiri atas 531.606 (49,54%) laki-laki dan 541.581 (50,46%) perempuan. Jumlah penduduk ini naik sebanyak : 30.076 orang atau sekitar 2,88% dari tahun sebelumnya. Dilihat dari kepadatan penduduk pada tahun 2007 kepadatan penduduk kabupaten Demak mencapai 1.176 orang/km².

Adapun jumlah penduduk tersebut dirinci menurut lapangan usaha :

1. Pertanian : 219.635
2. Industri : 119.156
3. Perdagangan : 107.752
4. Transportasi : 24.558
5. Jasa : 54.137

Selanjutnya tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan.

Adapun yang dimaksud dengan penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Penduduk usia kerja ini dibedakan sebagai angkatan kerja yang terdiri dari bekerja dan mencari pekerjaan.

Penduduk Kabupaten Demak usia 15 tahun ke atas yang bekerja pada tahun 2008 sebanyak 525.238 orang yang terdiri atas laki-laki 309.071 dan perempuan 216.167.

4.4.3. Pendidikan

Pendidikan sangat diperlukan oleh setiap penduduk, bahkan setiap penduduk berhak untuk dapat mengenyam pendidikan khususnya usia sekolah dasar (7 – 12 tahun). Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan seperti sekolah dan tenaga pendidikan (guru) yang memadai. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan pada tahun 2008 diketahui ada 571 (lima ratus tujuh puluh satu) Sekolah Dasar (SD), 63 (enam puluh tiga) SMP, 45 (empat puluh lima) SMA dan SMK baik negeri maupun swasta serta 1 (satu) Perguruan Tinggi. Sedangkan jumlah guru SD sebanyak 5.536 orang, SMP sebanyak 1.620 orang, SMA dan SMK sebanyak 1.316 orang serta 70 orang tenaga pengajar di tingkat Perguruan Tinggi. Dari jumlah guru dan siswa tersebut di atas dapat dihitung Rasio murid terhadap guru untuk SD 25%, untuk SMP 15,5% dan SMA 39%.

Di bidang Pendidikan Keagamaan, jumlah Madrasah Negeri maupun Swasta adalah sebagai berikut, untuk tingkat MI (Madrasah Ibtidaiyah) berjumlah 108 lembaga, tingkat MTs (Madrasah Tsanawiyah) berjumlah 106 lembaga dan tingkat MA (Madrasah Aliyah) berjumlah 47 lembaga. Adapun jumlah siswa MI sebanyak 21.764 siswa, siswa MTs sebanyak 33.648 siswa, dan siswa MA sebanyak 11.011 siswa.

4.4.4. Agama

Kehidupan beragama yang harmonis sangat didambakan masyarakat. Beragamnya tempat peribadatan merupakan salah satu bukti kerukunan agama diantara umat. Banyaknya tempat peribadatan di Kabupaten Demak tahun 2008 mencapai 4.493 buah, berupa masjid/ musholla sebanyak 4.463 buah, gereja sebanyak 26 buah, maupun kelenteng sebanyak 1 buah.

Dalam pembangunan bidang keagamaan, di kabupaten Demak didukung pula dengan adanya 180 buah Pondok Pesantren dengan jumlah santri tercatat sebanyak 34.100 orang.

Dilihat dari banyaknya pemeluk agama, penduduk Kabupaten Demak mayoritas beragama Islam yaitu mencapai 98,82 persen dari total penduduk, sisanya terbagi penduduk beragama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.⁴⁷

⁴⁷ Bappeda Kabupaten Demak

4.5. Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Demak 2004

4.5.1. Daerah Pemilihan

Kabupaten Demak terbagi menjadi 5 Daerah Pemilihan:

- Daerah Pemilihan Demak 1 meliputi:
 - 1) Kecamatan Demak
 - 2) Kecamatan Wonosalam
 - 3) Kecamatan Dempet
 - 4) Kecamatan Kebonagung
- Daerah Pemilihan Demak 2 meliputi:
 - 1) Kecamatan Mijen
 - 2) Kecamatan Karanganyar
 - 3) Kecamatan Gajah
- Daerah Pemilihan Demak 3 meliputi:
 - 1) Kecamatan Guntur
 - 2) Kecamatan Sayung
 - 3) Kecamatan Karangtengah
- Daerah Pemilihan Demak 4 meliputi:
 - 1) Kecamatan Wedung
 - 2) Kecamatan Bonang
- Daerah Pemilihan Demak 5 meliputi:
 - 1) Kecamatan Mranggen
 - 2) Kecamatan Karangawen

4.5.2. Daftar Pemilih Tetap

Jumlah penduduk yang memiliki hak suara dalam Pemilu 2004 adalah sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 4.2.2

DAFTAR JUMLAH PEMILIH TETAP

PEMILU LEGISLATIF KABUPATEN DEMAK TAHUN 2004

No	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	DEMAK	34.657	35.964
2	WONOSALAM	22.843	22.954
3	DEMPET	17.731	18.016
4	KEBONAGUNG	12.759	13.183
5	GAJAH	15.393	15.755
6	KARANGANYAR	18.668	18.999
7	MIJEN	22.444	23.340
8	SAYUNG	22.753	23.066
9	KARANGTENGAH	18.483	18.954
10	GUNTUR	29.428	30.232
11	BONANG	30.376	30.613
12	WEDUNG	25.898	26.175
13	MRANGGEN	45.261	46.796
14	KARANGAWEN	26.134	27.141
	JUMLAH	342.828	351.188

Sumber: KPUD Kabupaten Demak Tahun 2004

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan jumlah pemilih perempuan lebih banyak daripada jumlah pemilih laki-laki. Di setiap kecamatan juga demikian. Jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari jumlah

pemilih laki-laki. Kecamatan paling banyak jumlah pemilihnya adalah kecamatan Mranggen. Sedangkan Kecamatan paling kecil jumlah pemilihnya adalah kecamatan Kebonagung. Selisih jumlah pemilih antara kecamatan Mranggen dengan Kecamatan Kebonagung terbilang cukup tinggi, sekitar empat kali lipat jumlah pemilih.

4.5.3. Partai Peserta Pemilu DPRD Kabupaten Demak Tahun 2004

Pemilu DPRD Kabupaten Demak Tahun 2004 diikuti oleh 24 Partai, yakni:

- 1) Partai Nasional Indonesia Marheanisme
- 2) Partai Buruh Sosial Demokrat
- 3) Partai Bulan Bintang
- 4) Partai Merdeka
- 5) Partai Persatuan Pembangunan
- 6) Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
- 7) Partai Perhimpunan Indonesia Baru
- 8) Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
- 9) Partai Demokrat
- 10) Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia
- 11) Partai Penegak Demokrasi Indonesia
- 12) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
- 13) Partai Amanah Nasional
- 14) Partai Karya Peduli Bangsa
- 15) Partai Kebangkitan Bangsa
- 16) Partai Keadilan Sejahtera
- 17) Partai Bintang Reformasi
- 18) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- 19) Partai Damai Sejahtera
- 20) Partai Golkar
- 21) Partai Patriot Pancasila
- 22) Partai Sarikat Indonesia
- 23) Partai Persatuan Daerah
- 24) Partai Pelopor

4.2.4. Perolehan Suara Partai Pada Pemilu DPRD Kabupaten Demak Tahun 2004

**Tabel 4.2.4
DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004**

No	PARTAI	DAERAH PEMILIHAN					JMLH
		1	2	3	4	5	
1	PNI MARHEINISME	334	254	131	263	130	1.112
2	P B S D	301	-	-	-	-	301
3	P B B	1.393	1.118	962	238	3.663	7.374
4	PARTAI MERDEKA	493	429	575	1.501	399	3.397
5	P P P	17.848	12.986	18.248	24.651	8.913	82.646
6	P P D K	2.724	175	124	101	203	3.327
7	PARTAI P I B	406	-	212	63	-	681
8	P N B K	514	-	201	484	-	1.199
9	PARTAI DEMOKRAT	9.297	3.974	7.573	2.579	8.046	31.469
10	PKP INDONESIA	615	89	148	65	1.801	2.718
11	P P D I	1.243	601	694	466	532	3.536
12	PARTAI P N U I	823	348	252	1.328	731	3.482
13	P A N	4.718	1.571	2.308	1.532	3.016	13.145
14	P K P B	828	1.324	2.383	844	1.907	7.286
15	P K B	24.694	13.379	21.162	22.440	27.314	108.989
16	P K S	4.455	4.204	4.670	2.475	9.155	24.959
17	P B R	2.636	547	1.074	4.339	1.508	10.104
18	PDI PERJUANGAN	47.332	37.075	44.228	17.346	31.095	177.076
19	P D S	-	-	827	-	-	827
20	PARTAI GOLKAR	15.974	6.875	8.551	3.106	13.701	48.207
21	P.PATRIOT PANCASILA	222	125	648	181	307	1.483
22	PARTAI SARIKAT IND	623	229	430	183	305	1.770
23	P P D	190	466	-	1.171	295	2.122
24	PARTAI PELOPOR	1.117	947	1.149	251	257	3.721
	JUMLAH	138.780	86.716	116.550	85.607	113.278	540.931

Sumber: KPU Kabupaten Demak Tahun 2004

PDI Perjuangan mendominasi perolehan suara di semua Daerah Pemilihan, kecuali Daerah Pemilihan Demak 4 yang dikuasai oleh PPP. Namun selisih antara PDI Perjuangan dan PPP di Dapel Demak 4 tidak terlalu jauh. Di Dapel 1 dan 3, PDI Perjuangan berhasil mengungguli jauh di atas partai lain. Perolehan suara PDI Perjuangan terkecil berada di Dapel 4.

Perolehan suara PKB cenderung merata di Dapel 1, 3, 4, dan 5. Meskipun tidak paling unggul, namun PKB mampu memperoleh suara yang cukup signifikan. Sementara itu, di Dapel 2 PKB memperoleh suara yang relative kecil bila dibandingkan dengan perolehan suara PKB di Dapel lain.

Partai Demokrat tidak memperoleh suara yang cukup. Namun, di Dapel 1, 3, dan 5 Partai Demokrat mampu memperoleh suara cukup untuk mendapatkan 1 kursi. Sedangkan di Dapel 2 dan 4, perolehan suara Partai Demokrat sangat kecil. Hal ini mungkin disebabkan Partai Demokrat sebagai Partai baru, belum cukup dikenal oleh masyarakat.

4.2.5. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Demak Tahun 2004

Partai-partai yang berhasil memperoleh kursi DPRD Kabupaten Demak pada Pemilu 2004 adalah sebanyak 8 partai politik, yakni:

- 1) Partai Persatuan Pembangunan, sebanyak 9 kursi
- 2) Partai Demokrat, sebanyak 3 kursi
- 3) Partai Amanat Nasional, sebanyak 1 kursi
- 4) Partai Kebangkitan Bangsa, sebanyak 9 kursi
- 5) Partai Keadilan Sejahtera, sebanyak 2 kursi
- 6) Partai Bintang Reformasi, sebanyak 1 kursi
- 7) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebanyak 16 kursi
- 8) Partai Golkar, sebanyak 4 kursi

Tabel 4.2.5
DAFTAR PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2004

No	PARPOL	DAERAH PEMILIHAN					JUMLAH
		1	2	3	4	5	
1	PNI MARHEINISME						
2	P B S D						
3	P B B						
4	PARTAI MERDEKA						
5	P P P	2	1	2	3	1	9
6	P P D K						
7	PARTAI P I B						
8	P N B K						
9	PARTAI DEMOKRAT	1		1		1	3
10	PKP INDONESIA						
11	P P D I						
12	PARTAI P N U I						
13	P A N	1					1
14	P K P B						
15	P K B	2	1	2	2	2	9
16	P K S		1			1	2
17	P B R				1		1
18	PDI PERJUANGAN	4	3	4	2	3	16
19	P D S						
20	PARTAI GOLKAR	1	1	1		1	4
21	PARTAI PATRIOT PANCASILA						
22	PARTAI SARIKAT IND						
23	P P D						
24	PARTAI PELOPOR						
	JUMLAH	11	7	10	8	9	45

Sumber: KPUK Kabupaten Demak Tahun 2004

Di Dapel 1 dan 3, PDI Perjuangan berhasil memperoleh masing-masing 4 kursi. Perolehan yang besar bila melihat bahwa Dapel 1 tersedia 11 kursi dan Dapel 3 tersedia 10 kursi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Dapel 1 dan 3 merupakan basis PDI Perjuangan. Sementara itu, PKB memperoleh masing-masing 2 kursi di Dapel 1, 3, 4, dan 5. PKB hanya memperoleh 1 kursi di Dapel 2. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap PKB tidak sangat besar, namun cukup dan merata di semua Dapel. Perolehan kursi kecil oleh Partai Demokrat dapat diartikan bahwa partai tersebut tidak memiliki basis yang kuat pada Pemilu 2004.

4.2.6. Nama dan Nomor Urut Calon Anggota DPRD Kabupaten Demak terpilih

Dibawah ini merupakan daftar nama calon di tiap Daerah Pemilihan, yang berhasil memperoleh kursi DPRD Kabupaten Demak Tahun 2004, asal Partai, nomor urut Calon tersebut, serta pencapaian Bilangan Pembagi Pemilih pada Pemilu Tahun 2004.

Tabel 4.2.6.1
DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004
Daerah Pemilihan: DEMAK I

N O	PARTOL	MENCA PAI BPP	NO URUT	NAMA CALON TERPILIH	
				TIDAK MENCAPAI BPP	NO URUT
1	PPP			H. ALI MAS'ADI, SH	1
2	PPP			MAGFURI	2
3	P.DEMOKRAT			H AHMAD HUSAINI,BA	1
4	PAN			AWAL TS BUDI HARSONO, SH	1
5	PKB			FATONI, SH	1
6	PKB			Hj. NUR SA' ADAH, S.Pd	2
7	PDI P			MOCHAMAD GHOFAR	1
8	PDI P			SWASTI ASWAGATI, S.Psi	2
9	PDI P			ESTINI DYAH ERAWATI	3
10	PDI P			Drs. SUHADAK	4
11	P GOLKAR			BUDHI ACHMADI, B.Sc	1

Sumber: KPU Kabupaten Demak Tahun 2004

Tabel 4.2.6.2
DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004
Daerah Pemilihan: DEMAK II

N O	PARTOL	MENCA PAI BPP	NO URUT	NAMA CALON TERPILIH	
				TIDAK MENCAPAI BPP	NO URUT
1	PPP			H. SUHARMIN	1
2	PKB			GHOZALI	1
3	PKS			Dr. SUGENG RAHARJO	1
4	PDI P			Dra. SUNTARITA	2
5	PDI P			PURNOMO, SH	3
6	PDI P			SUDARNO	4
7	P GOLKAR			H.M. A. SURADI	1

Sumber: KPU Kabupaten Demak Tahun 2004

Tabel 4.2.6.3
DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004
Daerah Pemilihan: DEMAK III

NO	PARTOL	MENCA PAI BPP	NO URUT	NAMA CALON TERPILIH	
				TIDAK MENCAPAI BPP	NO URUT
1	PPP			H.M. MUHTAROM S, SH	1
2	PPP			A. RIFAI	2
3	P.DEMOKRAT			MUH. ZAEDI	1
4	PKB			MASKURI, S.Ag	1
5	PKB			Drs. SUMARDI	2
6	PDI P			SUKO PRATOMO	1
7	PDI P			MUGIYONO	2
8	PDI P			ARIF SENO WIBOWO	3
9	PDI P			H. RAHMADI, BA	4
10	P GOLKAR			H.M. MUDJIYONO	1

Sumber: KPU Kabupaten Demak Tahun 2004

Tabel 4.2.6.4
DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004
Daerah Pemilihan: DEMAK IV

NO	PARTOL	MENCA PAI BPP	NO URUT	NAMA CALON TERPILIH	
				TIDAK MENCAPAI BPP	NO URUT
1	PPP			Drs. H. SAEKUL HADI	1
2	PPP			NUR HAMID MASYADI, BA	2
3	PPP			Drs. AHMAD SA'ID	3
4	PKB			KH. MASYKURI ABDULLAH, S.Ag	1
5	PKB			K. MUSYAFFA RUSLAN	2
6	PBR			FATKHAN, SH	1
7	PDI P			SONHAJI	1
8	PDI P			SUYUDI	2

Sumber: KPU Kabupaten Demak Tahun 2004

Tabel 4.2.6.5
DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004
Daerah Pemilihan: DEMAK V

NO	PARTOL	MENCA PAI BPP	NO URUT	NAMA CALON TERPILIH	
				TIDAK MENCAPAI BPP	NO URUT
1	PPP			ABDURROCHIM	1
2	P.DEMOKRAT			MASHUDI	1
3	PKB			Drs. MUSHONEF YAHYA	1
4	PKB			MUCHLASIN, BA	2
5	PKS			ABDUL MANAN, S.Ag	1
6	PDI P			MUZAERI, A.Md	1
7	PDI P			S.FAGRUDIN BISRI SLAMET	2
8	PDI P			WIGNYO PRANOTO	3
9	P GOLKAR			Drs. SUBANDI	1

Sumber: KPU Kabupaten Demak Tahun 2004

Secara keseluruhan, dari 45 calon legislative yang berhasil memperoleh kursi DPRD Kabupaten Demak, tidak terdapat Caleg yang berhasil memperoleh suara satu BPP..

4.3. Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Demak 2009

4.5.5. Daerah Pemilihan

Kabupaten Demak terbagi menjadi 5 Daerah Pemilihan:

- Daerah Pemilihan Demak 1 meliputi:
 - 1) Kecamatan Demak
 - 2) Kecamatan Wonosalam
 - 3) Kecamatan Dempet
 - 4) Kecamatan Kebonagung
- Daerah Pemilihan Demak 2 meliputi:
 - 1) Kecamatan Mijen
 - 2) Kecamatan Karanganyar
 - 3) Kecamatan Gajah
- Daerah Pemilihan Demak 3 meliputi:
 - 1) Kecamatan Guntur
 - 2) Kecamatan Sayung
 - 3) Kecamatan Karangtengah
- Daerah Pemilihan Demak 4 meliputi:
 - 1) Kecamatan Wedung
 - 2) Kecamatan Bonang
- Daerah Pemilihan Demak 5 meliputi:
 - 1) Kecamatan Mranggen
 - 2) Kecamatan Karangawen

4.5.6. Daftar Pemilih Tetap

Jumlah penduduk yang memiliki hak suara dalam Pemilu 2004 adalah sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 4.3.2
DAFTAR JUMLAH PEMILIH TETAP
PEMILU LEGISLATIF KABUPATEN DEMAK TAHUN 2009

No	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	DEMAK	37.884	39.400	77.284
2	WONOSALAM	26.386	26.367	52.753
3	DEMPET	20.384	21.132	41.516
4	KEBONAGUNG	14.257	14.901	29.158
5	MIJEN	20.869	20.866	41.735
6	GAJAH	17.874	17.633	35.507
7	KARANGANYAR	26.122	26.585	52.707
8	KARANGTENGAH	21.863	22.327	44.190
9	GUNTUR	26.780	27.262	54.042
10	SAYUNG	32.760	33.510	66.270
11	BONANG	35.033	34.950	69.983
12	WEDUNG	30.378	29.762	60.140
13	MRANGGEN	49.619	51.245	100.864
14	KARANGAWEN	30.086	31.011	61.097
	JUMLAH	390.295	396.951	787.246

Sumber: KPUD Kabupaten Demak Tahun 2009

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan jumlah pemilih perempuan tetap lebih banyak daripada jumlah pemilih laki-laki, sebagaimana pada Pemilu 2004. Namun di setiap kecamatan berbeda-beda. Di kecamatan Wonosalam, Mijen, Gajah, Bonang, jumlah pemilih laki-laki lebih besar. Jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari jumlah pemilih laki-laki. Kecamatan paling banyak jumlah pemilihnya masih tetap kecamatan Mranggen. Sedangkan Kecamatan paling kecil jumlah pemilihnya juga masih tetap kecamatan Kebonagung.

Selisih jumlah pemilih antara kecamatan Mranggen dengan Kecamatan Kebonagung masih terbilang cukup tinggi, sekitar tiga hingga empat kali lipat jumlah pemilih.

4.5.7. Partai Peserta Pemilu DPRD Kabupaten Demak Tahun 2009

Pemilu DPRD Kabupaten Demak Tahun 2009 diikuti oleh 37 Partai, yakni:

- 1) Partai Hanura
- 2) Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
- 3) Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia
- 4) Partai Peduli Rakyat Nasional
- 5) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- 6) Partai Barisan Nasional
- 7) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
- 8) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- 9) Partai Amanat Nasional (PAN)
- 10) Partai Perjuangan Indonesia Baru
- 11) Partai Kedaulatan
- 12) Partai Persatuan Daerah
- 13) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- 14) Partai Pemuda Indonesia
- 15) Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme
- 16) Partai Demokrasi Pembaruan
- 17) Partai Karya Perjuangan
- 18) Partai Matahari Bangsa
- 19) Partai Penegak Demokrasi Indonesia
- 20) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
- 21) Partai Republik Nusantara
- 22) Partai Pelopor
- 23) Partai Golongan Karya (Partai Golkar)
- 24) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- 25) Partai Damai Sejahtera
- 26) Partai Nasional Benteng Kerakyatan
- 27) Partai Bulan Bintang (PBB)
- 28) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- 29) Partai Bintang Reformasi (PBR)
- 30) Partai Patriot
- 31) Partai Demokrat
- 32) Partai Kasih Demokrasi Indonesia
- 33) Partai Indonesia Sejahtera
- 34) Partai Kebangkitan Nasional Ulama
- 35) Partai Merdeka
- 36) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
- 37) Partai Sarikat Indonesia Partai Buruh

4.5.8. Perolehan Suara Partai Pada Pemilu DPRD Kabupaten Demak Tahun 2009

Perolehan suara partai di tiap-tiap Daerah Pemilihan adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 4.3.4
DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

No	PARTOL	DAERAH PEMILIHAN					JUM LAH
		1	2	3	4	5	
1	Partai Hanura	2.570	2.021	4.250	2.108	5.357	16.306
2	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	2.446	3.354	2.257	4.498	1.353	13.908
3	Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia	0	0	0	0	0	0
4	P. Peduli Rakyat Nasional	2.691	311	456	1.915	582	5.955
5	Partai Gerindra	4.723	4.049	1.777	4.185	6.607	21.341
6	Partai Barisan Nasional	301	0	779	1.171	237	2.488
7	P. Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	508	161	520	83	1.449	2.721
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	9.029	4.793	11.518	7.059	6.748	39.147
9	Partai Amanat Nasional (PAN)	7.075	4.161	982	2.880	1.217	16.315
10	P. Perjuangan Indonesia Baru	172	0	122	0	0	294
11	Partai Kedaulatan	120	74	187	428	469	1.278
12	Partai Persatuan Daerah	86	348	0	54	253	741
13	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	17.602	11.731	26.801	18.226	26.466	100.826
14	Partai Pemuda Indonesia	1.077	0	0	289	0	1.366
15	PNI Marhaenisme	248	74	131	0	110	563
16	P. Demokrasi Pembaruan	3.510	5.995	1.990	305	7.835	19.635
17	Partai Karya Perjuangan	58	91	0	904	0	1.053

18	Partai Matahari Bangsa	53	78	27	62	45	265
19	P. Penegak Demokrasi Indonesia	0	0	0	0	0	0
20	P. Demokrasi Kebangsaan(PDK)	230	730	292	57	0	1.309
21	Partai Republik Nusantara	1.074	101	235	1.930	956	4.296
22	Partai Pelopor	119	53	1.001	27	35	1.235
23	P. Golongan Karya (Golkar)	22.710	9.663	24.483	9.003	5.269	71.128
24	PPP	12.840	5.519	5.045	9.890	6.478	39.772
25	Partai Damai Sejahtera	0	0	0	0	598	598
26	PNBK	3.182	0	26	0	0	3.208
27	Partai Bulan Bintang (PBB)	370	170	181	664	4.147	5.532
28	PDIP	15.242	13.170	17.703	6.600	17.972	70.687
29	Partai Bintang Reformasi (PBR)	981	0	283	697	232	2.193
30	Partai Patriot	0	0	0	0	342	342
31	Partai Demokrat	14.345	6.284	9.783	6.505	10.380	47.297
32	P. Kasih Demokrasi Indonesia	0	0	0	0	100	100
33	Partai Indonesia Sejahtera	214	88	0	45	0	347
34	P. Kebangkitan Nasional Ulama	1.214	2.260	1.472	963	6.744	12.653
41	Partai Merdeka	0	0	429	0	235	664
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	0	0	0	0	0	0
43	Partai Sarikat Indonesia	0	0	0	0	0	0
44	Partai Buruh	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	124.790	75.279	112.730	80.548	112.216	505.563

Sumber: KPU Kabupaten Demak Tahun 2009

Pada pemilu 2009, perolehan suara antar partai-partai besar tidak begitu jauh. Tidak terdapat partai yang unggul dengan selisih besar dari partai dengan perolehan jumlah suara dibawahnya. Untuk partai-partai baru dan partai kecil, banyak diantara

mereka yang tidak memperoleh satu suara pun di tiap-tiap Dapel. Terdapat beberapa partai seperti Partai Merdeka, Partai Patriot, dan beberapa partai lain, hanya memperoleh suara di Dapel tertentu, sedangkan di Dapel yang lain tidak memperoleh suara.

Partai-partai pendatang baru, seperti Partai Gerindra, Partai Hanura, PKNU, PKB, ternyata mampu memberi cukup perlawanan dalam perolehan suara. Hal itu terlihat dari perolehan suara mereka yang cukup untuk mendapatkan satu kursi di Dapel-dapel tertentu.

4.5.9. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Demak Tahun 2009

Partai-partai yang berhasil memperoleh kursi DPRD Kabupaten Demak pada Pemilu 2009 adalah sebanyak 12 partai politik, yakni:

- 1) Partai Hanura, sebanyak 1 kursi
- 2) Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), sebanyak 1 kursi
- 3) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), sebanyak 3 kursi
- 4) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebanyak 5 kursi
- 5) Partai Amanat Nasional (PAN), sebanyak 2 kursi
- 6) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebanyak 10 kursi
- 7) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), sebanyak 2 kursi
- 8) Partai Golkar, sebanyak 6 kursi
- 9) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebanyak 5 kursi
- 10) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebanyak 8 kursi
- 11) Partai Demokrat, sebanyak 6 kursi
- 12) Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), sebanyak 1 kursi

Berikut ini adalah tabel lengkap perolehan kursi partai-partai di tiap-tiap Daerah Pemilihan.

Tabel 4.3.5
DAFTAR PEROLEHAN KURSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

No	PARTOL	DAERAH PEMILIHAN					JUMLAH
		1	2	3	4	5	
1	Partai Hanura			1			1
2	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)				1		1
3	P. Pengusaha Dan Pekerja Indonesia						
4	Partai Peduli Rakyat Nasional						
5	Partai Gerindra	1			1	1	3
6	Partai Barisan Nasional						
7	P. Keadilan Persatuan Indonesia						
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	1	1	1	1	5
9	Partai Amanat Nasional (PAN)	1	1				2
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru						
11	Partai Kedaulatan						
12	Partai Persatuan Daerah						
13	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2	1	3	2	2	10
14	Partai Pemuda Indonesia						
15	PNI Marhaenisme						
16	Partai Demokrasi Pembaruan		1			1	2
17	Partai Karya Perjuangan						
18	Partai Matahari Bangsa						
19	P. Penegak Demokrasi Indonesia						
20	P. Demokrasi Kebangsaan (PDK)						
21	Partai Republik Nusantara						
22	Partai Pelopor						
23	Partai Golongan Karya (Golkar)	2	1	2	1		6
24	PPP	1	1	1	1	1	5
25	Partai Damai Sejahtera						
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan						
27	Partai Bulan Bintang (PBB)						
28	PDIP	2	1	2	1	2	8
29	Partai Bintang Reformasi (PBR)						
30	Partai Patriot						
31	Partai Demokrat	2	1	1	1	1	6
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia						
33	Partai Indonesia Sejahtera						
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama					1	1
41	Partai Merdeka						
42	P. Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia						
43	Partai Sarikat Indonesia						
44	Partai Buruh						
	JUMLAH	12	8	11	9	10	50

Sumber: KPUD Kabupaten Demak Tahun 2009

Pada Pemilu 2009, perolehan kursi di tiap-tiap Dapel terbilang cukup merata, yakni dengan 2 atau 1 kursi per Dapil oleh sebuah partai politik. Bahkan terdapat partai yang secara merata mendapat 1 kursi di setiap Dapel, yakni PKS dan PPP. Hanya PKB yang memperoleh 3 kursi dari sebuah Dapel. Hal ini berbeda dengan Pemilu 2004, dimana terdapat partai yang memperoleh 4 kursi di Dapel 1 dan 3.

4.5.10. Nama dan Nomor Urut Calon Anggota DPRD Kabupaten Demak Terpilih

Dibawah ini merupakan daftar nama calon di tiap Daerah Pemilihan, yang berhasil memperoleh kursi DPRD Kabupaten Demak Tahun 2009, asal Partai, nomor urut Calon tersebut, serta pencapaian Bilangan Pembagi Pemilih pada Pemilu Tahun 2009.

Tabel 4.3.6.1
DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
Daerah Pemilihan: DEMAK I

NO	PARTOL	NAMA CALON TERPILIH			
		MENCA PAI BPP	NO URUT	TIDAK MENCAPAI BPP	NO URUT
1	P GERINDRA			ALI SUBKAN, S.Ag	2
2	PKS			AHMAD MUDHOFAR, A.Md	1
3	PAN			Dra. SUSI ALIFAH	4
4	PKB			H. MUCHLASIN, SE	1
5	PKB			NURULLAH YASI, BA	3
6	P GOLKAR			H. BUDHI ACHMADI, SE	2
7	P GOLKAR			NURYONO PRASETYO, SE	8
8	PPP			ALI MAS'ADI, SH	1
9	PDI P			Hj. ESTINI DYAH ERAWATI	1
10	PDI P			PURNOMO, SH	2
11	P.DEMOKRAT			NGASPAN	2
12	P.DEMOKRAT			TATIEK SOELISTIJANI	4

Sumber: KPU Kabupaten Demak Tahun 2009

Tabel 4.3.6.2
DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
Daerah Pemilihan: DEMAK II

NO	PARTOL	MENCA PAI BPP	NAMA CALON TERPILIH		NO URUT
			NO URUT	TIDAK MENCAPAI BPP	
1	PKS			KAMZAWI, S.Ag	1
2	PAN			H. FARODLI	1
3	PKB			H. SUDONO	1
4	PDP			DANANG SAPUTRO	1
5	P GOLKAR			H. MA, SURADI	1
6	PPP			ROZIKHAN	1
7	PDI P			SUDARNO	1
8	P.DEMOKRAT			ZUMAROH, S.Pd	6

Sumber: KPU Kabupaten Demak Tahun 2009

Tabel 4.3.6.3
DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
Daerah Pemilihan: DEMAK III

	PARTOL	MENCA PAI BPP	NAMA CALON TERPILIH		NO URUT
			NO URUT	TIDAK MENCAPAI BPP	
1	P HANURA			MUH SOFWAN, ST	1
2	PKS			SAPUAN, S.P	6
3	PKB			CHURUNCHALINA SILFIYA, S.Pd.I	6
4	PKB			MASKURI, S.Ag	1
5	PKB			NURUL MUTTAQIN, SH.I	7
6	P GOLKAR			IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	3
7	P GOLKAR			SUNARI	2
8	PPP			RIFA'I, A.Ma	1
9	PDI P			MUGIYONO	1
10	PGOLKAR			EKO NURKHAYATI	3
11	P.DEMOKRAT			H. AHMAD HUSAINI, BA	2

Sumber: KPU Kabupaten Demak Tahun 2009

Tabel 4.3.6.4
DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
Daerah Pemilihan: DEMAK IV

NO	PARTOL	NAMA CALON TERPILIH			
		MENCA PAI BPP	NO URUT	TIDAK MENCAPAI BPP	NO URUT
1	PKPB			SITI MARYAMAH	2
2	P GERINDRA			AHMAD MANSUR, SE	3
3	PKS			SLAMET, S.Sos	8
4	PKB			KH. MASYKURI ABDULLAH, S.Ag	1
5	PKB			Hj. NUR SA' ADAH, S.Pd.I	2
6	P.DEMOKRAT			FATKHAN, SH	1
7	P GOLKAR			NUR WAHID	1
8	PPP			H. SABIQ	1
9	PDI P			SONHAJI	1

Sumber: KPU Kabupaten Demak Tahun 2009

Tabel 4.3.6.5
DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
Daerah Pemilihan: DEMAK V

NO	PARTOL	NAMA CALON TERPILIH			
		MENCA PAI BPP	NO URUT	TIDAK MENCAPAI BPP	NO URUT
1	P GERINDRA			DJUMBADI	1
2	PKS			AMIR DARMANTO	1
3	PKB			RIZQON MALIK FULLAESUF, S.T	1
4	PKB			PARSIDI	10
5	PDP			YUDO ASTIKO, S.Pd	1
6	PPP			H. SUHARMIN	1
7	PDI P			MUZAERI, Amd, SE	3
8	PDI P			S.FAHRUDIN BISRI SLAMET	1
9	P.DEMOKRAT			MASHUDI, SH.I	1
10	PKNU			BUSRO, S.Pd	3

Sumber: KPU Kabupaten Demak Tahun 2009

Dari kesepuluh calon di Dapil Demak 5 yang berhasil memperoleh kursi DPRD Kabupaten Demak, tidak terdapat satu pun yang berhasil memperoleh suara satu BPP.

4.6. Perubahan Peta Perolehan Kursi Partai

Pada pemilu 2004, PDI Perjuangan berhasil mendominasi dukungan di semua Daerah Pemilihan, kecuali di Daerah Pemilihan Demak 4. Di Daerah Pemilihan Demak 1 dan 3, PDI Perjuangan berhasil memperoleh 4 kursi DPRD Kabupaten Demak. Sedangkan di Daerah Pemilihan Demak 4, PDI Perjuangan kalah tipis dari PPP yang mendominasi Daerah Pemilihan ini. Pada pemilu 2009, peta perolehan kursi PDI Perjuangan berubah. PDI Perjuangan mengalami penurunan perolehan secara drastic. PDI Perjuangan hanya mampu memperoleh masing-masing 2 kursi di Daerah Pemilihan 1 dan 3, di mana pada Pemilu 2004 PDI Perjuangan mampu memperoleh masing-masing 4 kursi di Daerah Pemilihan ini.

PKB memiliki peta perolehan suara yang kurang lebih merata di setiap Daerah Pemilihan. Meskipun jumlahnya tidak signifikan, namun PKB mampu memperoleh rata-rata 2 kursi di setiap Daerah Pemilihan. Pada Pemilu 2009, PKB mengalami kenaikan 1 kursi disbanding pada Pemilu 2004. Namun, dengan 10 kursi yang diperoleh, PKB menjadi pemenang Pemilu legislative DPRD Kabupaten Demak. Perolehan kursi PKB pada Pemilu 2009 di tiap Daerah Pemilihan masih tetap seperti pada Pemilu 2004. Hanya mengalami kenaikan satu kursi di Daerah Pemilihan 3, dan menjadikan PKB memimpin perolehan kursi di Daerah Pemilihan Demak 3. Daerah Pemilihan Demak 3 pada Pemilu 2004 menyumbangkan 4 kursi DPRD Kabupaten Demak pada PDI Perjuangan.

Partai Demokrat pada Pemilu 2004 kurang begitu mendapat dukungan. Hal tersebut tercermin dari perolehan kursi, yakni 3 kursi DPRD Kabupaten Demak. Kursi Partai democrat diperoleh di Daerah Pemilihan 1, 3, dan 5. Masing-masing

satu kursi. Pada Pemilu 2009, perolehan kursi Partai Demokrat mengalami kenaikan 100%, dari 3 menjadi 6 kursi. Di Daerah Pemilihan Demak 1, Partai Demokrat berhasil menaikkan 1 kursi menjadi 2 kursi. Di Daerah Pemilihan 2 dan 4, Partai Demokrat berhasil memperoleh masing-masing 1 kursi. Pada Pemilu 2004, Partai Demokrat tidak berhasil memperoleh kursi di Daerah Pemilihan tersebut. Sementara di Daerah Pemilihan 3 dan 5, perolehan kursinya mengalami stagnasi, tetap seperti pada Pemilu 2004, yakni 1 kursi.

Sebagai pendatang baru, Partai Gerindra mampu memperoleh 3 kursi DPRD Kabupaten Demak. Seperti Partai Demokrat ketika Pemilu 2004. Perolehan kursi Partai Gerindra berasal dari Daerah Pemilihan 1, 4, dan 5. Masing-masing 1 kursi. Apa yang terjadi dengan Partai Gerindra di Pemilu 2009, terdapat kemiripan peta perolehan kursi dengan Partai Demokrat pada Pemilu 2004, yakni sama-sama memperoleh 1 kursi di Daerah Pemilihan 1 dan 5. Hal ini secara sederhana dapat diartikan bahwa Daerah Pemilihan 1 dan 5 memiliki pemilih yang terbuka terhadap partai baru.

4.7. Profil Partai Di Kabupaten Demak

4.7.1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

PDI Perjuangan merupakan partai politik yang sebenarnya adalah partai yang secara langsung memiliki tali kesejarahan dengan partai politik masa orde lama. PDI Perjuangan sebenarnya kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973. Partai Demokrasi Indonesia itu lahir dari hasil fusi 5 (lima) partai politik. Kelima partai politik tersebut yaitu :

- 1) Partai Nasional Indonesia (PNI)
- 2) Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
- 3) Partai Katolik
- 4) Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
- 5) Murba

Dengan dideklarasikannya fusi kelima partai tersebut, maka lahirlah Partai Demokrasi Indonesia. Tahun 1998 membawa angin segar bagi PDI dibawah kepemimpinan Megawati. Di tengah besarnya keinginan masyarakat untuk melakukan reformasi politik, PDI dibawah kepemimpinan Megawati kian berkibar. Pasca Lengsernya Soeharto, dukungan terhadap PDI dibawah kepemimpinan Megawati semakin kuat, sorotan kepada PDI bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.

Pada tanggal 8-10 Oktober 1998, PDI dibawah kepemimpinan Megawati menyelenggarakan Kongres V PDI yang berlangsung di Denpasar Bali. Di dalam Kongres V PDI, Megawati Soekarnoputri terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1998-2003 secara aklamasi. Didalam Kongres tersebut, Megawati diberi kewenangan khusus untuk mengambil langkah-langkah organisatoris dalam rangka eksistensi partai, NKRI dan UUD 1945, kewenangan tersebut dimasukkan di dalam AD-ART PDI. Meskipun pemerintahan sudah berganti, namun yang diakui oleh Pemerintah adalah masih tetap PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi dan Buttu Hutapea. Oleh karenanya agar dapat mengikuti Pemilu tahun 1999, Megawati mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada tanggal 1 Februari 1999 yang

disahkan oleh Notaris Rakhmat Syamsul Rizal, kemudian dideklarasikan pada tanggal 14 Februari 1999 di Istoran Senayan Jakarta.

Pemilu tahun 1999 membawa berkah bagi PDI Perjuangan, dukungan yang begitu besarnya dari masyarakat menjadikan PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu dan berhasil menempatkan wakilnya di DPR sebanyak 153 orang. Dalam perjalanannya kemudian, Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi KH Abdurahman Wahid yang terpilih didalam Sidang Paripurna MPR sebagai Presiden Republik Indonesia Ke - 4.

Kongres I PDI Perjuangan diselenggarakan pada tanggal 27 Maret - 1 April 2000 di Hotel Patra Jasa Semarang-Jawa Tengah. Menjelang Kongres I PDI Perjuangan, sudah muncul calon-calon kandidat Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, nama yang muncul antara lain Dimiyati Hartono yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, kemudian muncul pula nama Eros Jarot yang sempat menggalang DPC-DPC untuk mendukungnya. Di dalam pemandangan umum Cabang-Cabang, dari 243 DPC, hanya 2 DPC yang mengusulkan nama lain yaitu DPC Kota Jayapura dalam pemandangan umumnya mengusulkan 3 orang calon Ketua Umum yaitu Megawati, Dimiyati Hartono dan Eros Jarot, kemudian DPC Kota Banjarmasin mengusulkan Eros Jarot sebagai KetuanUmum DPP PDI Perjuangan.

Kongres I PDI Perjuangan akhirnya menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2000-2005 secara aklamasi tanpa pemilihan karena 241 dari 243 DPC mengusulkan nama Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.

Setelah Kongres I PDI Perjuangan tahun 2000, pada tahun 2001 Megawati diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Ke - 5 menggantikan KH Abdurahman Wahid yang diturunkan dalam Sidang Istimewa MPR-RI. Meski sebagai partai penguasa, PDI Perjuangan ternyata tidak mampu meraih kemenangan di dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2004. PDI Perjuangan hanya mampu memperoleh suara di urutan kedua dengan 109 kursi di DPR.

Kongres II PDI Perjuangan diselenggarakan pada tanggal 28 - 31 Maret 2005 di Hotel Grand Bali Beach, Denpasar Bali, tempat dimana Kongres V PDI diselenggarakan pada tahun 1998. Kongres ini selesai 2 hari lebih cepat dari yang dijadwalkan yaitu 28 Maret - 2 April 2005. Megawati dikukuhkan sebagai Ketua Umum terpilih karena seluruh peserta dalam pemandangan umumnya mengusulkan Megawati menjadi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2005-2010.

PDI Perjuangan di Kabupaten Demak terbilang sangat eksis. Hal tersebut tercermin dari mayoritas kursi yang diperoleh PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten 2004-2009. Di samping itu, PDI Perjuangan juga berhasil menempatkan kandidatnya sebagai Bupati Kabupaten Demak. Sehingga dapat dikatakan bahwa PDIP memiliki amunisi politik yang cukup besar pada percaturan politik di Kabupaten Demak.

Menjelang Pemilu 2009, PDI Perjuangan Kabupaten Demak mengalami permasalahan di internal DPC. Perbedaan pendapat dalam menjalankan Partai terjadi antara Ketua DPC PDI Perjuangan, yakni Dra. Hj. Endang Setyaningdyah, MM (mantan Bupati Demak), dengan Sekretaris DPC, yakni Mugiyono. Puncak perbedaan mereka terjadi ketika pengajuan daftar calon anggota legislative ke KPUD

Kabupaten Demak. Masing-masing kubu mengajukan daftar calegnya. Menurut Ketua KPUD Demak, sebenarnya kedua kubu tidak sah dalam mengajukan caleg ke KPUD. Peraturan menyatakan bahwa pengajuan Caleg harus ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris. Sementara dalam kasus pengajuan oleh PDI Perjuangan, masing-masing kubu tidak memenuhi persyaratan tersebut. Kubu Dra. Hj. Endang Setyaningdyah, MM mengajukan daftar Caleg dengan tanda tangan Ketua DPC dan Wakil Sekretaris DPC. Sedangkan kubu Mugiyono mengajukan daftar caleg dengan tanda tangan Wakil Ketua DPC dan Sekretaris DPC. Namun, karna adanya intervensi dari elit penguasa di Demak, salah satu dari mereka dapat diterima.

Pengurus Harian DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak meliputi:

- Ketua : Dra.Hj.Endang Setyaningdyah, MM
- Wakil Ketua Bid Politik & Pemenangan Pemilu : Moeh Yoes Heasy, SH
- Wakil Ketua Bid Keanggotaan, Org, Ideologi dan Kaderisasi : Edy Purwanto
- Wakil Ketua Bid Inkom, Buruh Tani dan Nelayan : Wignyo Pranoto
- Wakil Ketua Bid Pengusaha Kecil Menengah, Kop & Pemeberdayaan Perempuan : Utari dewayanti
- Wakil Ketua Bid Advokasi, hukum, HAM, Kemasyarakatan, Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa : Muzaeri, Amd.SE.
- Sekretaris : Mugiyono

- Wakil Sekretaris Bid. Internal : Dra. Hj. Suntarita
- Wakil Sekretaris Bid. Eksternal : Mashuri
- Bendahara : Sugiharno, Sp
- Wakil Bendahara Bid. Inventarisasi
dan Kekayaan Partai : Hery Setiawan

**Pengurus Badan Pemenangan Pemilu (BP Pemilu) PDI P Kabupaten Demak
adalah:**

- Ketua : Moeh Yoes Heasy, SH
- Wakil Bid. Peraturan Per Uu
Dan Petugas Pemilu : B. Setyo Utomo, SH
- Wakil Bid. Pembinaan, Penggalangan
Dan Kampanye : Nur Ali
- Wakil Bid. Pembinaan, Penggalangan,
Dan Kampanye : Siswoyo
- Sekretaris : Suparyoto
Wakil Sekretaris : Dra. Hj. Suntarita
- Biro Hukum Dan Per Uu : Fahrurrozi
- Biro Penyiapan Petugas Pemilu : Sutoyo
- Biro Penggalangan & Pembinaan : Ratmo Rajab
- Biro Penjaringan & Penyaringan : Jumali
- Biro Data Dan Informasi : A. Torib

- Biro Media Masa Dan Kampanye: B. Hartadi Nugroho
- Biro Dana,Sarana,Prasarana Kampanye : Sari Dewi Murni
- Biro Hub KPU & Panwaslu : Utari Dewayanti
- Penasihat BP Pemilu : Muzaeri, Amd, SE.

4.7.2. Partai Kebangkitan Bangsa

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon sebagai akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah dan lain sebagainya. Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut era reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa.

Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya. Di antara yang usulannya paling lengkap adalah Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa

Barat. Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap yang ditunjukkan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewedahi aspirasi politik warga NU setempat. Diantara yang sudah mendeklarasikan sebuah parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.

Kemudian terbentuklah sebuah partai yang bernama Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa, adalah sebuah partai politik Indonesia. Partai ini didirikan di Jakarta pada tanggal 29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah / 23 Juli 1998 yang dideklarasikan oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, (Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri, A. Muhith Muzadi). Partai yang berbasis

kaum NU mengajukan Gus Dur sebagai presiden pada pemilu 1999 yang kemudian menjabat dari tahun 1999 sampai pertengahan 2001. Pemilu 2004 Gus Dur Tidak lolos verifikasi KPU sebagai Calon Presiden. Pada tahun 2004, partai ini memperoleh hasil suara 10,57% (11.989.564) dan mendapatkan kursi sebanyak 52 di DPR.

Visi diantaranya (a) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945; (b) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual;

Misi: Bidang Agama: meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Bidang Politik: mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Menegakkan kedaulatan rakyat; mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan terpercaya; melaksanakan pembangunan nasional untuk kemakmuran rakyat; melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta mengembangkan kerjasama luar negeri untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera; Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis; Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial; Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa; Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia,

mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya; mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan; Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.

PKB di Kabupaten Demak terbilang sebagai partai besar. Bahkan secara nasional, Kabupaten Demak merupakan basis massa PKB yang cukup besar. Pada Pemilu 2004, PKB berhasil menjadi Partai Pemenang kedua, meskipun selisih kursinya sangat jauh dengan pemenang pertama yakni PDI Perjuangan. Pada Pemilu 2009, PDI Perjuangan mengalami penurunan perolehan kursi sebesar 100%. Sedangkan PKB berhasil naik dari 9 kursi menjadi 10 kursi. Hal tersebut membawa PKB menjadi Partai Pemenang Pemilu legislative DPRD Demak Tahun 2009. Pencapaian PKB Kabupaten Demak yang tak kalah penting adalah berhasil menempatkan kandidat bupatinya sebagai pemenang. Dan hingga saat ini, Bupati Demak adalah Bupati yang diusung oleh PKB.

Konflik internal PKB yang terjadi di DPP, ternyata juga berimbas ke DPC PKB Kabupaten Demak. Kepengurusan asli DPC dengan Ketua Muhlasin (sebelum konflik di DPP) merupakan kepengurusan yang masuk dalam kubu Gus Dur. Sementara yang disahkan oleh pemerintah adalah kepengurusan dengan Ketua

Dewan Tanfidziah Muhaimin Iskandar. Secara otomatis, kepengurusan DPC PKB Kabupaten Demak tidak mendapat legalitas dari DPP PKB.

Menjelang Pemilu 2009, kondisi ini mendapat sorotan serius dari DPP PKB. DPP PKB berencana meng-care taker-kan PKB kabupaten Demak, sehingga DPC PKB Kabupaten Demak tidak mengikuti Pemilu 2009. Besarnya massa PKB di Demak, membuat DPP PKB berfikir ulang tentang rencana tersebut. Proses komunikasi antara pihak DPP PKB dan elemen PKB di Kabupaten Demak dilaksanakan. Blok elit PKB Girikusumo menjadi harapan satu-satunya bagi DPP PKB. Setelah melalui berbagai pertimbangan, DPP PKB bersedia melegalkan DPC PKB dengan syarat posisi Ketua DPC PKB Kabupaten Demak harus di gantikan oleh elemen dari blok elit PKB Girikusumo. DPP PKB meminta Munhamir sebagai Ketua menggantikan Muhlasin.

Dengan berbagai pertimbangan dari Munhamir, rencana pergantian ketua DPC tidak dilaksanakan. Kemudian DPP PKB memberi opsi terakhir, yakni Munhamir harus jadi Sekretaris. Opsi ini disepakati oleh semua pihak. Maka diadakanlah perubahan kepengurusan DPC PKB Kabupaten Demak beberapa bulan sebelum Pemilu 2009.

Konflik tidak berhenti sampai di situ. Dalam menjalankan partai, perseteruan dua kubu masih terasa. Ketua DPC, sebagai kubu Gus Dur, berseteru dengan Sekretaris DPC, kubu Muhaimin. Akibat paling fatal dari perseteruan tersebut adalah tidak terbentuknya lembaga pemenangan pemilu (LPP) di PKB kabupaten Demak.

Profil Pengurus Dewan Pengurus Cabang PKB Kabupaten Demak:

Dewan Syuro

Ketua : KH.M. Zainal Arifin Ma'sum

Wakil Ketua : KH. Rofi'i Masyhuri

Wakil Ketua : KH. Imron

Wakil Ketua : KH. Masykuri Abdullah, S.Ag

Sekretaris : KH. M. Aminuddin

Wakil Sekretaris : KH. Agus Umar Kholil

Wakil Sekretaris : K. Muzayyin Sirmad

Wakil Sekretaris : H. Moh. Anas Malik

Wakil Sekretaris : KH. In'am Aataqy

Anggota : KH. Abu Manshur

Anggota : KH. Abdul Basyir

Anggota : KH. Jumani

Anggota : KH. Musyafa' Ruslan

Anggota : KH. Amiq Dahlan

Dewan Tanfdiz

Ketua : H. Muchlasin, SE

Wakil Ketua : Masykuri, S.Ag

Wakil Ketua : Ali Khaedar

Wakil Ketua : H. Nurulloh Yasin, BA

Wakil Ketua : Syamsul Huda, S.Sos.

Wakil Ketua : Ahmad Faozan, S.Ag., S.Pd

Wakil Ketua : Sumiyatun, S.Tp.

Wakil Ketua : Hj. Ida Nur Sa'adah, S.Pd.I.

Wakil Ketua : Rizqon Malik Fullaesuf, ST

Sekretaris : H. Munhamir

Wakil Sekretaris : A. Shiidiq Sugiarto

Wakil Sekretaris : Drs. A. Fadhil

Wakil Sekretaris : Suyono, S.PdI, MM

Wakil Sekretaris : Parsidi, ST

Bendahara : H. Fathoni,SH

Wakil Bendahara : Hj. Barokah Hafidz, S.Ag

Wakil Bendahara : Moh. Khusen

Pengurus Lembaga Pemenangan Pemilu PKB Kabupaten Demak adalah:

Konflik internal yang melanda PKB Kabupaten Demak, menyebabkan pembentukan lembaga ini tidak maksimal. Kepengurusan secara sederhana adalah sebagai berikut:

Ketua : Syamsul Huda, S.Sos

Sekretaris : A. Siddiq Sugiarto

Bendahara : Hj. Ida Nur Sa'adah, S.PdI

4.7.3. Partai Demokrat

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif saudara Susilo Bambang Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan terhormat saudara Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan Calon wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001.

Dari perolehan suara dalam pemilihan cawapres dan hasil pooling public yang menunjukkan popularitas yang ada pada diri Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut SBY), beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan bagaimana sosok SBY bisa dibawa menjadi Pemimpin Bangsa dan bukan direncanakan untuk menjadi Wakil Presiden RI tetapi menjadi Presiden RI untuk masa mendatang. Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya saudara Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi Presiden, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik. Perumusan konsep dasar dan platform partai sebagaimana yang diinginkan SBY dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutnya teknis administrasi dirampungkan oleh Tim yang dipimpin oleh saudara Vence Rumangkang. Juga terdapat diskusi-diskusi tentang perlunya berdiri sebuah partai untuk mempromosikan SBY menjadi Presiden, antara lain : Pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh SBY di apartemen Hilton. Rapat tersebut membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan secara marathon setiap hari. Tim itu terdiri dari : (1). Vence Rumangkang, (2). Drs. A. Yani Wahid (Alm), (3). Achmad Kurnia, (4). Adhiyaksa Dault, SH, (5).Baharuddin Tonti, (6). Shirato Syafei. Di lingkungan kantor Menkopolkampun

diadakan diskusi-diskusi untuk pendirian sebuah partai bagi kendaraan politik SBY dipimpin oleh Drs. A. Yani Wachid (Almarhum). Pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung pertemuan yang merupakan cikal bakal pendirian dari Partai Demokrat. Dalam pertemuan tersebut, saudara Vence Rumangkang menyatakan bahwa rencana pendirian partai akan tetap dilaksanakan dan hasilnya akan dilaporkan kepada SBY.

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2001, saudara Vence Rumangkang yang dibantu oleh saudara Drs. Sutan Bhatoegana berupaya mengumpulkan orang-orang untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai politik. Pada akhirnya, terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik yakni: (1) Vence Rumangkang; (2) Dr. Ahmad Mubarak, MA.; (3) Drs. A. Yani Wachid (almarhum); (4) Prof. Dr. Subur Budhisantoso; (5) Prof. Dr. Irzan Tanjung; (6) RMH. Heroe Syswanto Ns.; (7) Prof. Dr. RF. Saragih, SH., MH.; (8) Prof. Dardji Darmodihardjo; (9) Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas; dan (10) Prof. Dr. T Rusli Ramli, MS. Disamping nama-nama tersebut, ada juga beberapa orang yang sekali atau dua kali ikut berdiskusi. Diskusi Finalisasi konsep partai dipimpin oleh Bapak SBY.

Untuk menjadi sebuah Partai yang disahkan oleh Undang- Undang Kepartaian dibutuhkan minimal 50 (limapuluh) orang sebagai pendirinya, tetapi muncul pemikiran agar jangan hanya 50 orang saja, tetapi dilengkapi saja menjadi 99 (sembilanpuluh sembilan) orang agar ada sambungan makna dengan SBY sebagai penggagas, yakni SBY lahir tanggal 9 bulan 9. Pada tanggal 9 September 2001,

bertempat di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH., 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat. 53 (lima puluh tiga) orang selebihnya tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa kepada saudara Vence Rumangkang. Kepengurusanpun disusun dan disepakati bahwa Kriteria Calon Ketua Umum adalah Putra Indonesia asli, kelahiran Jawa dan beragama Islam, sedangkan Calon Sekretaris Jenderal adalah dari luar pulau Jawa dan beragama Kristen. Setelah diadakan penelitian, maka saudara Vence Rumangkang meminta saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum dan saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal sementara Bendahara Umum dijabat oleh saudara Vence Rumangkang.

Pada malam harinya pukul 20.30, saudara Vence Rumangkang melaporkan segala sesuatu mengenai pembentukan Partai kepada SBY di kediaman beliau yang saat itu sedang merayakan hari ulang tahun ke 52 selaku koordinator pengagas, pencetus dan Pendiri Partai Demokrat. Dalam laporannya, saudara Vence melaporkan bahwa Partai Demokrat akan didaftarkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM pada esok hari yakni pada tanggal 10 September 2001.

Pada tanggal 10 September 2001 jam 10.00 WIB Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI oleh saudara Vence Rumangkang, saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso, saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung, saudara Drs. Sutan Bhatogana MBA, saudara Prof. Dr. Rusli Ramli dan saudara Prof. Dr. RF. Saragih, SH, MH dan diterima oleh Ka SUBDIT Pendaftaran Departemen Kehakiman dan

HAM. Kemudian pada tanggal 25 September 2001 terbitlah Surat Keputusan Menkeh & HAM Nomor M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat. Dengan Surat Keputusan tersebut Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia dan pada tanggal 9 Oktober 2001 Departemen Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor : 81 Tahun 2001 Tentang Pengesahan. Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Pertama pada tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia.

Partai Demokrat di Kabupaten Demak mengalami kemajuan yang cukup bagus dan pasti. Perjalanan Partai Demokrat di Kabupaten Demak terbilang mulus. Tidak terdapat perseteruan internal yang membuat kinerja Partai terhambat. Periode pertama kepemimpinan Giyanto, Partai Demokrat berhasil memperoleh 3 kursi DPRD Kab Demak pada Pemilu 2004 (Pemilu pertama bagi Partai Demokrat). Kursi Partai Demokrat diperoleh dari Dapel 1, 3, dan 5. Perolehan yang cukup bagus untuk sebuah partai baru. keberhasilan ini mengantarkan Giyanto pada kepemimpinan periode kedua nya.

Pada pemilu 2009 (Pemilu kedua bagi Partai Demokrat), dibawah kepemimpinan Giyanto, Partai Demokrat berhasil menaikkan perolehan kursinya sebesar 100%, dari 3 kursi menjadi 6 kursi. Hal ini menunjukkan perkembangan

partai ke arah yang positif. Keenam kursi diperoleh di tiap-tiap Dapel. Khusus untuk Dapel 1, Partai Demokrat berhasil menambah 1 kursi menjadi 2 kursi. Di Dapel 2, Partai Demokrat berhasil memperoleh 1 kursi. Pada Pemilu 2004, Partai Demokrat tidak berhasil memperoleh kursi di Dapel tersebut. Di Dapel 3, Partai Demokrat tidak mengalami perkembangan perolehan kursi, yakni tetap mendapat 1 kursi. Di Dapel 4, Partai Demokrat berhasil memperoleh 1 kursi. Pada Pemilu 2004, Partai Demokrat tidak berhasil memperoleh kursi di Dapel tersebut. Di Dapel 5, Partai Demokrat juga tidak mengalami perkembangan perolehan kursi, yakni tetap mendapat 1 kursi.

Profil Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Demak:

Ketua : Giyanto
Sekretaris : H. Achmad Husaini, BA
Bendahara : Nadiroh, EP

Wakil-Wakil Ketua

1. Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) : Drs. Gihan Supeno
2. Pendidikan dan Peningkatan SDM : Achmad Fauzi
3. Ekonomi, Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian : M. Chusnul Latif
4. Pemuda dan Olahraga, Kominfo : Pursito
5. Kelautan,Perikanan,Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan : H. Muslimin, SH
6. Sosial, Kesehatan, Agama dan Aliran Kepercayaan : Ulil Absor, S.Pd.I
7. Energi dan Sumber Daya Alam,Lingkungan Hidup, : H. Ali Ikhwan,S.Pd.I

Kelestarian Alam dan Bencana Alam

8. Pemda dan Pertahanan : Drs.H.Subroto
Adiwijoyo,MM
9. Pariwisata : M. Santoso
10. Hukum,HAM,Buruh,Tani,Nelayan & Tenaga Kerja : Junaidi Alamsyah, SE
11. Pemberdayaan Perempuan : Tatiek Soelistyani

WAKIL-WAKIL SEKRETARIS

1. Wakil Sekretaris 1 : Tolkhah Sya'roni
2. Wakil Sekretaris 2 : Nur Ahmad Tamam,SE
3. Wakil Sekretaris 3 : Nakhrowi
4. Wakil Sekretaris 4 : Khafidlin
5. Wakil Sekretaris 5 : Emilia Puspita,S.Kep
6. Wakil Sekretaris 6 : Moh.Syaifudin
7. Wakil Sekretaris 7 : Eviatiwi
Kusumaningtyas, SE
8. Wakil Sekretaris 8 : Chatarina Wahyu
Sulistyowati
9. Wakil Sekeretaris 9 : Subyantoro
10. Wakil Sekretaris 10 : Bambang Hadi Wijoyo
11. Wakil Sekretaris 11 : Zakiyatul Miskiyah

WAKIL-WAKIL BENDAHARA

1. Wakil Bendahara 1 : Ali Khamdan,SH
2. Wakil Bendahara 2 : Nur Hasanah

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 3. Wakil Bendahara 3 | : Indah Setyaningsih |
| 4. Wakil Bendahara 4 | : Dr Krisdy Sebastian |
| 5. Wakil Bendahara 5 | : Siti Munzaroh |
| 6. Wakil Bendahara 6 | : Suharni |

Pengurus Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kabupaten Demak

adalah:

Ketua : Akhmad Khoeron, S.Sos

Wk. Ketua I : Kasturi

Wk. Ketua II : Ali Musyadad

Wk. Ketua III : M. Muthohar

Sekretaris : Sri Suwondo

Wk. Sekretaris I : Moh. Ghozali

Wk. Sekretaris II : Maskan

Wk. Sekretaris III : Krisna Ari Wibowo

Wk. Sekretaris IV : Munir

4.7.4. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang mendambakan Indonesia yang bangun jiwanya, dan bangun badannya. Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan

di segala bidang. Partai Gerindra merupakan partai baru pada Pemilu 2009. Partai ini menampilkan figure Prabowo Subianto sebagai calon Presiden.

Partai Gerindra di Kabupaten Demak terbentuk seiring dengan kelahiran Partai Gerindra. DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak diisi oleh orang-orang non partai lama. Beberapa nama tercatat sebagai aktivis maupun tokoh masyarakat local. Sebagai contoh adalah Ashadi, merupakan berasal dari seorang aktivis LSM yang vocal dalam mengkritik kepemimpinan Bupati Hj Endang Setyaningdyah. Kemudian Djumbadi, merupakan mantan Kepala Desa.

Perjalanan Partai Gerindra sebagai Partai baru pada Pemilu 2009 terbilang cukup bagus. Partai Gerindra berhasil memperoleh 3 kursi DPRD Kab Demak di Pemilu pertamanya. Ketiga kursi tersebut diperoleh di Dapel 1, 4, dan 5.

Pengurus Harian DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak adalah:

Ketua : Drs. Kumaidi

Wakil Ketua : Ali Subkan, S.Ag

: Siti Sholekhah, S.Ag

: Joko Sumarsono

: Eko Joko Purnomo

: Imron Rosyid

: Faizin

: Sumarmin

: Muhammad Aufaq

: Djumbadi

Sekretaris : Hamdan, S. Ag
Wakil Sekretaris : Siti Asiyah, A.Md.
: Dian Patmariyana, Sh
: Badrut Taman
Bendahara : Silhatul Ulla, Sh.I
Wakil Bendahara : Karsini, S.Th.I
: Unggul Budi Kuncoro

Pengurus Badan Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Demak Adalah:

Ketua : Drs. Kumaidi
Sekretaris : Shulukhil Hami
Bendahara : Silhatul Ulla, S.Hi
Departemen :

1. Sosial Bud & Hubungan Media : Suhud Purwanto
2. Penggalangan Massa : Ali Subhan,S.Ag
3. Advokasi & Pembelaan: Adab Basrul Usman,S.Sos.I
4. Pengamanan Suara Dan Saksi: Joko Sumarsono
5. Humas Dan Kerjasama : Djumbadi
6. Logistik : Ashadi

BAB V

MOBILISASI PEMILIH

5.1. Eksistensi Partai

5.1.1. Partai Pra Pemilu

Sistem politik Indonesia telah menempatkan Partai Politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa Partai Politik. Karena begitu pentingnya peran Partai Politik, maka sudah selayaknya jika diperlukan sebuah Partai Politik yang baik, sehat, efektif dan fungsional. Dengan kondisi Partai Politik yang sehat dan fungsional, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Dengan Partai Politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional.

Pentingnya keberadaan Partai Politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui hanya Partai Politik yang berhak mengajukan calon dalam Pemilihan Umum. Makna dari ini semua adalah, bahwa proses politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu), jangan sampai mengebiri atau bahkan menghilangkan peran dan eksistensi Partai Politik. Walaupun saat ini masyarakat mempunyai penilaian negatif terhadap Partai Politik, bukan berarti lantas menghilangkan eksistensi partai dalam sistem ketatanegaraan. Semua

yang terjadi sekarang hanyalah bagian dari proses demokrasi. Menumbuhkan Partai Politik yang sehat dan fungsional memang bukan perkara mudah. Diperlukan sebuah landasan yang kuat untuk menciptakan Partai Politik yang benar-benar berfungsi sebagai alat artikulasi masyarakat

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Partai Politik seharusnya dapat berjalan secara rutin, dan mengambil peran nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Di Indonesia, keberadaan sebuah Partai Politik sangat kurang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Partai Politik hanya hadir ketika dilaksanakan sebuah pesta demokrasi. Partai Politik memanfaatkan tahapan demokrasi untuk kepentingan pribadi partai.

Prilaku Partai Politik yang cenderung mengambil peran disaat-saat Pemilu, ternyata tidak semudah yang terbayangkan, dimana Partai Politik tinggal menyalakan mesinnya disaat yang dibutuhkan. Mesin partai merupakan elemen-elemen yang saling terkait dalam proses eksistensi sebuah Partai Politik. Menggerakkan sebuah mesin tanpa persiapan yang matang, dapat menyebabkan tidak optimalnya hasil yang hendak dicapai. Bahkan mampu menyebabkan ketidak berfungsian elemen-elemen tersebut.

Selama kurun waktu jeda Pemilu, seharusnya Partai Politik membangun elemen-elemen internal Partai Politik yang baik dan harmonis. Kondisi tersebut tidak dapat datang begitu saja. Setidaknya terdapat beberapa langkah yang bisa digunakan dalam mempersiapkan sebuah Partai Politik yang siap berjalan, meskipun hanya berjalan pada saat Pemilu. Pertama, Koordinasi yang terus terjaga antar elemen

internal Partai Politik. Kualitas dan kuantitas sebuah koordinasi dapat mempengaruhi bentuk komunikasi yang tercipta dalam partai tersebut. Kesalahan yang terkadang dilakukan oleh Partai Politik adalah melakukan koordinasi hanya sesaat menjelang even-even politik seperti Pemilu. Hal ini dapat menimbulkan ketidak siapan terhadap model komunikasi yang dipakai. Kedua, pemanfaatan mesin partai secara terus menerus. Partai Politik harus menggerakkan mesin-mesin Partai di luar even-even politik seperti Pemilu. Pelaksanaan program-program partai yang bersifat non politis, seperti bakti sosial, diskusi-diskusi, pelatihan-pelatihan dan pengkaderan, dapat membuat partai 'biasa' bergerak dan bekerja.

Bila Partai Politik mampu melaksanakan langkah-langkah tersebut, setidaknya terdapat beberapa kemanfaatan yang bisa didapat. Kemudahan koordinasi antar elemen internal Partai, yang dibutuhkan oleh Partai Politik dalam menghadapi Pemilu, dapat memberikan Partai Politik cukup tenaga untuk mempersiapkan aspek-aspek lain terkait pencapaian kemenangan pada Pemilu. Partai Politik tidak disibukkan oleh permasalahan koordinasi internal. Perlu diketahui, munculnya permasalahan dalam koordinasi dapat melumpuhkan semua program dan strategi yang telah ditetapkan oleh Partai Politik. Sehingga tujuan dari strategi tersebut akan tidak optimal, dan bahkan tidak tercapai. Manfaat lain yang akan didapat adalah kesiapan elemen-elemen internal Partai Politik ketika harus bergerak dalam Pemilu. Dapat dibayangkan ketika elemen-elemen internal Partai Politik tidak terbiasa bergerak, maka akan sulit dimanfaatkan dalam mencapai tujuan Partai Politik. Keberadaan elemen-elemen tersebut seakan hanya sekedar memenuhi alat kelengkapan Partai Politik, dan sebenarnya elemen-elemen tersebut 'tidak ada'.

5.1.1.1.Konsolidasi Internal Partai

Konsolidasi Internal Partai Politik meliputi aspek koordinasi dan berfungsinya mesin Partai sebelum dan sesaat Pemilu dilaksanakan. Kualitas dan kuantitas sebuah koordinasi dapat mempengaruhi bentuk komunikasi yang tercipta dalam partai tersebut. Kesalahan yang terkadang dilakukan oleh Partai Politik adalah melakukan koordinasi hanya sesaat menjelang even-even politik seperti Pemilu. Hal ini dapat menimbulkan ketidak siapan terhadap model komunikasi yang dipakai. Partai Politik harus menggerakkan mesin-mesin Partai di luar even-even politik seperti Pemilu. Pelaksanaan program-program partai yang bersifat non politis, seperti bakti sosial, diskusi-diskusi, pelatihan-pelatihan dan pengkaderan, dapat membuat partai 'biasa' bergerak dan bekerja. Kondisi Partai Politik pra Pemilu di kabupaten Demak tergambar dibawah ini.

PDI Perjuangan

PDI Perjuangan di Kabupaten Demak dapat dikatakan sebagai partai besar. Hal tersebut tercermin dari mayoritas kursi yang diperoleh PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten 2004-2009. Di samping itu, PDI Perjuangan juga berhasil menempatkan kandidatnya sebagai Bupati Kabupaten Demak. Sehingga dapat dikatakan bahwa PDIP memiliki amunisi politik yang cukup besar pada percaturan politik di Kabupaten Demak.

Menjelang Pemilu 2009, PDI Perjuangan Kabupaten Demak mengalami permasalahan di internal DPC. Perbedaan pendapat dalam menjalankan Partai terjadi antara Ketua DPC PDI Perjuangan, yakni Dra. Hj. Endang Setyaningdyah, MM (mantan Bupati Demak), dengan Sekretaris DPC, yakni Mugiyono.

Ketika peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dari unsur pengurus DPC PDIP Kabupaten Demak, Mugiyono, Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Demak secara tegas menjawab bahwa:

“PDIP Demak tidak mengalami perpecahan, tetap pada satu kepengurusan. Yang terjadi di PDIP Demak hanyalah perbedaan pendapat, dan hal itu dianggap biasa. Tidak mempengaruhi kinerja Partai”⁴⁸.

Hal senada juga diungkapkan oleh pengurus yang lain. Namun, hal yang berbeda peneliti temukan ketika melakukan wawancara dengan Ketua KPUD Kabupaten Demak. Beliau menceritakan efek dari perseteruan internal PDIP yang sedikit banyak berhubungan dengan KPUD.

“Masing-masing kubu mengajukan daftar calegnya. Sebenarnya kedua kubu tidak sah dalam mengajukan caleg ke KPUD. Peraturan menyatakan bahwa pengajuan Caleg harus ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris. Sementara dalam kasus pengajuan oleh PDI Perjuangan, masing-masing kubu tidak memenuhi persyaratan tersebut. Kubu Dra. Hj. Endang Setyaningdyah, MM mengajukan daftar Caleg dengan tanda tangan Ketua

⁴⁸ Mugiyono, Sekretaris DPC PDIP, 17 September 2009

DPC dan Wakil Sekretaris DPC. Sedangkan kubu Mugiyono mengajukan daftar caleg dengan tanda tangan Wakil Ketua DPC dan Sekretaris DPC. Namun, karna adanya intervensi dari elit penguasa di Demak, salah satu dari mereka dapat diterima”⁴⁹.

Alur intervensi tersebut tidak lepas dari keanggotaan KPUD Kabupaten Demak. Kepengurusan KPUD Kabupaten Demak periode 2003-2008, merupakan kepengurusan yang terbentuk di masa pemerintahan Bupati Hj. Endang Setyaningdyah, Ketua DPC PDIP Kabupaten Demak. Pada masa itu, intervensi pemerintah (Bupati) sangat besar dalam seleksi keanggotaan KPUD Kabupaten Demak. Sehingga KPUD Kabupaten Demak periode 2003-2008 cenderung mengakomodir kepentingan dari Bupati Demak⁵⁰. Tahapan pengajuan Daftar Caleg untuk Pemilu 2009, terjadi pada kepengurusan KPUD Demak periode 2003-2004. Secara otomatis, terkait sengketa pengajuan Caleg yang terjadi di DPC PDIP Demak, maka daftar Caleg yang diajukan oleh pihak Ketua DPC dan Wakil Sekretaris lah yang kemudian diakomodir.

Melihat kondisi tersebut, PDIP Kabupaten Demak dapat dikatakan mengalami permasalahan koordinasi. Perseteruan unsur pimpinan di DPC PDI Perjuangan terjadi antara Ketua dan Sekretaris. Sebagaimana kita ketahui, kedua jabatan tersebut adalah vital dalam hirarki sebuah organisasi Partai Politik. Efek terburuk adalah adanya dua komando yang berjalan berlainan. Dalam PDIP Kabupaten Demak, sengketa pengajuan Calon Anggota Legislatif kepada KPUD

⁴⁹ Ketua KPUD Demak, 12 September 2009

⁵⁰ Susilo Utomo, Pengamat Politik dan warga Kabupaten Demak

Kabupaten Demak menunjukkan adanya dua kepentingan dari dua komando yang berbeda.

Dari sisi berfungsinya mesin Partai, sebenarnya PDIP Demak memiliki mesin partai yang cukup berfungsi. Perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bibit-Rustri pada Pilgub 2008 di Kabupaten Demak, yang diusung oleh PDI Perjuangan, menunjukkan bahwa mesin partai berjalan. Terdapat alasan kenapa mesin partai PDIP dikatakan berjalan. Pertama, Bibit Waluyo sebelum diusung oleh PDI Perjuangan merupakan figure yang kurang menjual secara politik. Namun, ketika sudah ditetapkan diusung oleh PDIP, perlahan-lahan popularitasnya naik. Kedua, alasan paling nyata yakni ketika DPP PDIP menginstruksikan agar PDIP Jawa Tengah, termasuk Demak, harus bekerja secara optimal memenangkan Bibit-Rustri. Bahkan DPP siap memberikan sanksi bila Partai tidak mampu memenangkan Bibit-Rustri. Instruksi ini memberi efek nyata dalam usaha-usaha partai. Mesin partai PDIP Demak dianggap berhasil karena disebabkan oleh tekanan keras dari DPP PDIP. Tekanan tersebut menyebabkan DPC PDIP Demak bersatu dalam rangka mempertahankan eksistensi mereka di Partai. Sebagaimana diatas, kegagalan dalam memenangkan Bibit-Rustri dapat menyebabkan berakhirnya karir politik mereka di PDIP.

Buruknya koordinasi yang terjadi pada PDIP Demak, berimbas pada ketidakberfungsian mesin partai secara penuh. Mesin partai yang seharusnya dapat berfungsi, kemudian menjadi lemah karena tidak adanya koordinasi yang harmonis antar elemen-elemen DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak. Bentuk ketiadaan

koordinasi adalah adanya elemen-elemen partai di tingkat Kecamatan atau Desa yang tidak dilibatkan dalam pembahasan strategi menghadapi Pemilu 2009. Semisal pengurus PDI Perjuangan kecamatan Guntur, yang tidak dilibatkan karena dianggap sebagai kubu Mugiyono. Kejadian serupa juga ditemui pada kecamatan-kecamatan yang lain. Koordinasi terhadap mesin partai yang lain seperti organisasi sayap, juga tidak terjadi dengan baik. Elit DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak sibuk dengan tarik ulur kepentingan antar mereka sendiri. Masing-masing berebut mendapatkan legalitas dan eksistensi. Sehingga mereka tidak konsentrasi untuk melakukan koordinasi mesin partai. Secara umum dapat dikatakan bahwa PDI Perjuangan Kabupaten Demak menghadapi Pemilu legislative Tahun 2009 dalam keadaan tidak sehat. Meskipun alat kelengkapan dalam rangka memenangkan Pemilu terbentuk, seperti Badan Pemenangan Pemilu.

PKB

Konflik internal PKB yang terjadi di DPP, ternyata juga berimbas ke DPC PKB Kabupaten Demak. Kepengurusan asli DPC dengan Ketua Muhlasin (sebelum konflik di DPP) merupakan kepengurusan yang masuk dalam kubu Gus Dur. Sementara yang disahkan oleh pemerintah adalah kepengurusan dengan Ketua Dewan Tanfidziah Muhaimin Iskandar. Secara otomatis, kepengurusan DPC PKB Kabupaten Demak tidak mendapat legalitas dari DPP PKB.

Menjelang Pemilu 2009, kondisi ini mendapat sorotan serius dari DPP PKB. DPP PKB berencana meng-care taker-kan PKB kabupaten Demak, sehingga DPC PKB Kabupaten Demak tidak mengikuti Pemilu 2009. Besarnya massa PKB di Demak, membuat DPP PKB berfikir ulang tentang rencana tersebut. Proses komunikasi antara pihak DPP PKB dan elemen PKB di Kabupaten Demak dilaksanakan. Blok elit PKB Girikusumo menjadi harapan satu-satunya bagi DPP PKB. Setelah melalui berbagai pertimbangan, DPP PKB bersedia melegalkan DPC PKB dengan syarat posisi Ketua DPC PKB Kabupaten Demak harus di gantikan oleh elemen dari blok elit PKB Girikusumo. DPP PKB meminta Munhamir sebagai Ketua menggantikan Muhlasin.

Dengan berbagai pertimbangan dari Munhamir, rencana pergantian ketua DPC tidak dilaksanakan. Kemudian DPP PKB memberi opsi terakhir, yakni Munhamir harus jadi Sekretaris. Opsi ini disepakati oleh semua pihak. Maka diadakanlah perubahan kepengurusan DPC PKB Kabupaten Demak beberapa bulan sebelum Pemilu 2009⁵¹.

Konflik tidak berhenti sampai di situ. Dalam menjalankan partai, perseteruan dua kubu masih terasa. Ketua DPC, sebagai kubu Gus Dur, berseteru dengan Sekretaris DPC, kubu Muhaimin. Akibat paling fatal dari perseteruan tersebut adalah tidak terbentuknya lembaga pemenangan pemilu (LPP) di PKB kabupaten Demak.

Melihat kondisi tersebut, secara koordinasi, PKB Demak merupakan sebuah partai yang dijalankan oleh sebuah pengurus yang baru terbentuk. Pembentukan

⁵¹ Munhamir, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Demak, 15 September 2009

diawali dari sebuah konflik, dan terbentuk berdasarkan transaksional. Sehingga kepengurusan yang muncul sulit menjadi sebuah kepengurusan yang solid. Karena pada dasarnya, konflik belum selesai. Secara umum dapat dikatakan bahwa PKB Kabupaten Demak menghadapi Pemilu Legislatif 2009 dalam keadaan tidak sehat.

Partai Demokrat

Partai Demokrat di Kabupaten Demak mengalami kemajuan yang cukup bagus dan pasti. Perjalanan Partai Demokrat di Kabupaten Demak terbilang mulus. Tidak terdapat perseteruan internal yang membuat kinerja Partai terhambat. Periode pertama kepemimpinan Giyanto, Partai Demokrat berhasil memperoleh 3 kursi DPRD Kab Demak pada Pemilu 2004 (Pemilu pertama bagi Partai Demokrat). Kursi Partai Demokrat diperoleh dari Dapel 1, 3, dan 5. Perolehan yang cukup bagus untuk sebuah partai baru. keberhasilan ini mengantarkan Giyanto pada kepemimpinan periode keduanya.

Kondisi internal Partai Demokrat Kabupaten Demak berbeda dengan apa yang terjadi pada PDIP dan PKB. Di bawah kepengurusan Giyanto, kepengurusan berjalan dengan normal. Tidak terjadi konflik yang dapat mengganggu kinerja partai. Namun dari sisi berfungsinya mesin partai, Partai democrat belum menunjukkan hasil dari berfungsinya mesin partai. Belum terlihat pencapaian-pencapaian yang menandakan berfungsinya mesin partai. Perolehan suara pada Pemilu legislative 2004 belum bisa diartikan bahwa mesin partai berjalan. Perolehan tersebut lebih

disebabkan karna efek figure Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, stabilitas kepengurusan DPC Partai Demokrat dapat dimanfaatkan menutup dan memperbaiki lemahnya mesin partai. Kepengurusan Partai Demokrat di Demak pada dasarnya belum terbentuk secara penuh. Kepengurusan di tingkat Kecamatan dapat dikatakan sepenuhnya terbentuk, meskipun tidak terlihat kinerjanya. Sedangkan kepengurusan di tingkat paling bawah, yakni desa atau kelurahan, Partai Demokrat sangat minim sekali. Mayoritas di masing-masing kecamatan belum memiliki kepengurusan pasti di tingkat desa/kelurahan. Secara umum dapat dikatakan bahwa Partai Demokrat Kabupaten Demak menghadapi Pemilu legislative 2009 dalam keadaan cukup sehat dari sisi stabilitas kepengurusan.

Partai Gerindra

Partai Gerindra merupakan partai baru pada Pemilu 2009. Kepengurusan Partai Gerindra Kabupaten Demak terbentuk pada Tahun 2008. Sebagai partai baru, dengan kepengurusan dan elemen-elemen partai yang baru, maka Partai Gerindra Kabupaten Demak memiliki kepengurusan yang terlahir dari individu-individu baru yang sepakat untuk mencapai tujuan bersama. Soliditas kepengurusan dapat tercipta pada tataran ini. Dari sisi mesin partai, partai Gerindra belum benar-benar memiliki elemen-elemen partai pendukung. Secara umum dapat dikatakan bahwa Partai Gerindra Kabupaten Demak menghadapi Pemilu 2009 dalam keadaan cukup sehat sebagai sebuah partai baru. beberapa elemen pelengkap partai belum terbentuk.

Dari keempat partai tersebut dapat diketahui bahwa partai-partai peserta Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Demak tidak sepenuhnya dalam kondisi siap menghadapi Pemilu 2009. Konflik internal yang terjadi di dalam tubuh partai, serta tidak atau belum berfungsinya mesin partai, merupakan bentuk ketidak siapan partaai-partai untuk menghadapi Pemilu 2009.

5.1.1.2. Penentuan Calon Legislatif

Calon Legislatif pada Pemilu 2009 merupakan salah satu kuci perolehan kursi pada Pemilu 2009. Namun, perubahan sistem penentuan kursi legislative yang terjadi ketika tahapan penentuan caleg telah berjalan, membuat beberapa partai mungkin salah langkah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pada awalnya menyatakan, secara sederhana, bahwa penentuan kursi masih berdasarkan nomor urut bila tidak ada yang memenuhi 30% Bilangan Pembagi Pemilih. Artinya, harapan unuk nomor urut masih besar. Beberapa partai meresponnya seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Daftar caleg dan nomor urut menjadi rebutan para pengurus partai, dan orang diluar partai tidak mendapat akses untuk menjadi caleg dari partai tersebut. Sehingga, nomor urut 1 hingga 5 menjadi primadona, dan orang enggan untuk menduduki caleg bernomor besar. Beberapa partai mensikapi lain, yakni menggunakan metode perlombaan antar sesame caleg. Pada awalnya, hal ini ditujukan untuk perolehan suara yang besar. Besarnya jumlah caleg yang diajukan serta penempatan tokoh-tokoh populer seperti artis sebagai caleg, merupakan dalam rangka hal tersebut.

Pasca keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak, memunculkan pro dan kontra. Hal ini sebenarnya terkait dengan kesiapan strategi yang telah dijalankan. Bagi partai-partai yang tetap mennganut semangat nomor urut, tentu kecewa dengan perubahan sistem tersebut. Partai tidak punya kesempatan untuk merubah caleg-caleg yang telah ditetapkan. Dari sisi ini, partai-partai tersebut dapat dikatakan kalah langkah. Bagi partai-partai yang dari awal sudah menganut perlombaan antar caleg, tentu tidak merasa dipusingkan dengan perubahan sistem tersebut. Dari sisi ini, partai-partai tersebut terbilang menang langkah.

Bagaimana partai-partai di Kabupaten Demak dalam menetapkan Calegnya, dibawah ini akan dijelaskan mengenai apa yang terjadi pada beberapa partai dari sisi jumlah Caleg di tiap-tiap Daerah Pemilihan.

**Daftar Jumlah Anggota Calon Legislatif DPRD Kabupaten Demak
Pada Pemilu 2009**

No	Partai	Daerah Pemilihan					Total
		1	2	3	4	5	
1	PDI P	10	5	8	6	5	34
2	PKB	7	4	11	7	10	39
3	P Demokrat	9	8	9	9	4	39
4	P Gerindra	4	3	3	3	4	17

Sumber: Data KPU 2009

PDIP

PDIP Perjuangan merupakan partai yang menyiapkan penentuan caleg berdasarkan nomor urut. PDIP berkeyakinan bahwa nomor urut caleg masih merupakan penentu kursi. PDIP Perjuangan Kabupaten Demak juga menyikapi sebagaimana sikap DPP PDIP. PDIP Kabupaten Demak mengajukan 34 caleg DPRD Kabupaten Demak. Besarnya jumlah caleg ini bukan menunjukkan bahwa partai menganut paham perlombaan caleg. Namun, banyaknya jumlah caleg di PDIP kabupaten Demak disebabkan asumsi bahwa PDIP akan memperoleh banyak kursi. Sehingga diperlukan caleg lebih untuk mengantisipasi banyaknya perolehan kursi yang mungkin diperoleh.

Dapat dilihat pada Daerah Pemilihan Demak 1 dan 3, merupakan Dapel dengan jumlah caleg PDIP terbesar bila dibanding pada Daerah Pemilihan yang lain. Hal tersebut dikarenakan PDIP melihat bahwa Dapel tersebut adalah lading suara bagi PDIP. Pada Pemilu 2004, PDIP mampu memperoleh masing-masing 4 kursi di Dapel 1 dan 3. Sehingga ada kemungkinan Dapel tersebut akan memberikan banyak kursi pada Pemilu 2009. Dengan demikian dapat diartikan bahwa PDIP Perjuangan Kabupaten Demak masih mengandalkan Partai dalam memobilisasi pemilih. Terdapatnya elit-elit PDIP di nomor 1 dan 2 memperkuat hal tersebut.

Fenomena di atas dapat diartikan bahwa DPC PDIP Demak dalam melakukan rekrutmen Caleg berdasarkan kedudukan dalam kepengurusan Partai. Terdapatnya nama Hj Suntarita, Sugiharno, Mugiyono, Muzaeri, menunjukkan keberadaan pengurus DPC PDIP dalam nomor jadi (jika berdasar pada logika nomor urut). Sisanya, adalah Caleg-caleg dari DPD PDIP Jawa Tengah, pengurus PDIP dibawah

DPC PDIP Demak, serta individu-individu yang memiliki kemampuan financial dalam mengupayakan dirinya masuk dalam daftar caleg PDIP. Hal ini bukan berarti bahwa Caleg yang masuk dalam daftar Caleg adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dalam memobilisasi pemilih. Namun, faktor kedudukan di kepengurusan menjadi lebih utama di banding faktor yang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa DPC PDIP Demak dalam rekrutmen menggunakan *Spoil System*, yakni sebuah mekanisme rekrutmen yang tidak memakai alasan-alasan rasional sebagai alasan utama. Hal yang menyebabkan ini sangat jelas. Keyakinan PDIP terhadap mekanisme nomor urut di masa-masa awal tahapan Pemilu 2009, keyakinan terhadap besarnya daya tarik partai dalam mengarahkan pemilih, serta keinginan dari para elit partai untuk tampil di parlemen, membuat mekanisme rekrutmen yang terjadi di DPC PDIP Kabupaten Demak seperti itu.

PKB

Sebagaimana PDI Perjuangan, PKB merupakan partai yang menyiapkan penentuan caleg berdasarkan nomor urut. PKB juga berkeyakinan bahwa nomor urut caleg masih merupakan penentu kursi. PKB Kabupaten Demak juga menyikapi sebagaimana sikap DPP PKB. PKB Kabupaten Demak mengajukan 39 caleg DPRD Kabupaten Demak. Besarnya jumlah caleg ini bukan menunjukkan bahwa partai menganut faham perlombaan caleg. Namun, banyaknya jumlah caleg di PKB kabupaten Demak disebabkan asumsi bahwa PKB akan memperoleh banyak kursi. Sehingga diperlukan caleg lebih untuk mengantisipasi banyaknya perolehan kursi yang mungkin diperoleh.

Penentuan jumlah Caleg masih berdasar pada asumsi perolehan kursi di tiap Dapel. Dapat dilihat pada Daerah Pemilihan Demak 3 dan 5, merupakan Dapel dengan jumlah caleg PKB terbesar bila dibanding pada Daerah Pemilihan yang lain. Hal tersebut dikarenakan PKB melihat bahwa Dapel tersebut adalah ladang suara bagi PKB. Pada Pemilu 2004, PKB mampu memperoleh masing-masing 2 kursi di Dapel 3 dan 5. Sehingga ada kemungkinan Dapel tersebut akan memberikan lebih banyak kursi pada Pemilu 2009. Di Daerah Pemilihan 2, merupakan Dapel dengan jumlah Caleg PKB terkecil. Pada Pemilu 2004, Dapel 2 merupakan Dapel yang menyumbangkan kursi paling kecil bagi PKB. Sehingga, PKB tidak begitu optimis akan mendulang kursi dari Dapel 2 pada Pemilu 2009. Dengan demikian dapat diartikan bahwa PKB Kabupaten Demak masih mengandalkan Partai dalam memobilisasi pemilih. Terdapatnya elit-elit PDIP di nomor 1 dan 2 memperkuat hal tersebut.

Sebagaimana PDIP, apa yang terjadi di atas dapat diartikan bahwa DPC PKB Demak dalam melakukan rekrutmen Caleg berdasarkan kedudukan dalam kepengurusan Partai. Terdapatnya nama H Masykuri Abdullah, Hj Nur Sa'adah, Rizqon Malik Fullaesuf, Ali Kaedar, Suyono, Maskuri, Syamsul Huda, Muhlasin, menunjukkan bahwa pengurus DPC PKB Kabupaten Demak mengisi nomor urut jadi (dalam logika nomor urut). Hal ini bukan berarti bahwa Caleg yang masuk dalam daftar Caleg adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dalam memobilisasi pemilih. Namun, faktor kedudukan di kepengurusan menjadi lebih utama di banding faktor yang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa DPC PKB Demak dalam rekrutmen menggunakan *Spoil System*, yakni sebuah mekanisme

rekrutmen yang tidak memakai alasan-alasan rasional sebagai alasan utama. Hal yang menyebabkan ini sangat jelas. Keyakinan PKB terhadap mekanisme nomor urut di masa-masa awal tahapan Pemilu 2009, keyakinan terhadap besarnya daya tarik partai dalam mengarahkan pemilih, serta keinginan dari para elit partai untuk tampil di parlemen, membuat mekanisme rekrutmen yang terjadi di DPC PKB Kabupaten Demak seperti itu. Ada satu faktor khusus yang menguatkan mekanisme tersebut. Adanya orang yang masuk dalam daftar Caleg Pemilu 2009 karena intervensi dari elit penting PKB di Demak. Dari berbagai sumber di sekitar PKB, Rizqon Malik Fullaesuf merupakan Caleg titipan dari KH Munif Zuhri (elit PKB Girikusumo). Dia sebelumnya merupakan pengurus Garda Bangsa Propinsi Jawa Tengah. Peluang dia untuk menjadi Caleg di Kabupaten Demak kecil bila tidak ada intervensi dari elit PKB Girikusumo. Meskipun pencalegannya didasarkan pada mekanisme seperti itu, namun dia mampu menjadi Caleg dengan perolehan jumlah suara terbesar di banding Caleg-caleg lain yang ada dalam daftar Caleg Pemilu DPRD Kabupaten Demak Tahun 2009.

P Demokrat

Partai Demokrat merupakan partai yang menyiapkan penentuan caleg berdasarkan perlombaan antar Caleg. Partai Demokrat juga berkeyakinan bahwa perlombaan perolehan suara dapat memacu perolehan suara dan kursi bagi Partai. Partai Demokrat Kabupaten Demak juga menyikapi sebagaimana sikap DPP Partai Demokrat. Partai Demokrat Kabupaten Demak mengajukan 39 caleg DPRD Kabupaten Demak. Besarnya jumlah caleg ini tentu memberi makna lain bagi sebuah

partai yang terbilang tidak besar. Banyaknya jumlah caleg di Partai Demokrat kabupaten Demak disebabkan asumsi bahwa Caleg-caleg akan membantu memperoleh banyak kursi. Sehingga diperlukan caleg banyak untuk memacu perolehan kursi.

Penentuan jumlah Caleg yang merata di tiap-tiap Dapel, menunjukkan bahwa Partai Demokrat Kabupaten Demak tidak melihat Dapel sebagai sebuah basis suara partai. Di daerah Pemilihan 5, Partai Demokrat hanya memiliki 4 Caleg. Jumlah ini bukan berarti mengacu pada pertarungan nomor urut, namun lebih disebabkan sebagai partai kecil yang sulit mencari orang-orang yang bersedia menjadi Caleg dari partai tersebut. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Partai Demokrat Kabupaten Demak mengandalkan Caleg dalam memobilisasi pemilih. Terdapatnya Ketua DPC Partai Demokrat di nomor urut 9 memperkuat hal tersebut.

Apa yang terjadi di atas dapat diartikan bahwa DPC Partai Demokrat Demak dalam melakukan rekrutmen Caleg berdasarkan 2 model, kedudukan dalam kepengurusan Partai dan kemampuan Individu. Terdapatnya nama Nadiroh, Emilia Puspitasari, Supeno, Ahmad Husaeni, Zakiyatul Miskiyah, khusnul Latif menunjukkan bahwa pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak mengisi nomor urut jadi (dalam logika nomor urut), menunjukkan Partai Demokrat Demak meyakini kemampuan daya tarik partai dalam mengarahkan pemilih. Terdapatnya nama Taslim, Fatkan, Mashudi, menunjukkan bahwa DPC Partai Demokrat Demak juga melakukan rekrutmen berdasarkan kemampuan individu dalam mengarahkan pemilih. Orang-orang tersebut merupakan orang di luar kepengurusan DPC Partai Demokrat Demak. Sehingga dapat dikatakan bahwa DPC Partai Demokrat Demak

dalam rekrutmen menggunakan *Merit System* dan *Spoil System*. *Spoil System* yakni sebuah mekanisme rekrutmen yang tidak memakai alasan-alasan rasional sebagai alasan utama, dalam hal ini berdasar kedudukan individu dalam kepengurusan. *Merit System* yakni sebuah mekanisme rekrutmen yang memakai alasan-alasan rasional sebagai alasan utama, dalam hal ini adalah kemampuan individu dalam mengarahkan pemilih. Hal yang menyebabkan ini sangat jelas. Keyakinan Partai Demokrat terhadap besarnya daya tarik partai dalam mengarahkan pemilih, serta penggunaan Caleg sebagai salah satu faktor pengarah pemilih, membuat mekanisme rekrutmen yang terjadi di DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak seperti itu.

Partai Gerindra

Partai Gerindra merupakan partai baru yang berorientasi pada pencapaian eksistensi partai di segala tingkat lembaga legislative. Terkait dengan penentuan Caleg, sulit diketahui apakah Partai Gerindra menganut nomor urut atau perlombaan Caleg. Terdapat 2 alasan yang melekat terkait hal tersebut. Pertama, partai Gerindra merupakan Partai baru, tentu belum memiliki basis suara. Kedua, Partai Gerindra sebagai partai baru tidak memiliki cukup individu untuk menjadi Caleg. Kedua alasan tersebut lah yang membuat posisi Partai Gerindra dalam hal ini kabur. Partai Gerindra Kabupaten Demak hanya mengajukan 17 caleg DPRD Kabupaten Demak. Kecilnya jumlah caleg ini apakah menunjukkan bahwa partai menganut paham nomor urut ataukah keterbatasan orang. Namun bila dianalisa lebih dalam, kondisi ini disadari sepenuhnya oleh Partai. Sehingga Partai Gerindra akan memanfaatkan

Partai dan Caleg. Alasan pemanfaatan Caleg dapat dilihat dari para Caleg Partai Gerindra yang merupakan tokoh masyarakat, seperti Djumbadi. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Partai Gerindra Kabupaten Demak mengandalkan keterbatasan Partai dan keterbatasan Caleg dalam memobilisasi pemilih.

Kondisi berbeda terjadi dalam rekrutmen Caleg Partai Gerindra Demak. Partai Gerindra Demak tidak memiliki banyak pilihan dalam menentukan Caleg. Keterbatasan individu yang dimiliki, serta kondisi sebagai partai baru, menyebabkan kabur dalam menentukan system apa yang dipakai oleh Partai Gerindra. Nama-nama yang terdapat dalam daftar Caleg Partai Gerindra, mayoritas adalah pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak. Keadaan tersebut mungkin disebabkan oleh keterbatasan individu yang dimiliki Partai, dan rendahnya minat individu di luar pengurus untuk menjadi Caleg Partai Gerindra. Namun, bila kita melihat lebih jauh, individu-individu yang merupakan pengurus DPC Partai Gerindra maupun tingkatan pengurus dibawah DPC, dan masuk dalam daftar Caleg, adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dalam mengarahkan pemilih. Djumbadi, Kumaidi dan Caleg-caleg yang lain dikenal sebagai tokoh masyarakat di Dapel masing-masing. Sehingga dapat dikatakan bahwa DPC Partai Gerindra Demak dalam rekrutmen menggunakan *Spoil System*, yakni sebuah mekanisme rekrutmen yang tidak memakai alasan-alasan rasional sebagai alasan utama, dalam hal ini adalah kedudukan sebagai pengurus. Namun, Partai Gerindra telah melakukan *Merit System* dalam rekrutmen kepengurusan. *Merit System* yakni sebuah mekanisme rekrutmen yang memakai alasan-alasan rasional sebagai alasan utama, dalam hal ini adalah kemampuan individu dalam mengarahkan pemilih.

Dari model penentuan Caleg yang terlihat pada keempat Partai diatas, secara umum dapat dikatakan bahwa partai-partai di Kabupaten Demak memiliki strategi penetapan Caleg yang berbeda (mengacu pada pra keputusan suara terbanyak). Penentuan jumlah Caleg berdasar asumsi basis suara di tiap-tiap daerah pemilihan, kecilnya jumlah Caleg pada tiap-tiap Daerah Pemilihan, terdapatnya elit-elit partai pada nomor urut 1 dan 2, merupakan beberapa alasan yang menunjukkan bahwa partai menganggap nomor urut masih sangat menentukan. Sehingga peran partai masih sangat bisa diandalkan dalam melakukan mobilisasi pemilih. Sementara itu, besarnya jumlah Caleg, pemerataan jumlah Caleg di masing-masing Daerah Pemilihan, menunjukkan bahwa Partai menganggap bahwa perlombaan Caleg merupakan cara efektif untuk memperoleh suara. Sehingga, Caleg lah yang harus berperan dalam melakukan mobilisasi pemilih.

Dari sisi bagaimana Partai melakukan rekrutmen Caleg, partai-partai masih banyak yang menerapkan *Spoil System* dalam melakukan memilih individu-individu yang akan ditempatkan sebagai Caleg. Terpampangnya nama-nama pengurus partai pada nomor jadi menunjukkan bahwa pengurus partai masih meyakini daya tarik partai dapat mengarahkan pemilih. Asumsi terdapatnya pemilih yang memiliki partai pilihan, namun tidak memiliki Caleg pilihan, maka akan cenderung memilih caleg pada nomor atas, menyebabkan nomor urut atas tetap menjadi rebutan bagi kalangan elit partai. Meskipun partai tersebut murni menggunakan model suara terbanyak dalam menentukan caleg yang berhak menempati kursi yang diperoleh partainya.

5.1.2. Kemampuan Partai Dalam Mengarahkan Pemilih

Salah satu fungsi partai Politik adalah melakukan mobilisasi pemilih. Melalui mobilisasi politik (menghimbau untuk bertindak, mengerahkan) partai politik melibatkan warganegara ke dalam kehidupan publik. Tujuan mobilisasi politik meliputi tiga bidang: untuk mengurangi ketegangan sosial yang dimunculkan oleh kelompok yang dikerahkan, untuk mengelaborasi program dalam rangka memperoleh suara bagi partai, dan untuk membangun suatu struktur kelompok yang dapat dijadikan referensi bagi partai politik. Tujuan dari semua mobilisasi politik adalah untuk mencapai suatu efek baik dari aspek-aspek diatas, sehingga dapat memastikan posisi yang lebih baik untuk mobilisasi partai politik. Mobilisasi dalam kajian ini ditujukan pada usaha-usaha partai politik untuk menggerakkan pemilih agar melakukan tindakan politik berupa pemberian suara.

Mobilisasi dikategorikan dalam 2 bentuk, yakni mobilisasi langsung dan mobilisasi tidak langsung. Mobilisasi langsung merupakan kegiatan mabilisasi dalam bentuk pengerahan terhadap pemilih agar melakukan tindakan politik sebagaimana yang dikehendaki partai politik. Mobilisasi tidak langsung merupakan kegiatan mobilisasi dalam bentuk pemengaruhan cara piker atau cara pandang pemilih, sehingga pemilih akan mengekspresikan pemahamannya dalam bentuk keputusan politik pemilih.

Pembedaan kategori antara mobilisasi langsung dan tidak langsung berdasar pada mekanisme-mekanisme mobilisasi yang dilakukan oleh partai politik. Mobilisasi langsung dapat dilakukan dengan memberikan instruksi-instruksi melalui mekanisme partai politik kepada para pemilih. Sedangkan mobilisasi tidak langsung

dapat dilakukan dengan kampanye-kampanye langsung maupun melalui media-media. Mobilisasi langsung, semisal adalah menggerakkan simpatisan partai untuk melakukan konvoi jalanan, untuk melakukan aksi-aksi politik, dan lain sebagainya. Mobilisasi tidak langsung, semisal adalah iklan-iklan politik di media masa, seminar-seminar partai, kampanye dialogis, dan lain sebagainya.

5.1.2.1. Metode Pengarahan

Perubahan tata cara penetapan kursi legislative, secara otomatis mempengaruhi model strategi yang akan dipakai oleh partai politik dalam mendulang suara pemilih. Selama beberapa kali pemilu, keterpilihan caleg didasarkan pada nomor urut. Sehingga Partai menjadi actor utama dalam Pemilu. Partai bergerak sebagai sebuah organisasi yang harus menjemput suara pemilih. Ketika sistem berubah, keterpilihan caleg didasarkan pada suara Caleg, strategi yang dipakai pun berubah. Pada beberapa kasus, Partai sebagai actor, mulai mengurangi perannya dalam usaha-usaha mendapatkan suara pemilih. Pada sisi yang lain, peran partai justru diperkuat untuk memaksimalkan gerak para Caleg. Di bawah ini merupakan gambaran partai yang ada di Kabupaten Demak dalam menentukan strategi pengarahan pemilih.

PDIP

Pada awal-awal tahapan Pemilu, PDIP telah menganggap bahwa nomor urut masih merupakan factor penentu keterpilihannya Caleg. Sehingga, PDIP masih menganggap bahwa peran Partai masih sangat dibutuhkan dalam meraup perolehan

suara. PDIP juga yakin bahwa Partai masih menjadi daya tarik utama untuk mempengaruhi pemilih. Namun, setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak, maka medan pertempuran secara otomatis berubah. PDIP mau tidak mau harus menerima kenyataan ini. Strategi sudah terlanjur ditetapkan. Penentuan Caleg yang berorientasi pada nomor urut, merupakan awal dari rangkaian besar strategi yang ditetapkan oleh PDIP. Sementara di tengah perjalanan, aturan main berubah. Jadi, secara langkah, PDIP telah kalah langkah awal dalam penetapan Caleg.

Keadaan tersebut diperparah dengan kondisi DPC PDIP Kabupaten yang mengalami konflik internal. Koordinasi antar elemen partai menjadi terganggu. Pada situasi ini, Partai tidak mampu menjalankan perannya secara optimal. Strategi awal, yakni pengarahannya difokuskan pada Partai, menjadi sesuatu yang sulit dilakukan dalam organisasi yang sedang kacau. Setidaknya terdapat dua alasan yang menyebabkan PDIP Kabupaten Demak tidak mampu menentukan strategi sebagai aktor utama dalam mengarahkan pemilih. Pertama, kondisi internal partai membuat fungsi mesin partai tidak dapat digunakan secara maksimal. Sehingga, pilihan untuk mengandalkan mesin partai dalam mengarahkan pemilih, sulit dilakukan. Kedua, strategi awal Pemilu terlanjur berdasarkan pada kemampuan Partai. Perubahan di tengah jalan membuat strategi menjadi tidak maksimal. Hal tersebutlah yang membuat DPC PDIP Kabupaten Demak tidak memiliki pilihan strategi pengarahannya pemilih, kecuali melempar pada Caleg-caleg. Secara otomatis, Badan Pemenangan Pemilu PDIP Demak dalam hal pengarahannya pemilih menjadi tidak berfungsi.

PKB

Sebagaimana PDIP, pada awal-awal tahapan Pemilu, PKB telah menganggap bahwa nomor urut masih merupakan factor penentu keterpilihn Caleg. Sehingga, PKB juga masih menganggap bahwa peran Partai masih sangat dibutuhkan dalam meraup perolehan suara. PKB juga meyakini identifikasi Partai masih menjadi daya tarik utama untuk mempengaruhi pemilih. Namun, setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak, maka medan pertempuran secara otomatis berubah. PKB mau tidak mau harus menerima kenyataan ini. Strategi sudah terlanjur ditetapkan. Penentuan Caleg yang berorientasi pada nomor urut, merupakan awal dari rangkaian besar strategi yang ditetapkan oleh PKB. Sementara di tengah perjalanan, aturan main berubah. Jadi, secara langkah, sama halnya dengan PDIP, PKB telah kalah langkah awal dalam penetapan Caleg.

Keadaan tersebut diperparah dengan kondisi DPC PKB Kabupaten Demak yang mengalami konflik internal. Koordinasi antar elemen partai menjadi terganggu. Pada situasi ini, Partai tidak mampu menjalankan perannya secara optimal. Strategi awal, yakni pengarahan pemilih difokuskan pada Partai, menjadi sesuatu yang sulit dilakukan dalam organisasi yang sedang kacau. Setidaknya terdapat dua alasan bagi PKB yang hampir sama dengan alasan yang menyebabkan PDIP Kabupaten Demak tidak mampu menentukan strategi sebagai actor utama dalam mengarahkan pemilih. Pertama, kondisi internal partai membuat fungsi mesin partai tidak dapat digunakan secara maksimal. Sehingga, pilihan untuk mengandalkan mesin partai dalam mengarahkan pemilih, sulit dilakukan. Kedua, strategi awal Pemilu terlanjur berdasarkan pada kemampuan Partai mengarahkan pemilih. Perubahan di tengah

jalan membuat strategi menjadi tidak maksimal. Hal tersebutlah yang membuat DPC PKB Kabupaten Demak tidak memiliki pilihan strategi pengarahannya, kecuali melempar pada Caleg-caleg. Bahkan, DPC PKB Kabupaten Demak tidak berhasil menyusun sebuah Lembaga Pemenangan Pemilu. Perpecahan elit PKB Demak membuat Lembaga Pemenangan Pemilu yang sebenarnya sempat terbentuk, menjadi dibatalkan. Fungsi Lembaga Pemenangan Pemilu diambil alih oleh Ketua dan beberapa pengurus DPC PKB Kabupaten Demak.

Partai Demokrat

Kondisi berbeda dialami oleh Partai Demokrat. Pada awal-awal tahapan Pemilu, Partai Demokrat telah menganggap perlombaan antar Caleg dalam mempengaruhi pemilih, merupakan faktor utama. Sehingga, Partai Demokrat menganggap bahwa peran Partai masih dibutuhkan dalam meraup perolehan suara, namun peran Caleg juga sangat penting. Partai Demokrat juga yakin bahwa Partai masih menjadi daya tarik utama untuk mempengaruhi pemilih. Pencapaian hasil maksimal dapat tercapai dengan menetapkan kompetisi antar Caleg. Setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak, maka Partai Demokrat tidak kaget, karena memang Partai Demokrat telah menyepakati pemanfaatan Caleg sebagai fokus pengarahannya. Penentuan Caleg yang berjumlah besar, serta menampilkan Caleg-Caleg yang populer, merupakan awal dari rangkaian besar strategi yang ditetapkan oleh Partai Demokrat. Jadi, secara langkah, Partai Demokrat telah selangkah di depan Partai-partai yang masih mengandalkan identifikasi kepartaian saja.

Stabilitas kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak juga menjadai salah satu faktor yang mendukung bagi terlaksananya strategi pengarahannya oleh partai. Meskipun begitu, Partai Demokrat juga belum bisa memanfaatkan mesin partai secara penuh. Pada situasi ini, Partai mampu menjalankan perannya secara optimal. DPC Partai Demokrat memilih untuk mengkombinasikan 2 kekuatan pengarahannya, yakni partai sebagai sebuah mesin, dan caleg sebagai aktor. Setidaknya terdapat beberapa alasan yang menyebabkan Partai Demokrat Kabupaten Demak menentukan strategi kombinasi. Pertama, stabilitas kepengurusan yang membuat pelaksanaan program Partai menjadi satu komando yang solid. kedua kondisi internal partai membuat fungsi mesin partai tidak dapat digunakan secara maksimal. Sehingga, pilihan untuk mengandalkan mesin partai dalam mengarahkan pemilih, sulit dilakukan. Kedua, sebagai partai kecil, Partai Demokrat merasa belum mampu mengandalkan mesin partai secara penuh. Ketiga, banyaknya jumlah Caleg dapat dimanfaatkan sebagai aktor yang mengarahkan pemilih. Dari ketiga hal itulah, maka Partai Demokrat memilih kombinasi dua aktor pengarah pemilih

Partai Gerindra

Partai Gerindra sebagai partai baru pada Pemilu 2009, tampaknya juga menganggap bahwa identifikasi Partai masih sangat dibutuhkan dalam meraup perolehan suara. Hal tersebut dapat dilihat dari iklan-iklan yang ditampilkan oleh Partai Gerindra di media televisi. Partai Gerindra juga yakin bahwa Partai masih menjadi daya tarik utama untuk mempengaruhi pemilih. Namun, setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak, maka medan pertempuran

secara otomatis berubah. Partai Gerindra mau tidak mau harus menerima kenyataan ini. Strategi sudah terlanjur ditetapkan. Penentuan Caleg yang sedikit jumlahnya, tidak dapat dilihat apakah Partai Gerindra hanya mengandalkan Partai dalam mengarahkan pemilih, atau tidak. Sedikitnya jumlah Caleg bisa jadi disebabkan karena keterbatasan individu yang bersedia menjadi Caleg dari Partai Gerindra. Sementara di tengah perjalanan, aturan main berubah. Namun, tampaknya Partai Gerindra tetap mengandalkan daya tarik Partai yang coba dibentuk.

Semangat kepartaian dari kepengurusan DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak, yang baru terbentuk, juga menjadi salah satu faktor yang mendukung bagi terlaksananya strategi pengarahannya oleh partai. Beberapa bentuk dari kegiatan yang berhubungan dengan pengarahannya adalah program peng-asuransian bagi kader atau anggota Partai Gerindra. Masyarakat disajikan sebuah program asuransi, yang bertujuan membuat pemilih tertarik untuk menjadi kader atau anggota Partai Gerindra. Pada perjalanannya, setelah muncul keputusan suara terbanyak, Partai Gerindra mau tidak mau juga harus masuk ke medan pertarungan para Caleg. DPC Partai Gerindra mengkombinasikan 2 kekuatan pengarahannya, yakni partai sebagai sebuah mesin, dan caleg sebagai aktor utama. Keduanya dijalankan secara seimbang. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan Partai Gerindra Kabupaten Demak tetap memanfaatkan dan mengoptimalkan daya tarik Partai. Pertama, iklan Partai Gerindra di media televisi dianggap cukup berhasil membuat Partai Gerindra dikenal oleh masyarakat. Kedua, kecilnya jumlah Caleg membuat keefektifan perolehan suara melalui pengarahannya oleh caleg, menjadi kurang bisa dijadikan tumpuan utama.

5.1.2.2. Organisasi Sayap Di Seputar Pemilu

Partai politik di Indonesia memiliki organisasi-organisasi yang dibawahinya. Organisasi-organisasi tersebut biasa dikenal dengan organisasi *underbow*. Kemampuan sebuah partai dalam mengelola organisasi-organisasi yang dibawahinya, merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi perkembangan partai tersebut. Karena organisasi-organisasi tersebut pada dasarnya merupakan alat Partai dalam upaya masuk ke sector-sektor tertentu masyarakat. Lazimnya, sebuah partai politik memiliki organisasi-organisasi yang bergerak di bidang perempuan dan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang kepemudaan. Kedua bidang tersebut dianggap lebih penting dari bidang-bidang yang lain karena perempuan dan pemuda merupakan kelompok masyarakat yang paling bisa dimanfaatkan untuk memasukkan Partai dalam kehidupan bermasyarakat.

PDIP

PDIP sebagai sebuah partai besar dan telah memiliki pengalaman dalam perpolitikan di Indonesia, memiliki beberapa organisasi yang dibawahinya. Organisasi-organisasi tersebut yakni: Barisan Muda Demokrasi (Bamusi), Taruna Merah Putih (TMP), dan Banteng Muda Indonesia (BMI). Organisasi-organisasi tersebut bekerja secara mandiri, namun dibawah pengelolaan PDIP Kabupaten Demak.

Pada pemilu 2009 kemarin, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Demak, organisasi-organisasi tersebut dilibatkan dalam usaha-

usaha Partai memenangkan Pemilu 2009.⁵² Namun setelah ditelusuri lebih jauh, pelibatan organisasi-organisasi tersebut sangat kecil. Berdasarkan keterangan dari pengurus Banteng Muda Indonesia, organisasi-organisasi dibawah PDIP hanya dilibatkan sebagai panitia kampanye besar PDIP. Posisi-posisi yang dijalankan pun merupakan posisi yang bersifat teknis acara. Jadi, keberadaan organisasi-organisasi tersebut sebenarnya, tidak dimanfaatkan dalam rangka mendulang suara.

Dari keterangan-keterangan di atas dapat diketahui bahwa PDIP Kabupaten Demak tidak memanfaatkan organisasi-organisasi yang dibawahnya untuk mengoptimalkan pengarahannya-pengarahannya pemilih yang dilakukan oleh partai. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh keberadaan organisasi-organisasi tersebut yang 'antara ada dan tiada'. Secara formal, organisasi-organisasi tersebut memiliki kepengurusan lengkap sebagaimana layaknya organisasi semestinya. Namun, eksistensi mereka dalam bergerak dan bekerja tidak muncul, dan bahkan bisa dikatakan tidak ada. Di tingkat pusat pun, organisasi-organisasi tersebut juga minim sekali terlihat aktivitasnya, apalagi di tingkat Kabupaten.

PKB

PKB, yang juga sebagai sebuah partai besar dan telah memiliki pengalaman dalam perpolitikan di Indonesia, memiliki beberapa organisasi yang dibawahnya. Organisasi-organisasi tersebut yakni: Garda Bangsa, dan Persatuan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB). Organisasi-organisasi tersebut sesuai aturan, bekerja secara mandiri, namun dibawah pengelolaan PKB Kabupaten Demak.

⁵² Mugiyono, Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Demak, 17 September 2009

Terkait dengan peran organisasi-organisasi tersebut pada Pemilu 2009, Sekretaris DPC PKB mengungkapkan bahwa organisasi-organisasi tersebut tidak dilibatkan dalam usaha-usaha Partai memenangkan Pemilu 2009. Hal tersebut disebabkan organisasi-organisasi tersebut adalah milik partai. Sedangkan Partai sudah menyerahkan pengarahannya pada Caleg. Sehingga, pemanfaatan organisasi-organisasi tersebut hanya akan menimbulkan kecemburuan di antara para Caleg⁵³. Hal senada juga diungkapkan oleh pengurus Garda Bangsa Kabupaten Demak. Beliau menyatakan bahwa Garda Bangsa sama-sekali tidak dilibatkan dalam kegiatan apapun terkait Pemilu 2009.⁵⁴ Jadi, keberadaan organisasi-organisasi tersebut tidak dimanfaatkan dalam rangka mendulang suara.

Meskipun Partai menyatakan bahwa mesin partai tidak dilibatkan, DPC PKB Kabupaten Demak mempersilahkan kepada individu-individu jika ingin membantu Caleg tertentu. Namun hal itu dilakukan secara pribadi, bukan sebagai organisasi. Artinya, orang-orang partai tetap mendapat kebebasan untuk terlibat dalam kampanye Caleg tertentu sesuai kehendaknya. Kecemburuan antar Caleg terkait pemanfaatan mesin partai dapat dikurangi dengan model ini, karena kemampuan masing-masing Caleg sangat menentukan dalam mendekati dan memperoleh dukungan dari individu-individu partai. Kemampuan-kemampuan tersebut dalam bentuk kemampuan Caleg menjalin ikatan emosional dengan orang partai, serta kemampuan Caleg dalam melakukan *bargaining position* dengan mereka. Ikatan emosional ini dapat terbentuk di dalam aktivitas partai pada masa-masa sebelumnya,

⁵³ Munhamir, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Demak, 15 September 2009

⁵⁴ Niam, Pengurus Garda Bangsa Kabupaten Demak, 12 September 2009

dan juga dapat terbentuk dari luar partai seperti hubungan pertemanan, spiritual, dan lain sebagainya.

Dari keterangan-keterangan di atas dapat diketahui bahwa PKB Kabupaten Demak tidak memanfaatkan organisasi-organisasi yang dibawahnya untuk mengoptimalkan pengarahannya-pengarahannya pemilih yang dilakukan oleh partai. Keadaan ini disebabkan oleh keberadaan organisasi-organisasi tersebut yang tidak memihak pada salah satu Caleg. Padahal, pertarungan antar Caleg di dalam tubuh PKB juga merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan. Sebenarnya, Garda Bangsa kabupaten Demak tergolong sebagai organisasi yang terbilang cukup produktif. Struktur kepengurusannya ada hingga level terbawah. Pada even-even politik tertentu, Garda Bangsa selama ini juga kerap mengambil peran.

Partai Demokrat

Partai Demokrat dari sisi pengalaman dalam mengelola sebuah organisasi Partai, mungkin masih kalah dengan Partai-partai besar lama. Partai Demokrat juga memiliki beberapa organisasi yang dibawahnya. Organisasi-organisasi tersebut yakni: Komite Nasional Pemuda Demokrat (KNPD) dan Perempuan Demokrat (PD). Organisasi-organisasi tersebut bekerja secara mandiri, namun dibawah pengelolaan Partai Demokrat Kabupaten Demak.

Pada pemilu 2009 kemarin, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Bidang Organisasi Kepemudaan dan Kaderisasi DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak, organisasi-organisasi tersebut dilibatkan dalam usaha-usaha Partai memenangkan Pemilu 2009. Bentuk pelibatangannya adalah menginstruksikan

pengurus-pengurus organisasi tersebut untuk menjadi tim sukses Caleg yang ada di wilayahnya. Namun, karna kepengurusan di tingkat Kecamatan belum terbentuk secara lengkap, maka instruksi tersebut hanya dijalankan secara pribadi masing-masing pengurus di wilayah di mana dia tinggal.⁵⁵ Hal senada juga diungkapkan oleh pengurus KNPD. Beliau mengungkapkan adanya instruksi dari partai untuk membantu para caleg. Beliau mengungkapkan bahwa dirinya pun menjadi tim sukses dari caleg yang mendapat Daerah Pemilihan dimana beliau tinggal.⁵⁶

Dari keterangan-keterangan di atas dapat diketahui bahwa Partai Demokrat Kabupaten Demak memanfaatkan organisasi-organisasi yang dibawahinya untuk mengoptimalkan pengarah-pengarah pemilih yang dilakukan oleh partai. Namun terdapat kendala dari pemanfaatan organisasi-organisasi tersebut. Bila dilihat lebih teliti, pemanfaatan tersebut sebenarnya bukan berupa pemanfaatan organisasi, tetapi memanfaatkan individu-individu yang ada pada organisasi-organisasi tersebut. Hal ini disebabkan organisasi-organisasi tersebut belum terbentuk dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Partai Gerindra

Partai Gerindra merupakan partai yang baru terlahir. Secara formal, Partai Gerindra memiliki beberapa organisasi yang dibawahinya. Organisasi-organisasi tersebut yakni: Persatuan Wanita Indonesia Raya (Perwira), Gardu Prabowo, dan lain-lain. Organisasi-organisasi tersebut didirikan dengan tujuan membesarkan partai Gerindra dan mengawal Partai Gerindra dalam Pemilu 2009.

⁵⁵ Gian Supeno, Ketua Bidang OKK DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak, 19 September 2009

⁵⁶ Pengurus KNPD Kabupaten Demak, 19 September 2009

Pada pemilu 2009 kemarin, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak, organisasi-organisasi tersebut tidak dilibatkan dalam usaha-usaha Partai memenangkan Pemilu 2009. Organisasi-organisasi tersebut hanya menyusahkan kerja Partai⁵⁷. Peneliti menemui kejanggalan terhadap pernyataan tersebut. Pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang Ketua partai tentang organisasi yang dibawahinya. Setelah ditelusuri lebih jauh, keberadaan organisasi-organisasi tersebut diragukan. Daftar kepengurusan ataupun symbol-simbol organisasi yang seharusnya ada di Sekretariat DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak, ternyata tidak ditemukan. Jadi, keberadaan organisasi-organisasi tersebut tidak jelas, sehingga tidak alasan untuk memanfaatkannya.

Dari keterangan-keterangan di atas dapat diketahui bahwa Partai Gerindra Kabupaten Demak tidak memanfaatkan organisasi-organisasi yang dibawahinya untuk mengoptimalkan pengarahan-pengarahan pemilih yang dilakukan oleh partai. Jangankan memanfaatkan, keberadaan organisasi-organisasi tersebut juga belum jelas. Keadaan ini mungkin disebabkan karena Partai Gerindra merupakan Partai Baru. sehingga belum memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mengisi organisasi-organisasi yang diprakarsai oleh Partai Gerindra.

⁵⁷ Kumaidi, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak, 19 September 2009.

Tabel Kesimpulan 5.1

No	Partai	Fokus			
		Konsolidasi Internal	Mesin Partai	Strategi penentuan Caleg	Sikap Mobilisasi
1	PDIP	Konflik	Ada, berprestasi	Orientasi nomor urut, spoil system	Terlibat
2	PKB	Konflik	Ada, berprestasi	Orientasi nomor urut, spoil system	Tidak terlibat
3	PARTAI DEMOKRAT	Solid	Belum lengkap, belum berprestasi	Orientasi suara terbanyak, merit dan spoil system	Sedikit terlibat, tapi secara umum tidak terlibat
4	PARTAI GERINDRA	Solid	Belum lengkap, belum berprestasi	Tidak jelas, karena keterbatasan individu	Terlibat

5.2. Orientasi Calon Legislatif

5.2.1. Perubahan Prilaku Caleg

Perubahan prilaku Calon Anggota Legislatif mengacu pada perubahan sikap seorang Caleg karena alasan-alasan tertentu. Sehingga dapat mempengaruhi seluruh aktivitas yang Caleg dalam melakukan usaha-usaha perolehan suara. Perubahan sebuah sistem pemilu, secara otomatis akan merubah prilaku para Caleg. Di dalam penelitian ini, perubahan prilaku Caleg dapat dilihat dalam pengarahannya yang dilakukan oleh para Caleg.

5.2.1.1. Dinamika Perubahan Sistem Pemilu

Pemilihan Umum di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dari periode Pemilu ke periode Pemilu yang lain. Selama pemilu Orde Baru, kita mengenal sistem pemilu proporsional dengan daftar tertutup. Keterpilihan calon legislatif bukan ditentukan pemilih, melainkan menjadi kewenangan elite partai politik sesuai dengan susunan daftar caleg beserta nomor urut. Dalam sistem demikian, kedudukan parpol menjadi sangat kuat terhadap kadernya di parlemen. Namun di satu sisi, basis sosial dan relasi politik para wakil rakyat dengan konstituen menjadi lemah. Inilah yang menyebabkan kedudukan caleg terpilih mereka menjadi "jauh" dalam hubungannya dengan konstituen.

Sistem pemilu demikian juga dianggap membuat lembaga perwakilan rakyat menjadi elitis, eksklusif, tidak tersentuh oleh masyarakat, serta tidak sensitif terhadap

problem rakyat. Seiring tuntutan reformasi tahun 1998, sistem pemilu tersebut mulai ditinggalkan. Pada Pemilu 1999, sistem yang digunakan pada dasarnya tidak mengalami perubahan dibandingkan pemilu Orde Baru dengan menggunakan sistem proporsional berdasarkan daftar tertutup. Pemilih masih terbatas mencoblos tanda gambar parpol.

Semangat memilih langsung wakil rakyat baru mulai diakomodasi pada Pemilu 2004 melalui UU No. 12 Tahun 2003, dengan menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Pemilih tidak hanya memilih tanda gambar parpol, tetapi juga diberi kesempatan memilih caleg. Namun, penerapan ketentuan ini terkesan sengaja dilemahkan dengan pengaturan ketentuan suara sah dan penetapan calon terpilih. Suara sah parpol harus dicoblos bersamaan pada kolom tanda gambar parpol dan calegnya. Pemilih yang mencoblos caleg saja dianggap tidak sah. Sementara mencoblos tanda gambar parpol saja sah. Peraturan yang terkesan rumit dan tidak mempermudah pemilih untuk memilih caleg mereka secara langsung ini, dimanfaatkan oleh parpol dalam sosialisasi dan kampanye mereka untuk mencoblos tanda gambar parpol saja dengan dalih menghindari suara rusak atau tidak sah.

Peraturan yang menggambarkan berlakunya sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka setengah hati ini masih dipersulit lagi dengan ketentuan penetapan caleg yang langsung terpilih, yang harus memenuhi ketentuan bilangan pembagi pemilihan (BPP). Jika tidak ada caleg yang memperoleh angka BPP, kursi yang didapat parpol di daerah pemilihan, menjadi hak caleg berdasarkan nomor urut terkecil. Sementara itu untuk mencapai angka BPP dengan membagi jumlah suara

sah seluruh parpol peserta pemilu dengan jumlah kursi di daerah pemilihan (DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) sungguh sangat kecil kemungkinannya.

Hanya dua calon yang perolehan suaranya mencapai BPP, yaitu Hidayat Nur Wahid (262.019 suara, dapil DKI II-PKS) dan Saleh Djasit (195.348 suara, dapil Riau-PG). Hampir seluruh anggota DPR terpilih pada Pemilu 2004 karena posisinya pada nomor urut atas (nomor jadi) dalam daftar calon. Bahkan, tidak kurang dari 30% calon terpilih telah "menyalip" calon lain dalam daftar tersebut yang nyatanya memperoleh suara lebih banyak.⁵⁸

Semangat pilih langsung yang menjadi ikon Pemilu 2004 saat itu menjadi tidak berarti. Banyak caleg terpilih bukan karena banyaknya dicoblos oleh pemilih, melainkan lebih karena ditempatkan pada nomor urut kecil (jadi) dalam daftar caleg oleh parpol. Oligarki parpol masih menentukan.

Tanggal 31 Maret 2008, menjadi awal dari perubahan sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Pemerintah mengesahkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara umum, diberlakukannya Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengakibatkan berubahnya

⁵⁸ Rahmatul Ummah, *Memperkuat Sistem Pemilu 2009*, <http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2008111222412611>

sistem pemilu di Indonesia, dari sistem proporsional terbuka “setengah hati”, menjadi sistem proporsional yang memberi harapan semangat pilih langsung.

Pasal 5 Ayat (1) UU 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, tidak tampak berbeda dengan Pemilu 2004, tetap mendasarkan pada prinsip proporsional atau perwakilan berimbang. Artinya, suatu daerah pemilihan diwakili sejumlah wakil yang didapat dari perolehan suara partai-partai politik peserta pemilu. Yang membedakan, ketentuan penetapan caleg terpilih yang diatur dalam Pasal 214 yang didasarkan pada sistem nomor urut setelah tidak ada caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30% BPP. Sementara caleg yang memenuhi ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 30% lebih banyak dari jumlah kursi yang diperoleh parpol peserta pemilu, kursi diberikan kepada caleg yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara caleg yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% dari BPP. Dengan demikian sistem proporsional terbuka yang digunakan pada Pemilu 2009, masih tetap menerapkan pembatasan ketentuan perolehan suara sekurang-kurangnya 30% BPP bagi caleg untuk langsung ditetapkan sebagai caleg terpilih.

Bila kita menerapkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 pada hasil Pemilu 2004, dari 550 anggota DPR yang terpilih, hanya 116 orang (21,1%) yang memperoleh suara terbanyak dan sekurang-kurangnya mencapai 30% BPP. Sementara yang lain, sebagian besar anggota DPR 434 orang (78.9%) terpilih karena nomor urut dalam daftar calon. Artinya, posisi dalam nomor urut daftar calon tetap menjadi faktor yang lebih utama dalam menentukan seorang calon terpilih.

Sistem Proporsional terbuka penuh memperoleh angin segar ketika kemudian muncul putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan dalam rapat pemusyawaratan hakim oleh delapan hakim konstitusi pada Jumat, 19 Desember 2008 dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada Selasa 23 Desember 2008 oleh delapan hakim konstitusi. Putusan MK itu menanggapi permohonan uji materi yang diajukan Mohammad Sholeh, Sutjipto, Septi Notariana, dan Jose Dima S. Sholeh adalah caleg dari PDI-P untuk DPRD Jawa Timur. Sutjipto dan Septi adalah caleg dari Partai Demokrat untuk DPR. Jose adalah warga negara biasa.⁵⁹

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi atas pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU No 10/2008 tentang Pemilu 2009. Pasal 214 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 214

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:

- a. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;

⁵⁹ Irsan, *Keputusan MK Soal Suara Terbanyak Didukung Caleg Sumut*, <http://www.antarasumut.com/berita-sumut/pemilu-2009-berita-sumut/keputusan-mk-soal-suara-terbanyak-didukung-caleg-sumut/>

- b. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
- c. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP;
- d. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut;
- e. Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.⁶⁰

Keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU No 10/2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, bertentangan dengan UUD RI 1945. Selanjutnya, menyatakan pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU No 10/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

⁶⁰ Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008

Pertimbangan dari putusan ini di antaranya, ketentuan pasal 214 huruf a,b,c,d, dan e UU No 10/2008 yang menyatakan bahwa calon anggota legislatif terpilih adalah calon yang mendapat suara di atas 30 persen dari bilangan pembagian pemilu (BPP) atau menempati nomor urut lebih kecil, dinilai bertentangan dengan makna substantif dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 28 d ayat 1 UUD 1945.⁶¹

Dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka penetapan calon anggota legislatif pada Pemilu 2009 tidak lagi memakai sistem nomor urut dan digantikan dengan sistem suara terbanyak.

5.2.1.2.Semangat Perolehan Suara

Perubahan sistem pemilu sebagaimana diatas menyebabkan perubahan orientasi Caleg. Pada pemilu masa orde baru, Partai menjadi dominan dalam menarik suara pemilih. Sehingga prilaku yang dimunculkan oleh Caleg cenderung pasif dan semakin mengintegrasikan dirinya pada Partai. Agresifitas para Caleg cenderung datar dan menjadi subordinan dari Partai politiknya. Pada awal reformasi, yakni pemilu 1999, prilaku para Caleg masih sama. Munculnya partai-partai baru yang cepat memperoleh tempat di hati pemilih, menyebabkan para Caleg semakin ekstrem dalam mengintegrasikan dirinya pada Partainya. Figure dari tokoh sebuah partai politik dan kebesaran sebuah partai, menjadi tempat bersandar para Caleg.

⁶¹ Yuni Herlina Sinambela, *MK Kabulkan Uji Materi Caleg Sistem Suara Terbanyak*, <http://pemilu.okezone.com/read/2008/12/23/267/176428/mk-kabulkan-uji-materi-caleg-sistem-suara-terbanyak>

Prilaku caleg mulai berubah ketika Pemilu 2004 memberikan kesempatan coblos Caleg. Caleg yang mampu mencapai Bilangan Pembagi Pemilih akan secara langsung berhak memperoleh kursi, tanpa melihat nomor urutnya. Peraturan ini seharusnya dapat memacu agresifitas para Caleg dalam memperoleh suara pemilih. Namun apa yang terjadi, perubahan prilaku para caleg dapat dikatakan masih kecil. Syarat perolehan suara memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih, dianggap sebagai sesuatu yang sulit. Sehingga, partai dan Caleg sepakat untuk mengabaikan peluang tersebut. Partai dan Caleg tetap bersama-sama mengkampanyekan partainya. Integrasi Caleg terhadap Partainya terbilang masih cukup besar, karena kesepakatan untuk mengabaikan peluang coblos Caleg tersebut. Meskipun ada Caleg yang berhasil memperoleh suara Bilangan Pembagi Pemilih, yakni Hidayat Nur Wahid (PKS) dan Saleh Djasit (Partai Golkar), tidak dapat dijadikan penjelias bahwa telah terjadi perubahan prilaku Caleg secara nyata. Bahkan, apa yang diperoleh Hidayat Nur Wahid dan Saleh Djasit belum tentu sebagai hasil dari usaha individual yang mereka lakukan dalam mengarahkan pemilih. Kemudian, popularitas mereka secara luas di media, dalam kajian ini, tidak dilihat. Karena untuk Caleg provinsi maupun Kabupaten/Kota, kepopuleran di media televisi tidak di dapat dengan mudah.

Pemilu 2009 memberi peluang besar terjadinya perubahan prilaku Caleg. Penentuan Caleg yang berhak memperoleh kursi berdasar suara terbanyak Caleg, secara otomatis merubah sepenuhnya prilaku Caleg. Perubahan dimungkinkan terjadi dari prilaku Caleg yang cenderung pasif dan dependen pada Partai, menjadi prilaku Caleg yang lebih aktif dan lebih independen. Jika pada Pemilu sebelumnya kompetisis hanya antar partai politik, maka pada Pemilu 2009 berpotensi terjadinya

kompetisi antar Caleg, bahkan antar Caleg dari Partai dan Daerah Pemilihan yang sama. Kemampuan seorang Caleg dalam mengarahkan pemilih, menjadi faktor utama suksesnya seorang Caleg memperoleh kursi. Di samping mungkin juga terdapat faktor lain, semisal keberuntungan. Sikap dan pandangan Caleg pada Pemilu DPRD Kabupaten Demak Tahun 2009 terhadap perubahan sistem pemilu, akan dijelaskan dibawah ini.

PDIP

Perubahan sistem pemilu dari nomor urut menjadi kompetisi suara antar Caleg, menyebabkan PDI Perjuangan berang dalam mengomentari sistem ini. Hal ini disebabkan dengan strategi yang telah ditetapkan oleh PDI Perjuangan. Sementara perubahan sistem pemilu terjadi ketika tahapan Pemilu telah berjalan, termasuk penentuan daftar Caleg. Di tingkat DPP, komentar sinis dan kritik disampaikan para fungsionaris partai, diantaranya Cahyo Kumolo. Di tingkat Kabupaten Demak muncul berbagai tanggapan.

Seorang Caleg yang juga Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Demak mengungkapkan bahwa perubahan sistem pemilu dengan suara terbanyak merupakan sesuatu yang tidak dipersiapkan oleh PDIP. Proses penetapan Caleg yang telah dilakukan menjadi tidak berjalan sebagaimana harapan. PDIP menginginkan orang-orang yang telah berjasa dan bekerja membesarkan Partai, dapat memperjuangkan aspirasi dengan menjadi anggota DPR. Makanya mereka menempati nomor urut

Caleg jadi. Dengan suara terbanyak, peluang mereka untuk mendapat kursi semakin berkurang. Pertarungan menjadi makin liar.⁶²

Hal senada diungkapkan oleh Caleg lain, Hj Suntarita, yang juga Wakil Sekretaris DPC dan Wakil Sekretaris BP Pemilu PDI Perjuangan Kabupaten Demak. Beliau menyatakan bahwa sistem sekarang telah merusak Partai. Orang-orang yang telah lama di Partai, memiliki peluang yang sama dengan orang baru atau orang luar partai. Seharusnya orang lama lebih pas mendapatkan kursi. Karena orang lama sudah berpengalaman, dan loyalitasnya jelas. Entah apa jadinya jika orang baru dan orang luar partai berhasil memperoleh kursi DPR. Posisi Partai di DPR adalah penting bagi Partai. Bila yang duduk di DPR adalah orang-orang baru atau orang luar, maka mungkin akan membuat kacau kinerja PDIP.⁶³

Pandangan lain diungkapkan oleh caleg lain, Eko Nurkhayati, bukan pengurus elit struktural DPC PDI Perjuangan. Pada Pemilu 2009, beliau menempati nomor urut 3. Beliau menyatakan bahwa sistem suara terbanyak memberikan peluang yang sama bagi para Caleg. Bagus untuk sebuah demokrasi. Dapat juga memicu regenerasi di partai. Orang-orang yang sudah tidak mampu membawa kemajuan, tidak dapat dipaksakan lagi menjadi DPR. Hidup dan mati partai ada di DPR. Sehingga partai membutuhkan regenerasi di DPR. Lagian belum tentu orang-orang lama kalah bersaing dengan orang baru. banyak juga orang-orang lama yang berhasil memperoleh kursi.⁶⁴

⁶² Mugiyono, Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Demak, 15 September 2009

⁶³ Hj Suntarita, Wakil Sekretaris DPC dan Wakil Sekretaris BP Pemilu PDI Perjuangan Kabupaten Demak, 2 Oktober 2009

⁶⁴ Eko Nurkhayati, Caleg PDIP untuk DPRD Kabupaten Demak, 4 Oktober 2009

Caleg lain, Akhmad Rowi, juga bukan pengurus elit struktural DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak menyatakan bahwa penentuan perolehan kursi berdasarkan suara terbanyak menumbuhkan semangat di kalangan Caleg. Posisi sebagai nomor urut 5, pada awalnya (sebelum keputusan MK tentang suara terbanyak) membuat kampanye tidak begitu banyak dilakukan. Wajar bila nomor urut 5 memiliki rasa pesimis. Bayangkan, bila menggunakan nomor urut, partai harus mendapatkan jatah 5 kursi agar nomor urut 5 lolos menjadi anggota Dewan. Sesuatu yang sulit terwujud. Pada pemilu 2004 saja, PDIP paling banyak memperoleh 4 kursi di satu Dapel. Di pemilu 2009, persaingan antar partai lebih ketat. Setelah penetapan suara terbanyak, mulai ada harapan yang sama untuk menjadi anggota Dewan. Beginilah seharusnya demokrasi.⁶⁵

Dari keempat Caleg yang diusung PDIP diatas, terdapat beberapa 2 pandangan yang berbeda terkait perubahan sistem pemilu, yakni komentar yang menganggap bahwa penetapan caleg berdasar suara terbanyak adalah sesuatu yang tidak tepat, serta komentar yang menganggap bahwa penetaapan caleg berdasar suara terbanyak adalah sesuatu yang tepat. Namun, bila kita melihat latar belakang structural keempat Caleg diatas, maka dapat diketahui kenapa komentar-komentar tersebut muncul. Mugiyono dan Hj Suntarita adalah pengurus elit DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak. Secara logika, bila menggunakan mekanisme nomor urut, mereka adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan untuk menjadi anggota Dewan dan ditempatkan pada posisi nomor jadi. Sehingga wajar apabila sistem yang sudah lama berjalan dirubah dengan sistem baru yang tidak berpihak pada mereka,

⁶⁵ Akhmad Rowi, Caleg PDIP untuk DPRD Kabupaten Demak, 4 Oktober 2009

memunculkan komentar-komentar pedas. Sementara itu, bagi caleg yang bukan pengurus elit partai atau caleg yang termarginalkan di partai, seperti mendapatkan angin segar berupa kesempatan yang sama dengan Caleg lain. Angin perubahan yang berpihak ke mereka, memunculkan komentar-komentar positif terhadap perubahan sistem tersebut.

PKB

Sebagaimana apa yang terjadi di PDIP, perubahan sistem pemilu dari nomor urut menjadi kompetisi suara antar Caleg, menyebabkan PKB sinis dalam mengomentari sistem ini. Hal ini disebabkan dengan strategi yang telah ditetapkan oleh PKB. Sebagaimana diketahui, perubahan sistem pemilu terjadi ketika tahapan Pemilu telah berjalan, termasuk penentuan daftar Caleg. Di tingkat Kabupaten Demak muncul berbagai tanggapan.

Sekretaris DPC PKB Kabupaten Demak, Munhamir menyatakan bahwa sistem sekarang dapat memunculkan konflik internal Partai ke depan. Orang-orang yang telah lama di Partai, belum tentu memperoleh kursi Dewan. Sementara orang baru bisa saja memperoleh kursi Dewan. Konflik akan muncul ketika orang-orang lama yang tidak mendapat kursi Dewan, tetap memaksakan duduk di kepengurusan. Padahal, yang menghidupi partai adalah anggota Dewan. Caleg yang berhasil memperoleh kursi, tentu juga akan menginginkan posisi structural partai. Tidak terlalu menjadi masalah ketika orang tersebut adalah orang partai, meskipun bukan

dari kalangan elit partai. Namun, masalahnya ketika orang tersebut adalah bukan orang partai. Di sinilah mungkin akan menjadi pertarungan internal ke depan.⁶⁶

Seorang Caleg, Rizqon Malik Fullesuf, yang juga Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Demak mengungkapkan bahwa perubahan sistem pemilu dengan suara terbanyak merupakan sesuatu yang tidak dipersiapkan oleh PKB. Penetapan Caleg yang pada awalnya dalam rangka menyiapkan orang-orang tertentu menjadi anggota Dewan, menjadi sia-sia. PKB menginginkan orang-orang yang telah berjasa dan bekerja membesarkan Partai, dapat memperjuangkan aspirasi dengan menjadi anggota DPR. Makanya mereka menempati nomor urut Caleg jadi. Dengan suara terbanyak, peluang mereka untuk mendapat kursi menjadi tidak pasti ketika menggunakan nomor urut.⁶⁷

Pandangan lain diungkapkan oleh caleg lain, Parsidi, bukan pengurus elit struktural DPC PKB. Pada Pemilu 2009, beliau menempati nomor urut 9. Beliau menyatakan bahwa sistem suara terbanyak menghilangkan kesenjangan antar para Caleg. Kalau menginginkan sebuah demokrasi yang benar, sistem suara terbanyak sesuai. Orang dari luar partai atau orang yang tidak memiliki kekuatan di internal partai, dapat bersaing secara sehat ketika sama-sama menjadi Caleg. Dulu, nomor urut dianggap sebagai penentu jadi dan tidaknya anggota Dewan. Nomor urut 9 dapat dilihat sebagai bukti ketidak berdayaan dalam pengambilan keputusan internal Partai. Sekarang, kemampuan Caleg menjadi penting dalam melakukan kampanye.⁶⁸

Caleg lain, Sumiatun, juga bukan pengurus elit struktural DPC PKB Kabupaten Demak menyatakan bahwa penetapan perolehan kursi berdasarkan suara

⁶⁶ Munhamir, Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Demak, 17 September 2009

⁶⁷ Rizqon Malik Fullesuf, Wakil Ketua DPC Kabupaten Demak, 5 Oktober 2009

⁶⁸ Parsidi, Caleg PKB untuk DPRD Kabupaten Demak, 5 Oktober 2009

terbanyak memberikan harapan baru bagi seorang Caleg yang tidak menempati nomor urut jadi. Namun, prakteknya dapat menyebabkan pertarungan panas. Antar Caleg dalam satu partai dapat saling bersaing, dan dapat memicu ketidak sehatan kompetisi. Penentuan berdasar suara terbanyak semakin memperbanyak terjadinya politik uang. Sebenarnya, sistem suara terbanyak baik untuk diterapkan. Tapi Caleg belum mampu berkompetisi secara sehat. Kalau dipaksakan, maka menyebabkan tindakan-tindakan yang justru tidak sesuai dengan tujuan demokrasi. Uang menjadi penentu. Masyarakat melihat uang sebagai sesuatu yang penting dalam pencalonan. Pertarungan berubah menjadi pertarungan uang.⁶⁹

Dari keempat Caleg yang diusung PKB diatas, juga memunculkan 2 pandangan yang berbeda terkait perubahan sistem pemilu, yakni komentar yang menganggap bahwa penetapan caleg berdasar suara terbanyak adalah sesuatu yang tidak tepat, serta komentar yang menganggap bahwa penetaapan caleg berdasar suara terbanyak adalah sesuatu yang tepat. Namun, bila kita melihat latar belakang structural keempat Caleg diatas, maka dapat diketahui kenapa komentar-komentar tersebut muncul. Rizqon Malik Fullesuf adalah pengurus elit DPC PKB Kabupaten Demak. Secara logika, bila menggunakan mekanisme nomor urut, mereka adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan untuk menjadi anggota Dewan dan ditempatkan pada posisi nomor jadi. Sehingga wajar apabila sistem yang sudah lama berjalan dirubah dengan sistem baru yang tidak berpihak pada mereka, memunculkan komentar-komentar pedas. Sementara itu, bagi caleg yang bukan pengurus elit partai atau caleg yang termarginalkan di partai, seperti mendapatkan angin segar berupa

⁶⁹ Akhmad Rowi, Caleg PKB untuk DPRD Kabupaten Demak, 5 Oktober 2009

kesempatan yang sama dengan Caleg lain. Angin perubahan yang berpihak ke mereka, memunculkan komentar-komentar positif terhadap perubahan sistem tersebut. Namun ada sedikit evaluasi tentang ketidak siapan Caleg untuk berkompetisi secara sehat. Pihak yang berkomentar bahwa sistem suara terbanyak tepat, memberikan catatan tentang ketidak siapan Caleg dalam berkompetisi secara sehat. Semakin banyaknya politik uang diyakini sebagai ketidak siapan Caleg menghadapi sistem suara terbanyak.

Partai Demokrat

Partai Demokrat dianggap sebagai Partai yang sudah siap dari awal untuk menghadapi perubahan sistem pemilu dari nomor urut menjadi kompetisi suara antar Caleg. Hal ini disebabkan karena dari awal tahapan Pemilu, Partai Demokrat sudah mengeluarkan kebijakan penggunaan suara terbanyak untuk calegnya. Sehingga, Partai Demokrat menyambut baik keputusan MK tentang suara terbanyak. Di media, para elit Partai Demokrat pun tidak banyak berkomentar, karna merasa tidak ditugikan dengan perubahan tersebut. Di tingkat Kabupaten Demak muncul berbagai tanggapan.

Seorang Caleg, Giyanto, yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak mengungkapkan bahwa perubahan sistem pemilu dengan suara terbanyak merupakan sesuatu yang sejalan dengan kebijakan partai. Proses penetapan Caleg yang telah dilakukan semakin didukung oleh penggunaan sistem suara terbanyak. Partai Demokrat menginginkan penjaringan Caleg dilakukan secara terbuka. Pengurus structural tidak memiliki prioritas karena posisinya sebagai pengurus.

Makanya mereka tidak selalu menempati nomor urut Caleg jadi. Meskipun dengan suara terbanyak peluang mereka untuk mendapat kursi semakin berkurang, namun ini baik untuk partai di masa datang. Bahwa ada demokrasi di Partai Demokrat⁷⁰

Hal senada diungkapkan oleh Caleg lain, Gihan Supeno, yang juga Wakil Ketua Partai Demokrat Kabupaten Demak. Beliau menyatakan bahwa sistem sekarang dapat menimbulkan konflik Partai. Orang-orang yang telah lama di Partai, memiliki peluang yang sama dengan orang baru atau orang luar partai. Seharusnya orang lama lebih pas mendapatkan kursi. Karena orang lama sudah berpengalaman, dan loyalitasnya jelas. Entah apa jadinya jika orang baru dan orang luar partai berhasil memperoleh kursi DPR. Namun, jika kita melihat ke depan, sistem yang diterapkan di Partai Demokrat akan membawa partai menjadi sebuah partai besar yang mampu bersaing dengan partai-partai lain.⁷¹

Pandangan serupa diungkapkan oleh caleg lain, Wiwik Martini, bukan pengurus elit struktural DPC Partai Demokrat. Pada Pemilu 2009, beliau menempati nomor urut 3. Beliau menyatakan bahwa sistem suara terbanyak memberikan peluang yang sama bagi para Caleg. Bagus untuk sebuah demokrasi. Dapat juga memicu regenerasi di partai. Orang-orang yang sudah tidak mampu membawa kemajuan, tidak dapat dipaksakan lagi menjadi DPR. Hidup dan mati partai ada di DPR. Sehingga partai membutuhkan regenerasi di DPR. Lagian belum tentu orang-orang lama kalah bersaing dengan orang baru. banyak juga orang-orang lama yang berhasil memperoleh kursi.⁷²

⁷⁰ Giyanto, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak, 13 September 2009

⁷¹ Gihan Supeno, Ketua bidang OKK DPC Kabupaten Demak, 15 September 2009

⁷² Wiwik Martini Caleg Partai Demokrat untuk DPRD Kabupaten Demak, 2 Oktober 2009

Caleg lain, Sunandar , juga bukan pengurus elit struktural DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak menyatakan bahwa penetapan perolehan kursi berdasarkan suara terbanyak memberikan harapan baru bagi seorang Caleg yang tidak menempati nomor urut jadi. Namun, prakteknya dapat menyebabkan pertarungan panas. Antar Caleg dalam satu partai dapat saling bersaing, dan dapat memicu pertarungan kotor. Penentuan berdasar suara terbanyak semakin memperbanyak terjadinya suap kepada pemilih. Sebenarnya, sistem suara terbanyak baik untuk diterapkan. Tapi Caleg belum mampu berkompetisi bersih. Sehingga menyebabkan tindakan-tindakan yang tidak terpuji sebagai seorang calon anggota Dewan yang terhormat. Pemain pentingnya adalah Uang. Uang dapat mempengaruhi sikap pemilih. Caleg dan Masyarakat dirasa belum siap menerapkan sistem ini.⁷³

Dari keempat Caleg yang diusung Partai Demokrat diatas, terdapat pandangan yang relative sama terkait perubahan sistem pemilu, yakni komentar yang menganggap bahwa penetapan caleg berdasar suara terbanyak adalah sesuatu yang tepat. Meskipun bila kita melihat latar belakang structural keempat Caleg diatas, dapat diketahui bahwa mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Giyanto dan Gihan Supeno adalah pengurus elit DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak. Sedangkan Wiwik Martini dan Sunandar bukan berasal dari elit partai. Kesamaan pandangan ini disebabkan penetapan strategi suara terbanyak dari awal tahapan pemilu, meskipun belum ada keputusan MK tentang suara terbanyak. Kemudian, soliditas yang ada dalam tubuh Partai Demokrat mempermudah pengurus menerima instruksi partai dari pusat. Meskipun mungkin merugikan dirinya secara pribadi.

⁷³ Sunandar, Caleg Partai Demokrat untuk DPRD Kabupaten Demak, 2 Oktober 2009

Hal itu dapat kita lihat dari posisi nomor urut Caleg Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak. Beliau menempati nomor urut 9. Seorang Ketua Partai menempati nomor urut 9, dibawah orang-orang yang dia pimpin. Pemandangan yang sangat sulit dijumpai di masa-masa yang lalu, bahkan di partai lain di masa sekarang. Intinya, mereka sepakat bahwa sistem suara terbanyak merupakan sistem yang tepat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Partai Gerindra

Perubahan sistem pemilu dari nomor urut menjadi kompetisi suara antar Caleg, tidak menyebabkan Partai Gerindra angkat bicara dalam mengomentari sistem ini. Hal ini disebabkan aorientasi Partai Gerindra adalah memuluskan jalan bagi Pencapresan Prabowo Subianto. Sehingga, Partai Gerindra tidak terlalu mempermasalahkan apakah akan memakai penentuan berdasar nomor urut maupun akan memakai suara terbanyak. Kondisi Partai Gerindra sebagai Partai baru, membuat partai tidak terlalu berakibat. Semisal memakai nomor urut, sebagai partai baru tentu dapat mengukur seberapa maksimal kemampuan diri. Artinya, harapan realistis akan mendapat suara besar masih jauh. Semisal memakai suara terbanyak, Partai Gerindra juga tidak memiliki cukup individu untuk mengisi Caleg.dengan strategi yang telah ditetapkan oleh PDI Perjuangan. Sementara perubahan sistem pemilu terjadi ketika tahapan Pemilu telah berjalan, termasuk penentuan daftar Caleg. Di tingkat Kabupaten Demak muncul berbagai tanggapan.

Seorang Caleg, Kumaidi, yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak mengungkapkan bahwa perubahan sistem pemilu terjadi ketika tahapan

Pemilu sudah berjalan. Partai Gerindra dapat dikatakan tidak mempersiapkan. Di sisi lain, sulitnya mencari orang untuk menjadi Caleg, Partai juga tidak mampu berbuat banyak. Harapan memang ada dari para pengurus untuk menjadi Dewan. Ketika keputusan MK keluar, Caleg menjadi sedikit berkurang semangatnya. Takut kalau dikalahkan Caleg nomor dibawahnya. Persaingan di partai Gerindra tidak terlalu menjadi masalah karena saling menyadari bahwa Partai Gerindra partai baru. mesin-mesin partai juga belum sepenuhnya terbentuk. Apa yang bisa diharapkan semisal menggunakan nomor urut. Hasilnya juga sulit diharapkan.⁷⁴

Hal senada diungkapkan oleh Caleg lain, Djumbadi, yang juga Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak. Beliau menyatakan bahwa sistem sekarang maupun sistem yang dulu, tidak memberikan dampak pada Partai Gerindra. Partai Gerindra belum memiliki orang lama. Semua baru di Gerindra. Sehingga kecil kemungkinan munculnya senioritas dari seorang pengurus terhadap yang lain. Di partai Gerindra, nomor urut 1 bukan berarti pasti jadi. Sehingga tidak terlalu dipermasalahkan. Memang, pada awalnya mereka yang berada di nomor urut 1 diharapkan menjadi anggota Dewan. Tapi juga sulit untuk partai sebaru Gerindra. Bila memakai sistem suara terbanyak, pergerakan nomor urut dari Caleg yang kemudian jadi Dewan, juga tidak penting. Artinya, partai Gerindra memiliki jumlah Caleg sedikit. Mereka mayoritas adalah orang-orang Partai. Dan sama-diharapkan oleh partai untuk jadi anggota Dewan.⁷⁵

Pandangan sama diungkapkan oleh caleg lain, Marmi, bukan pengurus elit struktural DPC Partai Gerindra. Pada Pemilu 2009, beliau menempati nomor urut 3.

⁷⁴ Kumaidi, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak, 17 September 2009

⁷⁵ Djumbadi, Wakil Ketua DPC Kabupaten Demak, 9 Oktober 2009

Beliau menyatakan bahwa sistem suara terbanyak memberikan peluang yang sama bagi para Caleg. Namun di Partai Gerindra, peluang tersebut bukan sesuatu yang sangat berharga. Seperti diketahui Gerindra merupakan Partai baru. sulit diharapkan untuk dipilih rakyat. Sehingga pertarungan antar Caleg tidak terlihat. Bila bertarung, pertarungan akan sulit. Pertama bagaimana memperkenalkan partai. Kedua bagaimana memperkenalkan diri si Caleg. Itu sesuatu yang sulit bila dikalkulasi.⁷⁶

Pendapat sedikit beda dikemukakan Caleg lain, Ahmad Mansur, juga bukan pengurus elit struktural DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak. Beliau menyatakan bahwa peneetapan perolehan kursi berdasarkan suara terbanyak membuat Caleg optimis. Posisi nomor urut tidak lagi menjadi jaminan seorang Caleg pasti jadi anggota Dewan. Di Gerindra instruksi mengarah pada pengkampanyean partai. Tapi kondisi lapangan berkata lain. Seorang caleg mau tidak mau bersaing dengan caleg yang lain. Semua Caleg tentu ingin menjadi anggota Dewan. Penggunaan suara terbanyak justru menolong partai Gerindra. Caleg menjadi bebas mencari suara. Meskipun tujuannya untuk diri sendiri. Namun tetap akan masuk suara partai Gerindra.⁷⁷

Dari keempat Caleg yang diusung Partai Gerindra diatas, terdapat beberapa pandangan yang tidak jauh berbeda terkait perubahan sistem pemilu, yakni komentar mengarah pada ketidakberakibatan. Mereka menilai bahwa apapun sistem yang akan digunakan, bagi Partai Gerindra merupakan sesuatu yang baru. sehingga sikap kecewa maupun senang tidak tampak dari Partai Gertindra ketika Keputusan MK tentang suara terbanyak keluar. Hal ini cukup beralasan karena sebagai partai baru,

⁷⁶ Marmi, Caleg Partai Gerindra untuk DPRD Kabupaten Demak, 9 Oktober 2009

⁷⁷ Akhmad Mansur, Caleg Partai Gerindra untuk DPRD Kabupaten Demak, 9 Oktober 2009

Partai Gerindra juga belum bisa diharapkan dalam identifikasi kepartai, yang menjadi dasar dari mekanisme nomor urut. Caleg-caleg yang diusung oleh Partai Gerindra juga mayoritas pengurus Partai. Sehingga tidak memunculkan kecemburuan dan kecurigaan ketika salah satu berhasil memperoleh kursi anggota Dewan. Arogansi politik dari para pengurus juga tidak nampak di Partai Gerindra. Belum adanya pengurus lama, belum adanya senioritas, menyebabkan hal tersebut. Pada intinya, Partai Gerindra tidak mementingkan apakah memakai mekanisme nomor urut atau memakai mekanisme suara terbanyak. Hal tersebut tampaknya didasari oleh semangat partai yang cenderung lebih mengutamakan citra partai, dalam rangka mewujudkan pencapresan Prabowo Subianto.

5.2.2. Pengarahan Pemilih

Pengarahan pemilih merupakan usaha untuk mempengaruhi pemilih agar memberikan suara. Dalam hal ini, proses tersebut dilakukan oleh Caleg. Bagaimana seorang Caleg mengarahkan pemilih untuk mencentrang namanya. Terdapat berbagai instrument yang sebenarnya dapat membantu Caleg melakukan pengarahan pemilih. Diantaranya adalah mesin partai, hubungan emosional di masyarakat, dan lain sebagainya. Seorang Caleg bisa jadi lebih bisa melakukan pengarahan pemilih lebih maksimal daripada ketika partai yang melakukan pengarahan pemilih. Atau bisa jadi sebaliknya, partai lebih mampu melakukan pengarahan pemilih daripada Caleg. Penggunaan mekanisme suara terbanyak, mendorong seorang Caleg untuk lebih aktif dan lebih independen dalam mengarahkan pemilih. Kepentingan pribadi Caleg

mengalahkan Caleg lain menyebabkan seorang Caleg harus mampu melakukan pengarahan pemilih, baik bersama partai maupun secara mandiri.

5.2.2.1.Pemanfaatan Mesin Partai

Sebuah partai politik memiliki cara kerja yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kepengurusan. Kepengurusan sebuah partai politik terbentuk dari tingkatan pusat hingga tingkatan bawah atau /Kelurahan/Desa. Hirarki kepengurusan ini bekerja sesuai garis instruksi. Letak pusat instruksi berada pada pengurus pusat atau nasional. Ddi sisi lain, sebuah partai politik juga memiliki organisasi-organisasi yang menjadi pendukungnya. Organisasi-organisasi tersebut dibentuk oleh partai politik. Ada juga organisasi-organisasi yang membidani terbentuknya sebuah partai politik. Kesemua organisasi tersebut ada dalam kapasitas sebagai sayap, yakni alat partai untuk masuk ke dalam bidang-bidang lain dalam sosial, semisal perempuan dan pemuda. Jadi, terdapat beberapa infrastruktur yang tersedia dalam sebuah partai politik, yakni kepengurusan dan organisasi sayap. Keduanya bekerja sebagai sebuah sistem yang biasa disebut mesin partai.

Setiap perilaku-perilaku politik partai, kepengurusan dan organisasi-organisasi sayap dapat dijadikan sebagai alat dalam mencapai tujuan politik partai. Begitu juga ketika partai harus menghadapi Pemilu. Partai dapat memanfaatkan kepengurusan dan organisasi sayap untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya, dengan mengoptimalkan kinerja mesin partai tersebut. Dalam hal ini, kinerja berupa usaha-usaha dalam mengarahkan pemilih. Ketika Pemilu 2009 menerapkan sistem suara terbanyak, maka memunculkan actor penting lain yang disebut Calon Anggota

Legislatif. Hasrat Caleg untuk memperoleh suara yang besar, mendorong Caleg untuk mampu mengarahkan pemilih agar memilih Caleg tersebut. Pencapaian tujuan itu dapat dilakukan salah satunya dengan memanfaatkan sistem partai. Bagaimana para Caleg memanfaatkan mesin partai, akan dibahas dibawah ini.

PDIP

PDI Perjuangan Kabupaten Demak dapat dikatakan sebagai partai yang memiliki mesin yang cukup baik. Kepengurusan sudah terbentuk secara mapan hingga tingkat Desa/Kelurahan. PDI Perjuangan Kabupaten Demak juga memiliki organisasi-organisasi sayap. Organisasi-organisasi sayap yang dimiliki adalah Barisan Muda Demokrasi (Bamusi), Taruna Merah Putih (TMP), dan Banteng Muda Indonesia (BMI). Caleg dapat memanfaatkan hal-hal tersebut sebagai jembatan untuk memperoleh dukungan pemilih, dalam bentuk kerjasama antar keduanya. Masing-masing Caleg berbeda penyikapan terkait pemanfaatan infrastruktur mesin partai dalam usaha pribadi mendapatkan suara pemilih.

Mugiyono, seorang Caleg sekaligus Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak mengungkapkan bahwa PDIP memiliki mesin partai yang baik. Kepengurusan kami ada hingga tingkatan paling bawah. Tempat tinggal orang-orang yang berada pada kepengurusan tersebar di dimana-mana. Tidak semua orang-orang tersebut menjadi Caleg. Sehingga mereka dapat dimanfaatkan untuk membantu kampanye disekitar tempat tinggal mereka. Keberadaan mereka sangat membantu kampanye yang dilakukan. Begitu juga Satgas. Satgas sebenarnya lebih memiliki kontribusi, karena biasanya satgas merupakan orang-orang yang di-segani di

komunitasnya. Pelibatan mereka dilakukan dengan pembagian tugas kampanye di masing-masing tempat tinggal mereka. Masing-masing orang diharapkan mampu minimal mendapatkan suara keluarga dan pemilih di kampungnya.

Suntarita, seorang Caleg sekaligus Wakil Sekretaris DPC dan Wakil Sekretaris BP Pemilu PDI Perjuangan Kabupaten Demak mengungkapkan bahwa keberadaan orang-orang partai membantu memaksimalkan keberhasilan kampanye. Caleg tidak akan bisa maksimal tanpa memanfaatkan orang-orang partai di tingkat bawah. Pemanfaatan orang-orang partai sekaligus juga untuk memberi tahu masyarakat bahwa Caleg berasal dari PDIP. Karena, masyarakat biasanya telah mengenal orang-orang disekitar mereka yang menjadi anggota Partai. Artinya, wajah partai di tingkat bawah sebenarnya adalah orang-orang PDIP yang ada di sekitar mereka. Menjual partai masih sangat membantu dalam kampanye. PDIP partai besar, PDIP partai wong cilik, PDIP partai abangan. Hal itu mampu memberi masukan suara yang lumayan. Proses kampanye dilakukan dengan mengajak mereka turut serta. Mendampingi di setiap kampanye. Agar masyarakat tahu bahwa saya didukung oleh orang yang masyarakat kenal.

Eko Nurkhayati, seorang Caleg, bukan pengurus elit struktural DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak mengungkapkan bahwa orang-orang partai biasanya telah terkotak-kotak dalam mendukung Caleg. Semisal ada 2 Caleg yang mencoba mencari suara di tempat yang sama. Maka akan terjadi rebutan dalam mengambil orang-orang partai untuk membantu kampanyenya. Sebagai orang yang bukan berasal dari elit partai, kesulitan untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang partai. Mereka lebih memilih membantu Caleg yang sudah mereka kenal di partai.

Saya tahu bahwa bantuan atau dukungan dari orang-orang partai di kampung sangatlah penting. Tapi itu bukan satu-satunya jalan kampanye. Posisi saya sebagai non elit partai membuat saya memilih cara lain dalam melakukan kampanye. Saya memutuskan tidak terlalu bergantung kepada orang-orang partai.

Akhmad Rowi, juga bukan pengurus elit struktural DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak mengungkapkan hal senada. Beliau menyatakan bahwa loyalitas orang-orang partai masih banyak kepada Caleg-caleg yang berasal dari jajaran pengurus partai. Mungkin itu karena mereka lebih saling kenal daripada dengan Caleg yang berasal dari luar kepengurusan partai. Timbal balik yang orang-orang partai minta, menyebabkan saya sulit mendapatkan bantuan mereka. Mereka mungkin menganggap bahwa saya tidak diharapkan jadi. Dan mungkin juga menganggap saya tidak akan mampu jadi. Pikiran mereka ini menyebabkan saya kesulitan mendapat dukungan mereka. Hanya beberapa orang-orang partai yang membantu saya. Orang-orang tersebut membantu saya karena memang dekat dengan saya, bukan dari partai. Jika seperti ini, maka saya tidak bisa meminta bantuan orang-orang partai berkampanye untuk saya. Saya harus mencari cara lain untuk kampanye pribadi saya.

Terjadi perbedaan dari keempat Caleg diatas dalam memanfaatkan mesin partai untuk melakukan pengarahannya. Caleg-Caleg PDI Perjuangan yang berasal dari pengurus partai, lebih memiliki akses membawa mesin partai, daripada Caleg-caleg yang berasal bukan dari pengurus partai. Hal ini disebabkan ikatan emosional yang telah tercipta diantara Caleg dari pengurus partai, dengan orang-orang partai yang ada ditingkat bawah. Ikatan emosional tersebut terbentuk selama

interaksi antar mereka dalam kegiatan-kegiatan PDI Perjuangan. Bagi Caleg-caleg PDI Perjuangan yang mendapat dukungan dari mesin partai, ada beberapa cara kerja mereka. Pertama, memanfaatkan orang-orang partai di tingkat bawah untuk mengarahkan keluarganya untuk memberikan suara pada Caleg tertentu. Di Desa, seseorang biasanya menjadi bagian dari keluarga besar. Artinya, mereka tentu memiliki banyak saudara. Bila dikelola dengan baik, maka keluarga tersebut akan dapat diarahkan. Kedua, memanfaatkan orang-orang partai untuk mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Keakraban sosial di masyarakat Desa membuat komunikasi antar individu menjadi rutinitas dan keharusan yang setiap saat terjadi. Model interaksi sosial semacam ini dapat mempermudah penyampaian pengarahan pemilih. Forum-forum santai yang biasa terjadi di masyarakat Desa, dapat dimanfaatkan sebagai media pengarahan, dan lebih memungkinkan untuk mudah masuk dalam pikiran pemilih. Ketiga, melibatkan orang-orang partai di tingkat bawah dalam setiap kegiatan kampanye Caleg. Keberadaan mereka di samping Caleg ketika dilihat oleh masyarakat, memunculkan asumsi kuat bahwa Caleg tersebut merupakan Caleg pilihan dari orang yang masyarakat kenal. Proses imitasi perilaku sangat mungkin terjadi dalam sebuah masyarakat tradisional, seperti di Desa. Sebenarnya masyarakat Desa masih tergolong sebagai masyarakat yang belum mampu berfikir rasional terhadap kelemahan dan kelebihan Caleg yang ada dihadapannya.

PKB

PKB Kabupaten Demak sebenarnya dapat dikatakan sebagai partai yang memiliki mesin yang cukup baik. Kepengurusan sudah terbentuk secara mapan

hingga tingkat Desa/Kelurahan. PKB Kabupaten Demak juga memiliki organisasi-organisasi sayap. Organisasi-organisasi sayap yang dimiliki adalah Garda Bangsa, dan Persatuan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB). Meskipun terjadi konflik di internal DPC PKB Kabupaten Demak, hal ini sebenarnya tidak terlalu berakibat buruk pada komunikasi dan hubungan emosional diantara individu-individu di lingkup PKB Kabupaten Demak hingga tingkat bawah. Artinya, konflik hanya terjadi die lit pengurus DPC PKB Kabupaten Demak. Caleg tetap dapat memanfaatkan hal-hal tersebut sebagai jembatan untuk memperoleh dukungan pemilih, dalam bentuk kerjasama antar keduanya. Masing-masing Caleg berbeda penyikapan terkait pemanfaatan infrastruktur mesin partai dalam usaha pribadi mendapatkan suara pemilih.

Munhamir, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Demak mengungkapkan bahwa Partai secara resmi tidak menginstruksikan mesin partai untuk membantu para Caleg PKB. Alasan kenapa kebijakan itu diterapkan adalah kekhawatiran munculnya kecemburuan antar Caleg. Caleg satu mungkin merasa dirinya tidak diberi kesempatan sebagaimana Caleg yang lain. Sangat mungkin itu terjadi. Partai, termasuk mesin partai, adalah milik bersama dan digunakan untuk kepentingan bersama. Melihat kemungkinan adanya persaingan antar Caleg PKB, maka lebih baik partai mengambil kebijakan demikian. Namun, Caleg tetap bisa memanfaatkan orang-orang partai secara pribadi. Artinya, pelibatan orang-orang partai dalam kampanye Caleg, murni hasil komunikasi yang mereka lakukan sendiri. Bukan melalui Partai.

Rizqon Malik Fullesuf, seorang Caleg yang juga Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Demak mengungkapkan bahwa penggunaan orang-orang partai dalam kampanye sangat membantu memperkenalkan diri ke masyarakat. Orang-orang partai biasanya adalah tokoh-tokoh masyarakat. Kadang bukan hanya sekedar tokoh biasa, tapi Kyai. Kyai adalah tokoh spiritual. Masyarakat masih patuh pada Kyai. Apa yang dikatakan oleh Kyai, akan diterima oleh masyarakat. Selain Kyai, orang-orang partai dari garda bangsa biasanya juga dapat membantu kampanye. Mereka orang-orang yang 'gaul' di masyarakat. Bentuk pemanfaatan orang-orang partai dilakukan dengan menunjukkkan diri sebagai Caleg yang direstui Kyai. Setelah restu dari Kyai didapat, selanjutnya tim sukses lah yang mengkampanyekan restu Kyai tersebut. Secara otomatis, masyarakat akan mengikuti apa yang direstui oleh Kyainya. Cara ini lebih efisien.⁷⁸

Parsidi, seorang Caleg yang bukan pengurus elit struktural DPC PKB mengungkapkan kampanye-kampanye dilakukan dengan melibatkan orang-orang partai yang ada di sekitar masyarakat. Posisi saya sebagai bukan orang pengurus partai memang kadang mengganggu pencarian dukungan dari orang-orang partaaai. Tetapi saya memiliki jalur lain untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang partai. Saya telah mengenal dan akrab dengan orang-orang tersebut. Aktifitas mereka di luar partai membuat saya akrab dengan mereka. Meskipun saya juga memberi kompensasi kepada mereka. Pelibatan mereka berupa kampanye-kampanye langsung dari mulut ke mulut. Mereka memperkenalkan saya sebagai orang PKB, dan layak

⁷⁸ Rizqon Malik Fullesuf, Wakil Ketua DPC Kabupaten Demak, 5 Oktober 2009

untuk dipilih. Pada sisi lain, mereka juga kampanye tentang apa yang telah dan akan saya berikan pada masyarakat.⁷⁹

Sumiatun, seorang Caleg yang juga bukan pengurus elit struktural DPC PKB Kabupaten Demak menyatakan sulitnya memperoleh dukungan dari orang-orang partai yang ada di bawah. Saya bukan dari kalangan partai. Sehingga saya kurang mengenal dan dikenal oleh mereka. Komunikasi yang coba saya lakukan untuk mendapat dukungan mereka, ternyata tidak berhasil. Hanya beberapa orang yang bersedia. Mungkin karena mereka tidak dipakai oleh Caleg lain. Bagi saya, dukungan orang-orang partai sangat membantu untuk meraih suara pemilih. Namun bagaimana lagi, saya tidak mendapat dukungan tersebut. Saya melihat, tanpa adanya dukungan dari orang-orang partai, sulit seorang Caleg akan berhasil jadi Dewan. Orang-orang partai dibutuhkan untuk memperkenalkan Caleg kepada konstituen. Karena saya tidak berhasil memperoleh dukungan orang-orang partai, maka saya tidak memanfaatkan mereka dalam kampanye saya.⁸⁰

Penjelasan dari keempat Caleg PKB diatas menunjukkan bahwa juga terjadi kesenjangan dalam kesempatan memanfaatkan mesin partai. Sebagaimana di PDI Perjuangan, Caleg PKB yang berasal dari pengurus PKB lebih memiliki akses untuk memanfaatkan mesin partai. Kesenjangan ini bukan berarti disebabkan oleh sistem partai, namun lebih karena ikatan emosional dan loyalitas terhadap partai. Bagi Caleg-caleg PKB yang memanfaatkan mesin partai, terwujud dalam pemanfaatan tokoh-tokoh spiritual PKB untuk melegitimasi seorang Caleg patut dipilih. Bila seorang Caleg mendapat restu dari Kyai, maka langkah awal proses pengarahannya

⁷⁹ Parsidi, Caleg PKB untuk DPRD Kabupaten Demak, 5 Oktober 2009

⁸⁰ Sumiatun, Caleg PKB untuk DPRD Kabupaten Demak, 5 Oktober 2009

pemilih dapat dikatakan tepat. Di masyarakat Desa seperti di Kabupaten Demak, seorang Kyai masih dijadikan sumber imitasi perilaku tertinggi. Khususnya dalam ranah religious. Dari ranah religious tersebut, masyarakat Desa tidak jarang juga menerapkan ranah dunia sebagai tindak lanjut dari ranah religious. Artinya, apa yang dikatakan oleh seorang Kyai, dianggap kebenaran. Kyai dianggap lebih memahami segala sesuatu. Sehingga masyarakat akan menyandarkan pikirannya pada pikiran Kyai. Dalam hal pengarahan pemilih, restu dari seorang Kyai dapat diartikan sebagai kebenaran dari hasil pemikiran Kyai. Kemudian, publikasi-publikasi tentang perestuan tersebut dapat dilakukan melalui mesin partai yang lain, semisal Garda Bangsa. Kabar tersebut setelah diterima oleh masyarakat, maka akan mudah menanamkan pilihan.

Partai Demokrat

Partai Demokrat Kabupaten Demak sebenarnya dapat dikatakan sebagai partai yang belum memiliki mesin politik yang baik. Meskipun Partai Demokrat sudah mengikuti Pemilu pada Tahun 2004, namun infrastruktur partai belum sepenuhnya terbentuk hingga tingkat bawah. Partai Demokrat Kabupaten Demak juga memiliki organisasi-organisasi sayap. Organisasi-organisasi sayap yang dimiliki adalah Komite Nasional Pemuda Demokrat (KNPD) dan Perempuan Demokrat (PD). Meskipun belum sepenuhnya mapan, namun Partai Demokrat menginstruksikan seluruh elemen Partai Demokrat untuk membantu kemenangan para Caleg Partai Demokrat. Individu-individu partai yang ada di tingkat bawah, diharapkan membantu para Caleg sesuai wilayah di mana mereka tinggal. Masing-masing Caleg berbeda

penyikapan terkait pemanfaatan infrastruktur mesin partai dalam usaha pribadi mendapatkan suara pemilih.

Giyanto, yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak mengungkapkan bahwa penggunaan orang-orang partai sangat membantu kampanye. Orang-orang partai memiliki komunitas yang bermacam-macam. Dan masing-masing kemungkinan memiliki komunitas sosial yang berlainan. Hal ini saya manfaatkan sebaik mungkin untuk mencari suara. Pengurus maupun anggota organisasi sayap Partai Demokrat yang berdomisili di Daerah Pemilihan saya, saya gunakan. Diharapkan, semua orang-orang partai yang saya libatkan, dapat mengkampanyekan saya, setidaknya kepada keluarga mereka. Rata-rata, mereka memiliki keluarga besar. Bukan sekedar keluarga serumah. Hubungan keluarga, saya pandang sebagai jalur bagus untuk mengkampanyekan agar memilih saya.⁸¹

Gihan Supeno, seorang Caleg yang juga Wakil Ketua Partai Demokrat Kabupaten Demak mengungkapkan bahwa Partai telah membagi orang-orangnya untuk membantu para Caleg. Partai mengeluarkan kebijakan tentang pembagian wilayah kampanye di sebuah Daerah Pemilihan. Semisal ada 3 Caleg, dan satu Dapel mencakup 3 kecamatan. Maka pembagian dilakukan dengan masing-masing 1 kecatan untuk digarap. Saya juga mengikuti instruksi tersebut. Namun pada prakteknya, orang-orang partai memiliki pertimbangan pribadi untuk membantu Caleg yang bukan diinstruksikan berdasar pembagian tersebut. Ada Caleg yang mengambil orang-orang partai di kecamatan lain, dan kemudian menggarap kecamatan tersebut. Padahal itu bukan kecamatan yang menjadi bagian Caleg

⁸¹ Giyanto, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak, 13 September 2009

tersebut. Belum mapannya struktur partai hingga tingkat bawah, juga menjadi alasan kenapa saya tidak terlalu bergantung kepada orang-orang partai. Namun, saya tetap memanfaatkan orang-orang partai.⁸²

Wiwik Martini, seorang Caleg yang bukan pengurus elit struktural DPC Partai Demokrat mengungkapkan bahwa pemanfaatan orang-orang partai untuk membantu kampanye sangat penting. Namun, kondisi Partai Demokrat yang belum memiliki orang-orang secara merata di tingkat bawah, membuat saya kesulitan mencari orang-orang Partai yang dapat membantu kampanye saya. Meskipun begitu, saya tetap mempergunakan apa yang ada secara maksimal. Mereka saya dorong untuk mengkampanyekan kepada komunitas mereka, baik keluarga mereka maupun teman-teman mereka. Saya rasa mereka lebih mampu memberikan suara bagi saya, daripada ketika saya turun sendiri kepada masyarakat. Saya hanya perlu berkoordinasi dengan orang-orang partai, dan sesekali turun bersama mereka ke hadapan orang-orang yang mereka bawa.⁸³

Sunandar , seorang Caleg yang juga bukan pengurus elit struktural DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak menyatakan bahwa pemanfaatan mesin partai tidak bisa dilakukan. Saya mengerti tentang pentingnya mesin partai di tingkat bawah. Partai democrat belum memiliki struktur hingga tingkat bawah secara baik. Saya membutuhkan orang-orang partai yang benar-benar berada pada tingkat masyarakat. Karena belum memiliki, maka saya tidak bisa memanfaatkannya. Semisal ada, mungkin hanya satu atau dua orang. Tidak cukup untuk mengatur

⁸² Gihan Supeno, Ketua bidang OKK DPC Kabupaten Demak, 15 September 2009

⁸³ Wiwik Martini Caleg Partai Demokrat untuk DPRD Kabupaten Demak, 2 Oktober 2009

strategi kampanye saya dengan menggunakan mesin partai. Terpaksa, saya mencari jalur lain untuk membantu kampanye saya.⁸⁴

Keempat Caleg Partai Demokrat tersebut mengungkapkan bagaimana pemanfaatan mesin partai. Mereka secara merata memperoleh akses untuk menggunakan mesin partai untuk mengarahkan pemilih. Namun terdapat kendala yang membuat mesin partai tidak mampu dijalankan secara baik. Partai Demokrat Kabupaten Demak belum memiliki mesin partai di tingkat bawah. Sehingga Caleg-caleg Partai Demokrat, secara umum tidak dapat melakukan kampanye melalui mesin partai.

Partai Gerindra

Sebagaimana Partai Demokrat, Partai Gerindra Kabupaten Demak dapat dikatakan sebagai partai yang belum memiliki mesin politik yang baik. Apalagi, Partai Gerindra yang baru berdiri, dan baru mengikuti Pemilu pada Tahun 2009 ini, sehingga infrastruktur partai belum sepenuhnya terbentuk, dan sangat minim hingga tingkat bawah. Partai Gerindra Kabupaten Demak juga belum memiliki organisasi-organisasi sayap. Secara nasional, organisasi-organisasi sayap yang seharusnya dimiliki adalah Persatuan Wanita Indonesia Raya (Perwira), Gardu Prabowo, dan lain-lain. Namun organisasi tersebut belum terbentuk di Kabupaten Demak.

Kumaidi, yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak mengungkapkan bahwa mesin partai belum terbentuk di tingkat bawah. Keberadaan organisasi-organisasi sayap malah justru menjadi benalu bagi Partai maupun Caleg.

⁸⁴ Sunandar, Caleg Partai Demokrat untuk DPRD Kabupaten Demak, 2 Oktober 2009

Partai Gerindra adalah Partai baru. wajar kalau belum memiliki mesin partai sebagaimana mestinya. Keadaan ini membuat saya tidak mungkin menggerakkan mesin partai dalam kampanye saya. Dapat dikatakan, saya tidak menggunakan mesin partai dalam mencari suara.⁸⁵

Djumbadi, seorang Caleg yang juga Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak mengungkapkan bahwa mesin partai tidak bisa digunakan dalam mencari suara. Karena, di Dapel saya, pengurus partai tidak tersusun sempurna. Organisasi-organisasi partai juga belum ada di Dapel saya. Bagaimana mungkin saya bisa memanfaatkan mesin partai. Yang akan dimanfaatkan aja tidak ada. Jadi saya menempuh cara lain di luar partai dalam rangka kampanye.⁸⁶

Marmi, seorang Caleg yang bukan pengurus elit struktural DPC Partai Gerindra menyatakan pemanfaatan orang-orang partai untuk membantu kampanye sangat penting. Namun, kondisi Partai tidak dapat membantu kampanye saya. Meskipun begitu, saya tetap mempergunakan apa yang ada, meskipun 2 atau 3 orang. Keberadaan mereka lebih mampu memberikan suara bagi saya, daripada saya tidak memanfaatkan yang tersedia.

Keempat Caleg Partai Gerindra tersebut mengungkapkan bagaimana pemanfaatan mesin partai. Mereka tidak berbicara mengenai akses untuk menggunakan mesin partai. Mereka sadar akan ketiadaan mesin partai yang bisa mereka harapkan dalam membantu usaha-usaha pengarahannya. Partai Gerindra Kabupaten Demak belum memiliki mesin partai yang berupa kepengurusan maupun

⁸⁵ Kumaidi, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak, 17 September 2009

⁸⁶ Djumbadi, Wakil Ketua DPC Kabupaten Demak, 9 Oktober 2009

organisasi sayap di tingkat bawah. Sehingga Caleg-caleg Partai Gerindra, secara umum tidak dapat melakukan kampanye melalui mesin partai.

5.2.2.3.Pemanfaatan Jaringan Sosial

Menghadapi sistem suara terbanyak, yang memicu persaingan antar Caleg, membuat para Caleg harus mencari jalur lain selain mesin partai. Pemanfaatan jaringan sosial merupakan usaha-usaha para Caleg untuk mengarahkan pemilih dengan memanfaatkan unsure-unsur di luar partai. Jaringan-jaringan sosial yang dimaksud disini meliputi jalur sosial apapun yang dapat dimanfaatkan oleh seorang Caleg. Bentuk jaringan sosial tersebut biasanya adalah hubungan kekerabatan atau persaudaraan, hubungan pertemanan, hubungan kerja, dan lain sebagainya. Bagaimana para Caleg memanfaatkan jaringan di luar mesin partai, akan dijelaskan di bawah ini.

PDIP

PDI Perjuangan Kabupaten Demak tergolong sebagai Partai yang memiliki mesin partai yang baik. Namun mengadapi sistem suara terbanyak, tentu mesin partai menjadi perebutan para Caleg. Sehingga, Caleg-caleg yang tidak berhasil mendapat akses pemanfaatan mesin partai, harus mencari cara lain di luar partai untuk mengarahkan pemilih. Bagi Caleg-caleg yang memperoleh akses pemanfaatan mesin partai, juga tidak cukup bila hanya mengandalkan mesin partai. Mereka juga harus mencari cara lain di luar mesin partai untuk menjaga suara maupun untuk meningkatkan kemungkinan perolehan suara.

Mugiyono, seorang Caleg yang juga Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Demak mengungkapkan bahwa penggunaan jalur kampanye di luar partai tetap dilakukan, meskipun saya yakin mesin partai cukup memberikan saya suara. Di luar partai, saya memanfaatkan keluarga dan saudara-saudara saya untuk mengkampanyekan saya. Sudah pasti, keluarga dan saudara mayoritas mendukung saya dan tentu mau membantu saya kampanye. Saya juga memanfaatkan orang-orang yang secara pribadi loyal kepada saya. Mereka juga mengkampanyekan saya seperti apa yang dilakukan keluarga dan saudara-saudara saya. Mereka mengkampanyekan saya kepada keluarga mereka, serta kepada orang-orang disekitar mereka. Secara rutin, saya bersama mereka melakukan komunikasi terkait perkembangan di lapangan⁸⁷

Hj Suntarita, seorang Caleg yang juga Wakil Sekretaris DPC dan Wakil Sekretaris BP Pemilu PDI Perjuangan Kabupaten Demak mengungkapkan bahwa pemanfaatan mesin partai tidak cukup. Harus menempuh cara-cara lain. Saya memanfaatkan keluarga besar untuk membantu kampanye saya. Mereka saya suruh terlibat dalam penyebaran atribut-atribut kampanye saya. Tapi yang paling penting adalah peran mereka dalam mencari suara. Selain keluarga, saya juga mengambil jalur perkumpulan ibu-ibu pengajian maupun arisan. Saya secara berkala datang menghadiri acara-acara mereka. Dalam kesempatan tersebut, saya mengambil kesempatan berbicara untuk berkampanye. Kompensasi juga saya kemukakan di hadapan mereka. Mungkin bukan hanya saya saja yang melakukan ini, namun

⁸⁷ Mugiyono, Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Demak, 15 September 2009

setidaknya ada beberapa suara yang mungkin mampu saya ambil dari setiap acara yang saya datangi.⁸⁸

Eko Nurkhayati, seorang Caleg yang bukan pengurus elit struktural DPC PDI Perjuangan mengungkapkan pentingnya jalur lain di luar mesin partai. Saya tidak memperoleh cukup akses untuk memanfaatkan mesin partai. Sehingga saya harus mencari jalur lain di luar partai yang mampu memberi suara bagi saya. Pertama tentu jalur keluarga dan saudara-saudara. Saya meminta langsung kepada mereka untuk mendukung. Meskipun itu saudara, saya tetap mendatangi dan meminta langsung kesediaannya untuk mendukung dan membantu saya. Jalur ini saya harap memberi masukan suara yang besar. Karena berarti saya memiliki banyak pencari suara. Saya juga menempuh jalur lain dengan berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung, serta memberikan bantuan-bantuan, baik kepada lembaga maupun kepada individu.⁸⁹

Akhmad Rowi, seorang Caleg yang juga bukan pengurus elit struktural DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak menyatakan bahwa ketiadaan orang-orang partai yang siap membantu, mengharuskan menggunakan cara lain. Saya memanfaatkan tali persaudaraan keluarga untuk memperoleh suara. Saya memiliki anggota keluarga yang cukup besar. Mereka akan secara otomatis memilih saya. Daripada memilih orang lain, lebih baik memilih saudara sendiri. Selain ikatan persaudaraan, saya memanfaatkan tali pertemanan. Saya memiliki cukup banyak teman di Dapel saya. Mereka bersedia membantu saya mengkampanyekan kepada keluarga dan orang-orang lain tentang saya. Mengenai kompensasi atau sumbangan, tentu juga saya

⁸⁸ Hj Suntarita, Wakil Sekretaris DPC dan Wakil Sekretaris BP Pemilu PDI Perjuangan Kabupaten Demak, 2 Oktober 2009

⁸⁹ Eko Nurkhayati, Caleg PDIP untuk DPRD Kabupaten Demak, 4 Oktober 2009

lakukan. Saya kira semua Caleg melakukan pemberian sumbangan. Saya juga harus pintar-pintar memahami kemauan pemilih..⁹⁰

Keempat Caleg PDI Perjuangan di atas seluruhnya menggunakan jalur keluarga dan persaudaraan dalam melakukan kampanye. Mereka sadar betul, keluarga dan saudara merupakan pemilih yang lebih logis untuk memberikan suara dan membantu pengarahannya. Rata-rata Caleg PDI Perjuangan mengakui penggunaan metode pemberian sumbangan, baik kepada lembaga maupun individu, sebagai jalur yang harus mereka lakukan. Pemanfaatan jalur pertemanan juga dilakukan dengan cara menggerakkan teman-teman untuk membantu mengarahkan pemilih di sekitar lingkungan mereka. Pemanfaatan perkumpulan-perkumpulan warga juga menjadi salah satu jalur yang cukup produktif. Pemanfaatan perkumpulan tersebut dapat lebih menekan biaya operasional kampanye. Caleg tidak perlu mengumpulkan masyarakat.

PKB

Sebagaimana PDI Perjuangan, PKB Kabupaten Demak juga tergolong sebagai Partai yang memiliki mesin partai yang baik. Namun menghadapi sistem suara terbanyak, tentu mesin partai menjadi perebutan para Caleg. Partai secara resmi tidak menginstruksikan mesin partai untuk membantu para Caleg PKB. Alasan kenapa kebijakan itu diterapkan adalah kekhawatiran munculnya kecemburuan antar Caleg. Caleg satu mungkin merasa dirinya tidak diberi kesempatan sebagaimana Caleg yang lain. Sangat mungkin itu terjadi. Partai, termasuk mesin partai, adalah milik bersama

⁹⁰ Akhmad Rowi, Caleg PDIP untuk DPRD Kabupaten Demak, 4 Oktober 2009

dan digunakan untuk kepentingan bersama. Sehingga, Caleg-caleg harus mencari jalur kampanye di luar mesin partai, atau secara pribadi mengajak atau meminta dukungan kepada individu-individu yang berasal dari partai. Hubungan emosional antara Caleg dengan orang-orang partai sangat menentukan apakah Caleg mampu didukung secara pribadi oleh orang-orang partai. Namun, mereka juga harus mencari cara lain di luar mesin partai untuk menjaga suara maupun untuk meningkatkan kemungkinan perolehan suara.

Rizqon Malik Fullesuf, seorang Caleg yang juga Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Demak mengungkapkan bahwa pemanfaatan jalur pengajian sangat membantu dalam kampanyenya, disamping jalur keluarga, saudara, teman, dan lain-lain. Sebagai jama'ah pengajian malam jumat di Giri Kusumo, saya memiliki cukup modal untuk mendapatkan suara mereka. Masyarakat yang mengikuti pengajian malam jumat sangat besar. Restu dari Mbah Munif yang telah saya dapat, membuat saya mudah diterima oleh jama'ah yang lain. Kebetulan saya satu-satunya jamaah yang menjadi Caleg. Penampilan-penampilan saya di pengajian Mbah Munif, memperkuat anggapan masyarakat bahwa saya Caleg pilihan Mbah Munif. Orang-orang saya gerakkan untuk menyebarkan dan mengkampanyekan saya. Saya sadar, saya hanya menjual restu dari Mbah Munif, dan tentu saya juga memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat.⁹¹

Parsidi, seorang Caleg yang bukan pengurus elit struktural DPC PKB mengungkapkan kampanye-kampanye dilakukan dengan melibatkan orang-orang di luar partai. Saya cukup dikenal di lingkungan saya. Saya memiliki banyak teman dari

⁹¹ Rizqon Malik Fullesuf, Wakil Ketua DPC Kabupaten Demak, 5 Oktober 2009

berbagai kalangan. Saya meminta kepada mereka agar memilih saya. Beberapa diantara mereka secara aktif membantu kampanye saya. Tidak mungkin semua saya lakukan sendiri. Kemampuan saya terbatas. Mereka membantu saya dengan mengajak keluarga mereka untuk memilih saya. Kemudian mereka juga mengajak orang-orang sekitarnya. Mereka juga mencari saya kumpulan-kumpulan untuk saya datangi. Mereka memperkenalkan saya. Dan saya pun juga menyampaikan visi misi saya. Saya juga memberikan bantuan-bantuan yang bermanfaat bagi masyarakat.⁹²

Sumiatun, seorang Caleg yang juga bukan pengurus elit struktural DPC PKB Kabupaten Demak menyatakan sulitnya mencari jalur di luar partai. Saya merasa tidak mampu menghadapi persaingan panas antar Caleg. Pertama, saya harus menghadapi Caleg dari partai lain. Kedua, saya harus berebut suara dengan sesama Caleg PKB. Dibutuhkan dana banyak untuk melakukan itu. Kemungkinan saya berhasil, kecil. Saya tidak bisa menggunakan orang-orang partai. Saya juga tidak terlalu dikenal. Kesulitan dana kampanye juga saya alami. Sehingga saya memutuskan untuk diam saja. Saya tidak melakukan kampanye. Ibaratnya saya sudah melepas dan mundur. Apalagi yang bisa saya lakukan?. Kalau saya paksakan, akan menghabiskan uang. Sia-sia.⁹³

Dari ketiga Caleg PKB diatas dapat dilihat pentingnya jalur keagamaan dalam melakukan kampanye di luar mesin partai. Hal ini didasari oleh keberadaan PKB yang sudah dikenal sebagai partai Islam dan partainya orang-orang Nahdlatul Ulama. Masyarakat Demak, khususnya di Desa-desa, tergolong sebagai masyarakat NU yang

⁹² Parsidi, Caleg PKB untuk DPRD Kabupaten Demak, 5 Oktober 2009

⁹³ Sumiatun, Caleg PKB untuk DPRD Kabupaten Demak, 5 Oktober 2009

tingkat aktivitas keagamaannya cukup tinggi. Adanya, pengajian-pengajian rutin, serta apresiasi tinggi dari masyarakat, membuat pengajian sangat bagus untuk dimasuki oleh Caleg-Caleg dari PKB. Melalui pengajian-pengajian tersebut, Caleg menghadiri dan memperkenalkan diri. Pencitraan “religious” mereka gunakan, seperti “direstui” Kyai, mempermudah mereka diterima oleh komunitas pengajian. Caleg-caleg juga memanfaatkan ikatan keluarga, saudara, pertemanan, untuk mencari suara bagi dirinya. Gerakan-gerakan kampanye yang Caleg PKB lakukan, rata-rata diarahkan untuk mempublikasikan “restu” yang telah mereka dapat dari Kyai.

Partai Demokrat

Partai Demokrat Kabupaten Demak belum memiliki mesin partai yang bisa diandalkan dalam melakukan pengarahannya. Belum terbentuknya kepengurusan hingga tingkat bawah secara penuh, serta belum terbentuknya organisasi sayap di tingkat bawah, membuat Caleg-caleg Partai Demokrat harus mencari jalur di luar mesin partai untuk mencari suara.

Giyanto, yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak mengungkapkan bahwa cara lain di luar mesin partai sangat dibutuhkan. Keluarga itu dah pasti. Teman atau relasi juga. Kebetulan saya memiliki usaha yang mempekerjakan masyarakat sekitar di Dapel saya. Saya melakukan pendekatan kepada para pekerja untuk memilih saya. Harapannya, mereka akan memilih saya daripada Caleg lain. Mereka mengenal saya karna mereka bekerja kepada saya. Syukur-syukur, mereka bisa mengajak keluarganya untuk memilih saya. Sebelum

hari pemilihan, saya mengumpulkan para pekerja yang menjadi pemilih di Dapel saya. Saya memberikan sembako dan menjanjikan insentif bila saya jadi Dewan.⁹⁴

Gihan Supeno, seorang Caleg yang juga Wakil Ketua Partai Demokrat Kabupaten Demak mengungkapkan bahwa keluarga dapat diandalkan sebagai penyumbang suara. Saya orang asli sini. Saya lahir dan besar di sini. Keluarga saya berasal dari sini. Sehingga keluarga saya banyak berada di sini. Mereka tentu akan memulih saudaranya. Selain meminta dipilih, saya juga meminta bantuan mereka untuk mengkampanyekan saya di lingkungan sekitarnya. Saya menyediakan atribut-atribut kampanye saya. Saya bagikan kepada mereka untuk disebar di lingkungannya. Selain keluarga, saya merasa cukup dikenal. Saya aktif di kegiatan-kegiatan kampung dan Desa. Diharapkan masyarakat melihat keaktifan dan kepedulian saya..⁹⁵

Partai Gerindra

Sebagai partai baru, Partai Gerindra belum memiliki infrastruktur maupun mesin partai yang lengkap dan berfungsi. Caleg-Caleg Partai Gerindra dipastikan tidak dapat memanfaatkan mesin partai, kecuali iklan-iklan partai yang ada di media. Sehingga Caleg-caleg Partai Gerindra harus mencari cara diluar mesin partai untuk memperoleh suara.

Djumbadi, seorang Caleg yang juga Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak mengungkapkan bahwa usaha pribadi Caleg sangat menentukan dalam perolehan suara. Saya mantan lurah di sini. Saya memiliki pengalaman

⁹⁴ Giyanto, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak, 13 September 2009

⁹⁵ Gihan Supeno, Ketua bidang OKK DPC Kabupaten Demak, 15 September 2009

mencari suara saat saya calonan lurah. Pemilu kali mirip dengan calonan lurah. Persaingan antar calon. Apa yang saya lakukan saat calonan lurah, saya terapkan pada kampanye ini. saya cukup dikenal di Desa saya dan desa-desa sekitar sebagai seorang mantan lurah. \Disini lurah sangat dihormati. Langkah yang saya lakukan, saya menyusun gapit-gapit (tim sukses) di tiap-tiap daerah yang saya incar. Pendekatan-pendekatan emosional seperti mendatangi kumpulan mereka, berbaur dengan mereka, bahkan melakukan apa yang mereka lakukan, semisal ikut nongkrong hingga larut. Kalau mengenai memberi uang, itu pasti. Uang dibagikan melalui para gapit.⁹⁶

Marmi, seorang Caleg yang bukan pengurus elit struktural DPC Partai Gerindra menyatakan saudara, keluarga, dan masyarakat sekitar adalah penting. Keluarga dan saudara-saudara pasti memilih jika tahu ada saudaranya yang jadi Caleg. Dari mulut ke mulut, mereka akan tahu bahwa saya jadi Caleg. Saya berkampanye bersama orang-orang yang membantu saya. Mereka rata-rata adalah keluarga dan teman saya. Mereka saya bagi per wilayah tertentu. Tugas mereka adalah mengkampanyekan saya dan mencari acara-acara yang bisa saya datangi untuk kampanye. Saya tidak membuat acara khusus untuk kampanye saya. Tapi saya memanfaatkan acara yang sudah ada di masyarakat.

Dari kedua Caleg Partai Gerindra di atas, dapat diketahui cara apa saja yang mereka lakukan di luar partai dalam rangka mengarahkan pemilih untuk memilih dirinya. Caleg mengandalkan suara dari keluarga, saudara, dan orang-orang sekitar. Caleg juga memanfaatkan forum-forum yang ada dan sudah berjalan di masyarakat,

⁹⁶ Djumbadi, Wakil Ketua DPC Kabupaten Demak, 9 Oktober 2009

sebagai media kampanye. Yakni dengan mendatangi forum-forum tersebut, kemudian meminta waktu untuk berbicara dalam rangka mengkampanyekan dirinya. Materi kampanye biasanya disesuaikan dengan kebutuhan forum tersebut, semisal forum pengajian maka dijanjikan perlengkapan pengajian. Caleg juga melakukan pembagian uang kepada pemilih. Pembagian tidak dilakukan langsung oleh Caleg, namun melalui orang-orang kepercayaan Caleg.

Tabel Kesimpulan 5.2

No	Partai	Fokus	
		Akses Pemanfaatan Mesin ataupun Individu Partai	Kemandirian mobilisasi
1	PDIP	Caleg berasal dari internal Partai lebih mudah mengakses.	Caleg lebih merasa sebagai pihak yang bertindak secara mandiri
2	PKB	Caleg berasal dari internal Partai lebih mudah mengakses.	Caleg lebih merasa sebagai pihak yang bertindak secara mandiri
3	PARTAI DEMOKRAT	Keterbatasan mesin partai membuat Caleg tidak mengincar mesin ataupun individu partai	Caleg lebih merasa sebagai pihak yang bertindak secara mandiri
4	PARTAI GERINDRA	Keterbatasan mesin partai membuat Caleg tidak mengincar mesin ataupun individu partai	Caleg lebih merasa sebagai pihak yang bertindak secara mandiri

5.3. Dinamisasi Partai Dan Caleg

Sistem Pemilihan proporsional terbuka yang dipakai pada Pemilu 2009, mendorong terjadinya aktivitas lebih oleh para Calon anggota legislative. Kondisi ini membuat kita mengkoreksi hubungan antara Partai sebagai institusi, dengan Calon anggota legislative dari Partai tersebut. Ketika Pemilu sebelum Pemilu 2009, Calon anggota legislative tampak menjadi bagian atau sub ordinan dari tahapan-tahapan Pemilu yang dilalui oleh sebuah Partai. Hal ini disebabkan karena sistem pemilu yang dipakai menempatkan Partai sebagai focus utama yang harus dilihat oleh pemilih. Partai benar-benar menjadi satu-satunya peserta Pemilu. Namun, pada Pemilu 2009, sistem pemilu yang digunakan mengharuskan pemilih berfokus pada 2 hal, yakni kepada Partai sebagai sebuah institusi, dan Calon anggota legislative sebagai kandidat. Sehingga muncul 2 aktor, yang sebenarnya adalah satu kesatuan. Peserta Pemilu 2009 adalah tetap Partai Politik, bukan Calon Anggota Legislatif. Meskipun, bila mengacu pada Sistem Pemilu yang digunakan, muncul variable baru yang secara otomatis terdorong untuk mengubah dirinya sebagai actor, yakni Calon anggota Legislatif.

Mekanisme penentuan calon anggota legislative yang berhak menduduki kursi yang diperoleh oleh Partainya, membuat Calon legislative masuk pada persaingan antar Calon anggota legislative pada Partai dan Daerah Pemilihan yang sama. Kondisi ini memunculkan persaingan yang lebih luas pada pertarungan antar Caleg antar Partai. Besarnya tingkat persaingan antar Calon anggota legislative dapat menurunkan tingkat persaingan antar lembaga Partai. Sehingga persaingan antar Calon anggota legislative menjadi lebih terlihat. Pada situasi ini, posisi Partai

terhadap Calon anggota Legislatif, atau pun sebaliknya, menjadi sesuatu yang menarik untuk dilihat. Gambaran umum

Penjelasan situasi sebagaimana di atas, memberi cukup gambaran tentang apa yang bisa dilakukan oleh lembaga Partai dalam melakukan mobilisasi pemilih yang mengarah pada perolehan suara, dan keterbatasan lembaga Partai untuk tetap tampil dalam usaha-usaha mobilisasi pemilih. Lembaga Partai sebagai peserta Pemilu dapat memanfaatkan posisinya untuk mengendalikan setiap tahapan Pemilu yang dilalui, serta dapat melakukan usaha-usaha pencitraan Partai yang mengarah pada penguatan identitas kepartaian. Pada sisi yang lain, jika tidak sanggup mengelola hal tersebut dengan baik, lembaga Partai akan tenggelam pada pertarungan antar Calon anggota Legislatif dalam mencitrakan dirinya yang bertujuan pada mobilisasi pemilih untuk memilih dirinya. Di sini lah letak pangkal keterbatasan Partai.

Lembaga Partai memang sebagai satu-satunya peserta Pemilu, artinya Partai merupakan actor. Namun pada pelaksanaan Sistem Pemilu 2009, secara otomatis muncul actor lain, yakni Calon Anggota Legislatif, meskipun bila mengacu pada perundang-undangan Calon Anggota Legislatif bukanlah peserta Pemilu. Jumlah lembaga Partai yang menjadi peserta Pemilu 2009 adalah 48, jauh lebih sedikit dari jumlah Calon Anggota Legislatif yang muncul. Sehingga sangat berpotensi melemahkan Lembaga Partai dalam pertarungan mobilisasi pemilih. Pada pembahasan berikut, akan dilihat bagaimana lembaga Partai memposisikan dirinya pada usaha-usaha mobilisasi pemilih.

PDIP

Melihat kondisi PDIP Kabupaten Demak sebagaimana dijelaskan pada pembahasan terdahulu, PDIP Kabupaten Demak, sebagai sebuah lembaga tidak memiliki banyak pilihan untuk muncul sebagai actor penting dalam melakukan mobilisasi pemilih. Pada awal-awal tahapan Pemilu, PDIP tetap meyakini penggunaan nomor urut yang berimbang pada penguatan identifikasi kepartaian di setiap usaha-usaha mobilisasi pemilih. Ketika sistem suara terbanyak diterapkan, PDIP juga tetap memfokuskan kampanye pada penguatan identifikasi kepartaian. Hal tersebut terlihat dari himbauan-himbauan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk mencentang Partai. Pencantangan logo atau nomor Partai menunjukkan bahwa Partai menginginkan sebuah peran lebih dominan dalam melakukan mobilisasi pemilih. Dominasi tersebut tercermin dari focus mobilisasi berdasar identifikasi kepartaian. Secara tidak langsung, sikap PDIP ini mencoba mempertahankan mekanisme-mekanisme mobilisasi yang telah dijalankan pada Pemilu-pemilu sebelumnya, dan berusaha tidak terjebak dan masuk pada arus yang berkembang terkait sistem suara terbanyak.

Ketua Umum sebagai representasi Lembaga PDIP, tentunya juga diikuti oleh lembaga PDIP di segala tingkatan, termasuk DPC PDIP Kabupaten Demak. Hingga masa-masa pemungutan suara, DPC PDIP tetap mengambil sikap sebagai actor yang aktif dalam setiap tahapan Pemilu, termasuk dalam memobilisasi pemilih. Sikap ini salah satunya dapat dilihat dari pernyataan Sekretaris DPC PDIP, Mugiyono.

“Kami mendukung dan membantu Caleg-caleg. Partai mem-back up mereka. Mesin partai dikerahkan untuk itu. Barisan Muda Demokrasi (Bamusi), Taruna Merah Putih (TMP), dan Banteng Muda Indonesia (BMI) semua diminta untuk mensukseskan kampanye”⁹⁷

Artinya, DPC PDIP tidak akan melepas atau diam dalam proses perolehan suara dan memenangkan Partai. Bentuk dari sikap DPC PDIP Kabupaten Demak ini adalah memberikan penyuluhan kepada para Calon terkait bagaimana memperoleh suara. Pemenuhan atribut-atribut Partai pada masa-masa kampanye. Di beberapa daerah, semisal di Guntur, keberadaan bendera PDIP cukup mendominasi dibanding Partai-partai yang lain. Artinya, PDIP sebagai sebuah lembaga ingin tetap berperan dalam pengarahannya. Ketika partai-partai lain lebih fokus pada atribut-atribut Calon anggota legislative, yakni terwujud dari minimnya atribut Partai, Lembaga PDIP tetap percaya diri pada kemampuan PDIP dalam mengambil suara pemilih melalui identifikasi kepartaian yang dianggap kuat.

Bedasarkan hasil wawancara terhadap Calon Anggota legislative dari PDIP, diketahui bagaimana praktek sinkronisasi yang terjadi antara Partai dengan Calon. Sutarita, seorang Caleg sekaligus Wakil Sekretaris DPC dan Wakil Sekretaris BP Pemilu PDI Perjuangan Kabupaten Demak mengungkapkan bahwa sikap Partai yang mengambil peran dalam setiap mobilisasi pemilih, tercermin dari instruksi partai terhadap elemen-elemen Partai di tingkat bawah untuk membantu kampanye Calon.

“Caleg tidak akan bisa maksimal tanpa memanfaatkan orang-orang partai di tingkat bawah. Pemanfaatan orang-orang partai sekaligus juga untuk

⁹⁷ Mugiyono, Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Demak, 15 September 2009

memberi tahu masyarakat bahwa Caleg berasal dari PDIP. Karena, masyarakat biasanya telah mengenal orang-orang disekitar mereka yang menjadi anggota Partai. Artinya, wajah partai di tingkat bawah sebenarnya adalah orang-orang PDIP yang ada di sekitar mereka. Menjual partai masih sangat membantu dalam kampanye. PDIP partai besar, PDIP partai wong cilik, PDIP partai abangan. Hal itu mampu memberi masukan suara yang lumayan. Proses kampanye dilakukan dengan mengajak mereka turut serta. Mendampingi di setiap kampanye. Agar masyarakat tahu bahwa saya didukung oleh orang yang masyarakat kenal. Partai memang secara resmi meminta seluruh kekuatan partai bekerja bersama-sama memenangkan pemilu”⁹⁸

Namun, keterangan yang berbeda diberikan oleh Eko Nurkhayati, seorang Caleg, bukan pengurus elit struktural DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak.

“Orang-orang partai biasanya telah terkotak-kotak dalam mendukung Caleg. Semisal ada 2 Caleg yang mencoba mencari suara di tempat yang sama. Maka akan terjadi rebutan dalam mengambil orang-orang partai untuk membantu kampanyenya. Sebagai orang yang bukan berasal dari elit partai, saya kesulitan untuk mendapatkan dukungan mereka. Mereka lebih memilih membantu Caleg yang sudah mereka kenal di partai.”⁹⁹

Dari keterangan tersebut diketahui ketidak mampuan Partai untuk mendistribusikan mesin partainya secara merata kepada masing-masing Calon

⁹⁸ Hj Suntarita, Wakil Sekretaris DPC dan Wakil Sekretaris BP Pemilu PDI Perjuangan Kabupaten Demak, 2 Oktober 2009

⁹⁹ Eko Nurkhayati, Caleg PDIP untuk DPRD Kabupaten Demak, 4 Oktober 2009

anggota legislative. Meskipun instruksi partai jelas bahwa mesin partai harus dapat dimanfaatkan oleh semua calon, pada prakteknya terjadi ketimpangan.

Ketimpangan yang terjadi pada harmonisasi antara Partai dengan Calon dalam mobilisasi pemilih, setidaknya terjadi karena beberapa alasan. Pertama, DPC PDIP Kabupaten Demak tidak melakukan evaluasi secara simultan terkait dengan konsolidasi di tingkat bawah. Partai tidak mampu menjangkau aktivitas yang terjadi di tingkat bawah. Hal tersebut diketahui dari pernyataan Sekretaris DPC PDI Kabupaten Demak, Mugiyono, bahwa Partai tidak dapat memastikan apakah mesin Partai ditingkat bawah bekerja secara adil ketika membantu para Calon. Kesibukan para pengurus harian DPC PDIP Kabupaten Demak, yang juga menjadi Calon anggota legislative, membuat lembaga Partai tidak maksimal melakukan sikapnya. Kedua, Calon anggota Legislatif yang diusung oleh DPC PDIP Kabupaten Demak tidak sepenuhnya berasal dari pengurus Partai. Hal ini merupakan konsekuensi dari sikap Partai di awal-awal tahapan pemilu yang memakai sistem nomor urut, serta terjadinya praktek jual beli nomor urut. Terdapatnya beberapa Calon dari luar Partai mengindikasikan praktek tersebut. Akibatnya, mereka tidak memiliki cukup hubungan emosional dengan individu-individu yang ada pada mesin partai, serta tidak memahami bagaimana mengelola mesin partai.

PKB

Bila melihat pada struktur dan citra Partai, DPC PKB Kabupaten Demak mampu berperan aktif dalam memobilisasi pemilih. Struktur lembaga Partai terbentuk hingga tingkat Kelurahan/Desa, pengurus harian maupun lembaga-lembaga

sayap partai. Citra PKB di Kabupaten Demak juga terbilang kuat. Hal tersebut dapat dilihat dari perolehan suara PKB pada Pemilu 2004 dan kemenangan Calon yang diusung PKB pada Pilkada Demak. Sebagaimana PDIP, PKB pada awal-awal tahapan Pemilu juga menganut mekanisme nomor urut yang berdasar pada identifikasi kepartaian. Namun, mekanisme suara terbanyak diterapkan dalam Sistem Pemilu 2009, PKB cenderung diam dan tidak mengambil sikap. Hal ini bisa jadi disebabkan terpecahnya konsentrasi PKB, yang juga dihadapkan pada konflik-konflik internal di tingkat DPW maupun DPC terkait kepemimpinan ganda dan pengajuan Caleg ganda ke KPU.

DPC PKB Kabupaten Demak mengambil sikap untuk tidak berperan aktif dalam mobilisasi pemilih. Artinya, DPC PKB Kabupaten Demak sebagai lembaga tidak akan mencampuri kampanye yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif yang diusungnya. Kebijakan ini tercermin dari pernyataan Sekretaris PKB Kabupaten Demak, Munhamir,

“Organisasi-organisasi tersebut (organisasi sayap) memang sengaja tidak dilibatkan dalam Pemilu 2009. Karena, organisasi-organisasi tersebut adalah milik partai. Makanya Partai menyerahkan kampanye pada Caleg. Soalnya, pemanfaatan organisasi-organisasi tersebut hanya akan menimbulkan kecemburuan diantara para Caleg”¹⁰⁰.

Hal senada juga diungkapkan oleh Naim, pengurus Garda Bangsa Kabupaten Demak.

¹⁰⁰ Munhamir, Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Demak, 17 September 2009

“Garda Bangsa tidak diajak dalam kampanye. Sama sekali tidak. Oleh partai maupun oleh Caleg.”¹⁰¹

Kecemburuan yang ditakutkan adalah berupa kekecewaan tidak terakomodirnya kepentingan Calon lain ketika sebuah kegiatan mobilisasi pemilih dilakukan oleh Partai, sementara Calon yang laen diuntungkan secara pribadi. Namun, tampaknya sikap yang diambil DPC PKB Kabupaten Demak tidak hanya didasarkan pada alasan tersebut. Konflik internal yang terjadi di DPC Kabupaten Demak merupakan penyebab utamanya. Konflik tersebut melumpuhkan mesin Partai, berupa terpecahnya afiliasi kepengurusan yang menjalar ke tingkat kepengurusan PAC maupun Ranting. Sebagaimana pembahasan terdahulu, hingga Pemilu 2009, kepengurusan DPC Kabupaten Demak merupakan kepengurusan gabungan antara kubu Muhaimin dan Kubu Gus Dur. Di tingkat PAC dan Ranting, juga muncul afiliasi yang beragam. Sebagian loyal terhadap individu-individu Kubu Muhaimin, dan sebagian loyal terhadap individu-individu kubu Gus Dur. Imbasnya, bila mesin Partai digerakkan, maka ketakutan akan munculnya kecemburuan sangat mungkin terjadi. Calon anggota Legislatif PKB di sebuah Dapel terdiri dari Calon yang berasal dari kedua kubu. Sementara mesin partai yang tersedia dalam sebuah Dapel sudah terkotak pada salah satu kubu.

Namun, pada praktek mobilisasi pemilih, Calon anggota legislative PKB menyatakan hal yang berbeda-beda mengenai apa yang dilakukan oleh partai. Rizqon Malik Fullesuf, seorang Caleg yang juga Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Demak.

¹⁰¹ Naim, Pengurus Garda Bangsa Kabupaten Demak

“Orang-orang partai biasanya adalah tokoh-tokoh masyarakat. Kadang bukan hanya sekedar tokoh biasa, tapi Kyai. Kyai adalah tokoh spiritual. Masyarakat masih patuh pada Kyai. Apa yang dikatakan oleh Kyai, akan diterima oleh masyarakat. Selain Kyai, orang-orang partai dari garda bangsa biasanya juga dapat membantu kampanye. Mereka orang-orang yang ‘gaul’ di masyarakat. Bentuk pemanfaatan orang-orang partai dilakukan dengan menunjukkan diri sebagai Caleg yang direstui Kyai. Setelah restu dari Kyai didapat, selanjutnya tim sukses lah yang mengkampanyekan restu Kyai tersebut. Secara otomatis, masyarakat akan mengikuti apa yang direstui oleh Kyainya. Saya sangat terbantu.”¹⁰²

Hal senada juga diungkapkan Parsidi, seorang Caleg yang bukan pengurus elit struktural DPC PKB.

“Posisi saya sebagai bukan orang pengurus partai memang kadang mengganggu pencarian dukungan dari orang-orang partai. Tetapi saya memiliki jalur lain untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang partai. Saya telah mengenal dan akrab dengan orang-orang tersebut. Aktifitas mereka di luar partai membuat saya akrab dengan mereka. Meskipun saya juga memberi kompensasi kepada mereka. Pelibatan mereka berupa kampanye-kampanye langsung dari mulut ke mulut. Mereka memperkenalkan saya sebagai orang PKB, dan layak untuk dipilih. Pada sisi lain, mereka juga

¹⁰² Rizqon Malik Fullesuf, Wakil Ketua DPC Kabupaten Demak, 5 Oktober 2009

*kampanye tentang apa yang telah dan akan saya berikan pada masyarakat”.*¹⁰³

Keterangan kedua calon tersebut menunjukkan bahwa meskipun Partai tidak menginstruksikan mesin partainya untuk membantu kampanye para Calon, mesin partai tetap dapat dimanfaatkan oleh para Calon. Namun, hal ini tidak dapat dikatakan bahwa Partai secara lembaga mengambil peran, karena partai secara tegas mengambil kebijakan lepas tangan terhadap mobilisasi pemilih. Keberhasilan kedua calon dalam bersinergi dengan mesin partai, setidaknya disebabkan beberapa alasan. Pertama, Hubungan emosional yang sudah terbentuk antara Calon dengan individu-individu mesin partai. Hubungan emosional ini dapat terbentuk dari aktivitas partai maupun di luar partai. Hubungan tersebut tentunya tidak akan terpotong oleh sebuah sikap partai yang lepas tangan. Hubungan emosional yang sudah terjalin ini kemudian berubah menjadi hubungan kerjasama terkait pengarahan pemilih. Kemampuan individu-individu mesin partai, termanfaatkan secara otomatis oleh masing-masing individu. Kedua, kebutuhan individu-individu mesin partai untuk terlibat dalam mobilisasi pemilih. Antusiasme yang muncul dari orang-orang partai, menyebabkan mesin partai seakan bergerak. Motivasi yang muncul adalah bermacam-macam, seperti kesadaran kepartaian, membantu kawan, hingga motivasi finansial. Kemudian, Calon memanfaatkan motivasi mereka untuk membantu mobilisasi pemilih

¹⁰³ Parsidi, Caleg PKB untuk DPRD Kabupaten Demak, 5 Oktober 2009

Partai Demokrat

Sejak awal-awal tahapan Pemilu, Partai Demokrat telah mengambil sikap mengoptimalkan dua jalur mobilisasi pemilih. Pertama, Partai Demokrat dalam beberapa kesempatan memperkuat identifikasi kepartaian. Usaha-usaha tersebut diantaranya tercermin dari klaim-klaim Partai terhadap keberhasilan Pemerintahan SBY 2004-2009. Iklan-iklan kampanye Partai Demokrat juga muncul di beberapa media elektronik maupun cetak. Bahkan, iklan Partai Demokrat terbilang paling tinggi dibanding iklan-iklan Partai yang lain. Pesan yang coba ditampilkan oleh Partai Demokrat adalah Partai yang secara lembaga mampu diharapkan dan telah berhasil melakukan pembangunan Indonesia. Kedua, Partai Demokrat memaksimalkan peran Calon anggota legislative dalam mobilisasi pemilih. Usaha-usaha tersebut diantaranya tercermin dari kebijakan penggunaan suara terbanyak sebelum keputusan suara terbanyak dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Keputusan Partai Demokrat ini mendorong kompetisi aktif antar Calon anggota legislative untuk menggalang suara sebanyak-banyaknya bagi Calon itu sendiri. Sehingga pada ujungnya memberikan kontribusi suara pada Partai Demokrat.. Usaha lain yang dilakukan adalah dengan menampilkan Calon-calon anggota legislatif yang sudah populer di masyarakat.

Di tingkat DPC Kabupaten Demak, sikap tersebut juga diikuti. DPC Partai democrat secara lembaga juga berusaha mengambil peran penting dalam mobilisasi pemilih. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak menyatakan:

“Partai Demokrat pada masa kampanye mengadakan sepeda santai. Tujuannya untuk menarik simpati masyarakat dan mempopulerkan partai Demokrat. Peserta sepeda santai keder-kder dan masyarakat umum.”¹⁰⁴

Di sisi lain, Beliau juga mengungkapkan bahwa Partai menyerahkan kampanye Calon anggota legislative pada diri masing-masing Calon, serta mendorong kemandirian kampanye para Calon anggota legislatif. Namun, kemandirian Calon dalam berkampanye diatur oleh Partai. Menurut Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak, Gihan Supeno, Partai membagi area-area kampanye di tiap-tiap area per tiap-tiap calon.

“Partai telah membagi orang-orangnya untuk membantu para Caleg. Partai mengeluarkan kebijakan tentang pembagian wilayah kampanye di sebuah Daerah Pemilihan. Semisal ada 3 Caleg, dan satu Dapel mencakup 3 kecamatan. Maka pembagian dilakukan dengan masing-masing 1 kecamatan untuk digarap. Saya juga mengikuti instruksi tersebut. Namun pada prakteknya, orang-orang partai memiliki pertimbangan pribadi untuk membantu Caleg yang bukan diinstruksikan berdasar pembagian tersebut. Ada Caleg yang mengambil orang-orang partai di kecamatan lain, dan kemudian menggarap kecamatan tersebut. Padahal itu bukan kecamatan yang menjadi bagian Caleg tersebut. Belum mapannya struktur partai hingga tingkat bawah, juga menjadi alasan kenapa saya tidak terlalu

¹⁰⁴ Giyanto, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak, 13 September 2009

*bergantung kepada orang-orang partai. Namun, saya tetap memanfaatkan orang-orang partai.*¹⁰⁵

. Hal ini menunjukkan bahwa DPC Partai Demokrat sejalan dengan sikap DPP Partai Demokrat, yakni memanfaatkan jalur identifikasi kepartaian dan memanfaatkan jalur kompetisi antar Calon anggota legislative dalam pengarahannya pemilihan. Atribut-atribut Partai Demokrat, semisal bendera Partai, juga cukup mendominasi diantara atribut-atribut Calon anggota legislative. Artinya, pemilihan diberikan dua pilihan. Yakni memberikan suara karna percaya terhadap Partai Demokrat, atau memberikan suara karna percaya terhadap Calon-calon anggota legislative dari Partai Demokrat.

Dari sudut pandang harmonisasi antara Partai dan Calon, Wiwik Martini, seorang Caleg yang bukan pengurus elit struktural DPC Partai Demokrat mengungkapkan keadaan mesin partai.

“Kondisi Partai Demokrat yang belum memiliki orang-orang secara merata di tingkat bawah, membuat saya kesulitan mencari orang-orang Partai yang dapat membantu kampanye saya. Meskipun begitu, saya tetap mempergunakan apa yang ada secara maksimal. Mereka saya dorong untuk mengkampanyekan kepada komunitas mereka, baik keluarga mereka maupun teman-teman mereka. Saya rasa mereka lebih mampu memberikan suara bagi saya, daripada ketika saya turun sendiri kepada masyarakat. Saya

¹⁰⁵ Gihan Supeno, Ketua bidang OKK DPC Kabupaten Demak, 15 September 2009

hanya perlu berkoordinasi dengan orang-orang partai, dan sesekali turun bersama mereka ke hadapan orang-orang yang mereka bawa.¹⁰⁶

Keterangan diatas menunjukkan bagaimana harmonisasi terjadi antara Partai dengan Caleg dalam mobilisasi pemilih. Partai Demokrat hanya menentukan strategi bagaimana mencari suara, yakni dengan kebijakan membagi area-area kampanye per calon anggota legislative. Strategi ini untuk memaksimalkan kerja Calon. Bagi Partai, hal ini tepat. Karena Partai akan mendapatkan suara yang tersebar, yang cenderung akan memperbesar perolehan suara partai. Namun, bagi Calon hal ini bukanlah strategi yang menguntungkan. Mekanisme suara terbanyak, yang mendorong persaingan antar Caleg, membuat seorang Calon bergerak melewati batas. Seorang Calon tentu tidak mau kalah dari Calon yang lain dari partai dan Dapel yang sama. Dari sini terlihat ketidak berfungsi peran partai dalam mengawal kebijakannya. Pada peran lain, terkait praktek mobilisasi yang dilakukan para Calon, Partai sudah menyatakan sikap tidak mencampuri kampanye masing-masing calon. Partai hanya berhenti pada strategi membagi area-area kampanye.

Partai Gerindra

Partai Gerindra muncul sebagai sebuah partai baru, dan mencitrakan dirinya sebagai partai yang muncul akibat ketidak percayaan masyarakat terhadap Partai lama, serta partai yang mampu dipercaya membawa perubahan Indonesia. Berawal dari hal tersebut, maka secara umum Partai Gerindra mengambil jalur identifikasi

¹⁰⁶ Wiwik Martini Caleg Partai Demokrat untuk DPRD Kabupaten Demak, 2 Oktober 2009

kepartaian sebagai jalur pengarahannya pemilih. Terdapat beberapa hal yang menunjukkan sikap tersebut. Pertama, Partai Gerindra secara rutin melakukan iklan-iklan melalui media. Sebagai Partai baru, Partai Gerindra mendominasi iklan partai dibanding partai-partai baru yang lain. Tujuan dari iklan tersebut adalah memperkenalkan keberadaan partai. Kedua, keberadaan Prabowo Subianto dalam iklan-iklan partai. Hal tersebut menunjukkan bahwa Partai Gerindra mencoba membangun figur partai melalui figur seorang Prabowo Subianto. Sebagaimana sudah diketahui umum, Prabowo Subianto dianggap sebagai seorang militer yang tegas, seorang pengusaha kaya, serta seorang yang diyakini memiliki karakteristik mantan Presiden Soeharto. Dengan kata lain, Partai Gerindra juga ingin mencitrakan dirinya sebagai partai tegas dan berwibawa. Ketika keputusan MK tentang suara terbanyak diterapkan pada Pemilu 2009, Partai Gerindra tetap melanjutkan sikap mengambil jalur identifikasi kepartaian dalam mobilisasi pemilih.

Sikap serupa juga diikuti oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak. Partai Gerindra Kabupaten Demak mengambil peran aktif dalam setiap usaha mobilisasi pemilih. Menurut Wakil Ketua Partai Gerindra, Sulukhil Hammi.

“Partai menyediakan kebutuhan-kebutuhan dalam mobilisasi pemilih, baik yang dilakukan oleh partai maupun yang dilakukan oleh Caleg. Kebutuhan-kebutuhan tersebut di antaranya adalah bendera, kaos, dan logistic kampanye lainnya. Partai tidak mau berhutang budi pada Caleg.”¹⁰⁷

¹⁰⁷ Sulukhil Hammi, Wakil Ketua DPC Kabupaten Demak, 15 September 2009

Artinya, Partai tetap ingin berada di atas dan sebagai payung bagi Calon-calon anggota legislatifnya. Harapannya, ketika seorang Calon berhasil mendapat kursi Dewan, maka akan tetap loyal kepada lembaga partai, dan berusaha menekankan bahwa keberhasilan seorang calon tidak terlepas dari peran penting partai. Gambaran ini menunjukkan sikap yang diambil DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak yang tidak melepaskan perannya dalam mekanisme suara terbanyak. Atribut-atribut Partai Gerindra juga tampak cukup sebanding dengan atribut-atribut Calon-calonnya. Artinya, Partai Gerindra tetap berusaha mengambil sikap menempuh peran aktif dalam mobilisasi pemilih melalui penguatan identifikasi kepartaian.

Sikap partai sebagaimana di atas, ternyata dikomentari berbeda oleh Calon. Djumbadi, seorang Caleg yang juga Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak.

“Bagaimana mau menggunakan, mesinnya saja tidak ada. Karena, pengurus partai tidak tersusun lengkap. Organisasi-organisasi partai juga belum ada di tingkat bawah.”¹⁰⁸

Kondisi tersebut menyebabkan sikap partai tidak dapat dilaksanakan. Hanya kontribusi atribut yang dapat dilihat dari peran Partai. Selain atribut, Calon harus bekerja secara mandiri, terlepas dari partai, untuk mengarahkan pemilih. Ketidaktersediaan mesin partai merupakan alasan utama kenapa Partai tidak mampu menjalankan sikapnya secara penuh.

Setelah melihat pemaparan masing-masing partai sebagaimana di atas, dapat dilihat bagaimana Partai-partai menyikapi sistem pemilu yang diterapkan pada

¹⁰⁸ Djumbadi Wakil Ketua DPC Kabupaten Demak, 9 Oktober 2009

Pemilu 2009. Terdapat 3 sikap yang dimunculkan oleh partai-partai tersebut. Pertama, Partai mengambil sikap menempuh jalur mobilisasi pemilih melalui identifikasi kepartaian. Partai sebagai sebuah lembaga mengambil peran dalam usaha-usaha mempengaruhi pemilih. Peran-peran tersebut terwujud dalam beberapa bentuk, diantaranya iklan-iklan partai, maneuver-manuver politik atas nama partai, ketersediaan atribut-atribut Partai, dan lain sebagainya. Sikap ini semisal diambil oleh PDIP, Partai Gerindra. PDIP mencerminkan sikapnya dengan himbauan-himbauan conteng gambar partai, pernyataan-pernyataan politik yang merepresentasikan partai semisal dalam bentuk kritik terhadap Pemerintah, penyediaan atribut-atribut Partai, dan lain sebagainya. Partai Gerindra mencerminkan sikapnya dengan pencitraan partai melalui iklan-iklan di media, penempatan figur Prabowo Subianto sebagai daya tarik partai, penyediaan kebutuhan-kebutuhan kampanye bagi Calon anggota legislatifnya, dan lain sebagainya. Meskipun kedua partai mengambil sikap demikian, bukan berarti tidak muncul kemandirian Calon dalam mobilisasi pemilih. Artinya, ada kemungkinan calon anggota legislative melakukan mobilisasi pemilih terlepas dari peran partai.

Kedua, Partai mengambil sikap menempuh jalur kompetisi antar Calon anggota legislative untuk melakukan pengarahannya. Sebagai sebuah lembaga, Partai melepas perannya, dan mempercayakan mobilisasi pemilih pada masing-masing calon. Partai tidak mencampuri aktivitas kampanye para Calon. Sikap ini semisal diambil oleh DPC PKB Kabupaten Demak dengan tidak menginstruksikan mesin partainya untuk terlibat pada kampanye para Calon anggota Legislatif. PKB secara penuh lepas tangan terhadap kampanye-kampanye Calonnya. Bisa dikatakan,

selama proses pengarahannya, DPC PKB Kabupaten Demak sebagai sebuah lembaga, tidak bekerja. Konflik internal partai dan mengantisipasi kecemburuan antar Calon, dalam hal ini menjadi alasan pengambilan sikap DPC PKB Kabupaten Demak. Sejalan dengan sikap tersebut, atribut-atribut Calon menenggelamkan atribut PKB. Di beberapa daerah seperti di Mranggen, minim sekali dijumpai atribut PKB, lebih banyak atribut calon-calon anggota legislative dari PKB.

Ketiga, Partai mengambil sikap menempuh kedua jalur, yakni jalur identifikasi kepartaian dan kompetisi antar Calon anggota legislative. Pemanfaatan kedua jalur ini dinilai sikap yang tepat, karena memberikan pilihan kepada pemilih terkait alasan kenapa memilih. Apakah akan memilih karena Partai, ataukah memilih karena Calon anggota legislatifnya. Sikap ini diambil oleh Partai Demokrat yang tercermin dengan iklan-iklan partai, kebijakan mekanisme suara terbanyak, pernyataan-pernyataan politik partai, penyelenggaraan sepeda santai oleh DPC Partai Demokrat, ketersediaan atribut partai, pemberian kebebasan bagi calon-calon untuk melakukan pengarahannya, dan lain sebagainya.

Bila dilihat dari sisi bagaimana Partai dan Calon bekerja sama mengarahkan pemilih, dapat disimpulkan bahwa Partai tidak mampu mengendalikan sikapnya. Bentuk-bentuk ketidakmampuan ini diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, partai yang bersikap mengambil peran mobilisasi, pada prakteknya tidak mampu menciptakan mesin partai yang terkoordinasi dengan baik. Evaluasi dan konsolidasi yang seharusnya dilakukan per periode tertentu, ternyata tidak dapat dilakukan. Kedua, partai yang bersikap lepas tangan terhadap mobilisasi pemilih, pada prakteknya juga tidak mampu menghalangi individu-individu yang ada dalam mesin

partai untuk terlibat pengarahan pemilih. Alasan mencegah munculnya kecemburuan, sebagaimana PKB, ternyata tidak dapat dilakukan. Kecemburuan antar Calon tetap muncul akibat peran individu-individu tersebut yang membantu salah satu Calon. Ketiga, partai terlalu percaya diri dalam bersikap. Kebijakan untuk bersikap mengambil peran mobilisasi pemilih, ternyata juga tidak melihat apakah mesin partai siap untuk melaksanakan sikap tersebut. Kemudian, kebijakan untuk bersikap lepas tangan dalam mobilisasi pemilih yang dilakukan Calon, ternyata juga tidak melihat apakah Calon mampu menjual dirinya tanpa Partai. Kenyataan yang terjadi, Calon yang membutuhkan mesin partai, tidak menemukan mesin partai yang memadai. Sedangkan Calon yang diberi kebebasan untuk bergerak di luar partai, tidak cukup memiliki modal politik. Sehingga membutuhkan mesin partai untuk mobilisasi pemilih.

Tabel Kesimpulan 5.3

No	Partai	Fokus	
		Komunikasi	Pemenuhan Kebutuhan
1	PDIP	Komunikasi antara Partai dan Caleg tidak mengarah pada substansi mobilisasi	Menyediakan atribut-atribut partai. Pendanaan mobilisasi secara umum masih dipenuhi oleh Caleg
2	PKB	Komunikasi antara Partai dan Caleg tidak terjadi	Penyediaan atribut-atribut partai sangat minim. Pendanaan mobilisasi secara umum masih dipenuhi oleh Caleg
3	PARTAI DEMOKRAT	Komunikasi antara Partai dan Caleg terjadi hanya pada pembagian wilayah mobilisasi pada satu Daerah Pemilihan	Menyediakan atribut-atribut partai. Pendanaan mobilisasi secara umum masih dipenuhi oleh Caleg
4	PARTAI GERINDRA	Komunikasi antara Partai dan Caleg tidak mengarah pada substansi mobilisasi	Menyediakan atribut-atribut partai. Pendanaan mobilisasi secara umum masih dipenuhi oleh Caleg

5.4. Respon Pemilih

5.4.1. Partai Dan Caleg

Mobilisasi merupakan sebuah aktifitas politik dengan obyek masyarakat pemilih. Pemilih diarahkan dengan berbagai cara untuk memberikan suaranya kepada pihak yang melakukan mobilisasi. Mobilisasi oleh masyarakat umum biasa dikenal sebagai kegiatan kampanye. Dalam kegiatan tersebut, pemilih diberikan penjelasan maupun “reward” agar bersedia menjatuhkan pilihannya. Sisi rasionalitas pemilih seringkali terabaikan. Sehingga dalam pembahasan ini, rasionalitas pemilih tidak dijadikan fokus pembahasan.

Kualitas sebuah mobilisasi sering kali berbeda di masyarakat. Masyarakat dengan budaya tertentu bisa saja sangat terpengaruh dengan model mobilisasi tertentu. Namun, pada masyarakat dengan budaya lain, bisa jadi model tersebut tidak memberi pengaruh apapun. Selain hal tersebut, ikatan-ikatan sosial, antara pihak yang melakukan mobilisasi dengan pemilih, juga menentukan apakah pemilih akan terpengaruh atau tidak. Pada tingkat yang lebih kecil, budaya keluarga pemilih juga mempengaruhi pemilih dalam menerima mobilisasi. Berikut ini akan dibahas mengenai respon pemilih terhadap mobilisasi yang dialaminya..

5.4.1.1. Intensitas Pengarahan

Terkait dengan mobilisasi oleh Partai ataupun mobilisasi oleh Calon Anggota Legislatif, pemilih pada Pemilu 2009 kemarin dihadapkan pada dua kemungkinan mobilisasi, yakni mobilisasi yang dilakukan oleh lembaga Partai, dan mobilisasi yang dilakukan oleh Caleg dari partai. Kedua mobilisasi tersebut ditandai dengan

tingkat agresifitas Partai dan Caleg, serta tingkat identifikasi kepartaian yang melekat pada diri pemilih.

Terdapat dua indikator yang bisa membedakan apakah sebuah mobilisasi tergolong mobilisasi oleh Partai, atautah mobilisasi oleh Caleg. Siapa yang melakukan pengarahannya, yakni pihak mana atau atas nama apa melakukan mobilisasi. Kemudian, tujuan mobilisasi, yakni apa tujuan yang hendak dicapai, semisal mengarahkan memilih Partai atautah mengarahkan memilih Caleg. Kedua hal tersebut dapat diketahui dari wawancara kepada pemilih, disamping hasil-hasil pada pembahasan terdahulu.

Pada Pemilu 2009, Caleg sebagai pribadi melakukan mobilisasi bagi dirinya. Partai sebagai lembaga, tidak dijumpai oleh pemilih. Alasan kenapa hal tersebut dikatakan sebagai mobilisasi oleh Caleg adalah sebagai berikut. Pertama, Caleg mendatangi pemilih secara langsung dan meminta untuk memilih dirinya. Pengarahan yang mereka lakukan juga sudah jelas, yakni agar pemilih memilih namanya, bukan mengarah pada pilihan terhadap Partai pengusungnya. Meskipun hal tersebut juga mengandung pengarahan pada Partai, namun pengarahan pada Caleg lebih ditekankan. Sebagaimana diungkapkan oleh Arif Faishol, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demak, sudah beberapa kali ikut serta dalam Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:

“Pemilu kali ini beda dengan Pemilu sebelumnya. Kenapa? Caleg lebih semangat kampanye. Caleg berusaha mengajak saya mencoblos namanya. Dari dulu, saya melihat Caleg ketika akan memilih. Saya biasanya memilih Caleg yang saya kenal dan saya rasakan manfaatnya. Kali ini, ada beberapa

Caleg yang membujuk saya, dengan uang dan lain-lain. Saya tetap pada cara piker yang biasa saya gunakan pada Pemilu-pemilu sebelumnya. Tetap Caleg yang saya kenal dan saya rasakan manfaatnya. Ngapain memilih orang yang belum jelas kemanfaatannya.”¹⁰⁹

Kedua, atribut kampanye yang disajikan merupakan atribut yang cenderung mengarah pada pemilihan Caleg. Semisal stiker atau pamflet, gambar yang terdapat pada stiker atau pamflet lebih didominasi foto dan nama Caleg dari pada logo Partai maupun visi misi partai pengusungnya. Hal ini menggambarkan agresifitas Caleg di atas Partainya dalam memobilisasi pemilih. Sebagaimana diungkapkan oleh Ika, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demak, pertama kali mengikuti Pemilu pada Pemilu 2009, menyatakan sebagai berikut:

“Kemarin ada PBB datang kemari mas. PBR juga kemari. Ya minta dipilih namanya. Mereka datang kasih stiker gambar mereka. Ada yang kasih uang juga. Ya saya terima. Stikernya ya gambar mereka.”¹¹⁰

Ketiga, uang ataupun bantuan yang diberikan oleh Caleg dalam rangka membujuk pemilih, disadari oleh pemilih sebagai uang dari Caleg, bukan dari Partai pengusungnya. Kesadaran pemilih akan hal itu dapat disebabkan karena Caleg menyatakan secara tegas bahwa uang tersebut dari dirinya, ataupun pemilih menyadari dengan sendirinya berdasar situasi Pemilu 2009 yang mengharuskan Caleg berjuang keras secara pribadi bersaing dengan Caleg dari partai lain dan Caleg

¹⁰⁹ Arif Faishol, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demak, 10 Oktober 2009

¹¹⁰ Ika, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demak, 10 Oktober 2009

dari partainya sendiri. Sebagaimana diungkapkan oleh Yulidatul khoiriyah, pemilih di Dapil 4 Kabupaten Demak, beberapa kali mengikuti Pemilu, menyatakan sebagai berikut:

“Partai gak penting sekarang. Yang penting siapa yang mendekati dan memberi hasil, ya itu yang saya pilih. Buktinya memang Caleg yang datang, dan kasih uang. Bukan partai. Uang itu uang dari Caleg bukan dari partai. Saya tahu itu. Saya gak peduli dari partai apa.”¹¹¹

Meskipun begitu, terdapat beberapa pemilih yang merasa partai menjadi alasan utama untuk menjatuhkan pilihannya. Sebagaimana hasil wawancara berikut.

Ahmad habib, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demak, sudah beberapa kali mengikuti Pemilu, menyatakan:

“Ya tetep milih PPP. Dari dulu saya milih PPP. Kami keluarga PPP. Abah saya dulu adalah tokoh PPP. Tergantung siapa yang mendekati saya. Tapi yang jelas Caleg PPP. Kebetulan tidak ada Caleg dari Partai lain yang mendatangi saya. Mungkin karena sudah tahu kalau saya keluarga PPP, hehe”¹¹²

Ali, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demak, sudah beberapa kali mengikuti pemilu, menyatakan:

“Saya mengikuti Mbah Munif aja (Mbah munif adalah tokoh PKB). Sebagai murid, saya takzim ke beliau. Mungkin itu salah satu yang bisa saya berikan

¹¹¹ Yulidatul khoiriyah, pemilih di Dapil 4 Kabupaten Demak, 17 Oktober 2009

¹¹² Ahmad habib, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demak, 15 Oktober 2009

sebagai murid kepada guru. Beberapa Caleg dari PDIP dan partai lain sempat membujuk saya. Ya saya terima baik-baik.”¹¹³

Dari keterangan kedua pemilih di atas, dapat diketahui bahwa identifikasi kepartaian masih dijumpai dalam Pemilu 2009. Namun hal itu tidak dapat sepenuhnya diartikan bahwa Partai melakukan mobilisasi pada Pemilu 2009. Identifikasi kepartaian, terbentuk dalam kurun waktu yang panjang, dan dengan latar belakang yang bermacam-macam. Semisal disebabkan karena kebiasaan memilih partai tertentu, keluarga Partai tertentu, hubungan di luar kepartaian yang menyebabkan pemilih mengidentifikasikan dirinya pada partai tertentu, dan lain sebagainya. Pemilih juga tetap mengalami pengarahannya dari Caleg-Caleg, baik yang berasal dari partai pilihannya maupun dari partai lain. Secara tidak langsung, pemilih juga mengakui bahwa mobilisasi lebih dilakukan oleh Caleg secara pribadi.

5.4.1.2. Bentuk Pengarahan Yang Dijumpai Pemilih

Caleg maupun Partai memobilisasi pemilih dengan berbagai cara. Memberikan bantuan, memberikan uang, menyampaikan visi misi, menciptakan hubungan emosional, dan lain sebagainya. Di Negara dengan tata peraturan kampanye yang jelas dan baik, bantuan-bantuan merupakan sesuatu yang dilarang, dan masuk kategori penyuapan. Namun, di Indonesia belum sebaik dan seketat di Negara maju. Sehingga, praktek-praktek politik uang masih sangat mungkin dijumpai pada mobilisasi pemilih. Cara-cara apa saja yang muncul pada Pemilu 2009, akan dibahas dibawah ini.

¹¹³ Ali, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demak, 19 Oktober 2009

Bentuk-bentuk pengarahan yang dijumpai pemilih, terbagi dalam 2 kategori, yakni bantuan-bantuan, dan penciptaan hubungan emosional. Pertama, bentuk mobilisasi berupa bantuan-bantuan meliputi bantuan pembangunan, bantuan perlengkapan public, pemberian uang kepada pemilih, pemberian barang-barang kebutuhan, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk mobilisasi tersebut terungkap dari pernyataan pemilih sebagai berikut.

Yulidatul khoiriyah, pemilih di Dapil 4 Kabupaten Demak, beberapa kali mengikuti Pemilu, menyatakan sebagai berikut:

“Caleg mendatangi pengajian ibu-ibu. Menjanjikan akan memberi perlengkapan pengajian. Betul, beberapa saat kemudian, pengajian ibu-ibu di sini mendapat bantuan berupa sound system dari Caleg. Caleg meminta ibu-ibu memilih dirinya. Alhamdulillah pengajian ibu-ibu sekarang sudah memiliki sound system yang cukup buat pengajian.”¹¹⁴

Ika, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demak, pertama kali mengikuti Pemilu pada Pemilu 2009, menyatakan sebagai berikut:

“Kemarin ada PBB datang kemari mas. PBR juga kemari. Ya minta dipilih namanya. Mereka datang kasih stiker gambar mereka. Ada yang kasih uang juga. Ya saya terima. Stikernya ya gambar mereka.”¹¹⁵

Amin Mahmudi, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demak, beberapa kali mengikuti Pemilu, menyatakan sebagai berikut:

“Lha jalan paving di depan rumah itu dibangun oleh Pak Bandi (Caleg dari Partai Golkar). Tujuannya biar warga memilih dirinya. Tidak mungkin tiba-

¹¹⁴ Yulidatul khoiriyah, pemilih di Dapil 4 Kabupaten Demak, 17 Oktober 2009

¹¹⁵ Ika, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demak, 10 Oktober 2009

tiba membantu membuat jalan paving kalau tidak ada maunya. Betul gak?hahaha”¹¹⁶

Masrokan, pemilih di Dapil 3 Kabupaten Demak, beberapa kali mengikuti Pemilu, menyatakan sebagai berikut:

“Kemarin warga sini mendapat sembako dari Caleg. Maaf, saya tidak bisa menyebutkan siapa nama Calegnya. Warga menerima dengan senang hati. Rejeki masak ditolak. Memilih atau tidak memilih, ya sesukanya warga masing-masing dong.”¹¹⁷

Kedua, bentuk mobilisasi berupa penciptaan hubungan emosional. Bentuk ini membutuhkan waktu panjang sebelum proses pemilu. Artinya, hubungan emosional ini tidak dapat dibentuk secara singkat saat musim Pemilu. Namun melalui interaksi-interaksi sosial dalam berbagai bentuk dan dalam tempo tertentu. Bentuk mobilisasi ini adalah penggunaan jalur persaudaraan, penggunaan jalur religius (hubungan yang terbentuk dalam kegiatan keagamaan), hubungan tetangga, hubungan pekerjaan, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk mobilisasi tersebut terungkap dari pernyataan pemilih sebagai berikut.

Arif Faishol, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demak, sudah beberapa kali ikut serta dalam Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:

“Kali ini, ada beberapa Caleg yang membujuk saya, dengan uang dan lain-lain. Saya tetap pada cara piker yang biasa saya gunakan pada Pemilu-pemilu sebelumnya. Tetap Caleg yang saya kenal dan saya rasakan manfaatnya. Ngapain memilih orang yang belum jelas kemanfaatannya. Jadi

¹¹⁶ Amin Mahmudi, Pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demak, 14 Oktober 2009

¹¹⁷ Masrokan, Pemilih di Dapil 3 Kabupaten Demak, 20 Oktober 2009

saya tetap memilih Caleg tetangga saya. Bagaimanapun juga, tetangga gak akan melupakan tetangganya”¹¹⁸

Ali, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demak, sudah beberapa kali mengikuti pemilu, menyatakan:

“Saya mengikuti Mbah Munif aja (Mbah munif adalah tokoh PKB). Sebagai murid, saya takzim ke beliau. Mungkin itu salah satu yang bisa saya berikan sebagai murid kepada guru. Beberapa Caleg dari PDIP dan partai lain sempat membujuk saya. Ya saya terima baik-baik. Siapapun Caleg yang mendapat restu Mbah Munif akan saya pilih”¹¹⁹

Icuk Aditama, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demak, sudah beberapa kali mengikuti pemilu, menyatakan:

“Pasti milih kamu bal bal. Lha ada temen jadi Caleg kok gak dipilih. Daripada milih Caleg yang gak jelas, mendingan milih kamu bal. Masak kalau kamu jadi DPR akan lupa ma teman? Kalau lupa, ketemu dijalan kutarik jenggotmu.”¹²⁰

Yusuf, pemilih di Dapil 2 Kabupaten Demak, sudah beberapa kali mengikuti pemilu, menyatakan:

“Kebetulan ada saudara saya yang menjadi Caleg. Tentu saya memilih dia. Emm, sempat ada Caleg yang mendatangi saya. Tapi saya kasih tau kalau ada saudara saya yang menjadi Caleg. Saya rasa dia paham kata-kata saya, kalau saya gak akan memilih dia.”¹²¹

¹¹⁸ Arif Faishol, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demak, 10 Oktober 2009

¹¹⁹ Ali, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demak, 19 Oktober 2009

¹²⁰ Icuk Aditama, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demak, 16 Oktober 2009

¹²¹ Yusuf, pemilih di Dapil 2 Kabupaten Demak, 21 Oktober 2009

Bejo, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demak, sudah beberapa kali mengikuti pemilu, menyatakan:

*“Pak muhlisin, saya pilih Pak Muhlisin. Dia kepala sekolah di tempat saya bekerja. Dia bisa kerja atau tidak (kinerja di DPR), yo embuh (tidak peduli). Saya sudah kerja ikut dia. Dia yang menggaji saya selama ini.”*¹²²

Dari pernyataan-pernyataan yang menunjukkan bentuk-bentuk mobilisasi sebagaimana di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilih mengalami berbagai macam bentuk mobilisasi. Setiap pemilih bukan hanya mengalami satu bentuk mobilisasi, namun beberapa bentuk mobilisasi sekaligus. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pemilih mengalami berbagai macam bentuk mobilisasi dalam kurun waktu yang bersamaan. Pertama, kerasnya persaingan antar Caleg memaksa Caleg untuk melakukan berbagai macam bentuk mobilisasi. Caleg dihadapkan pada perebutan suara pemilih yang kemungkinan sama. Artinya, antar Caleg tidak ada pembagian area mobilisasi. Sehingga, Caleg berusaha mencari cara dan berganti cara agar cara yang digunakan lawannya gagal.

Kedua, keterbukaan pemilih untuk menjadi sasaran mobilisasi. Pemilih kebanyakan belum memiliki pilihan. Sehingga masih sangat mungkin untuk diarahkan. Di samping itu, pemilih juga mempersepsikan ajang mobilisasi sebagai kesempatan untuk memperoleh materi. Hal ini bukan hanya berlaku bagi diri pribadi pemilih. Namun juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sosial, semisal masjid. Ketiga, posisi pemilih yang memang sudah berada pada berbagai “tekanan”

¹²² Bejo, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demak, 14 Oktober 2009

mobilisasi. Dengan banyaknya jumlah Caleg, seorang pemilih dapat mengalami dilema. Artinya, seorang pemilih pada posisi tertentu tertekan oleh ikatan persaudaraan karena saudaranya menjadi Caleg. Di sisi lain, pemilih tersebut juga memiliki tetangga yang menjadi Caleg. Mengingat adanya Kyai yang masuk pada ranah politik, bisa jadi pemilih tersebut memiliki Guru dari partai lainnya. Peristiwa-peristiwa seperti ini sangat mungkin terjadi pada pemilih.

5.4.2. Efektivitas Pengarahan

Mobilisasi tidak selamanya berhasil. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi, diantaranya adalah budaya politik masyarakat pemilih, posisi pemilih, ketepatan memilih bentuk mobilisasi, dan lain sebagainya. Pemilih hanya memiliki satu suara. Dengan satu suara tersebut, pemilih mengalami satu atau lebih bentuk mobilisasi yang ditujukan kepadanya. Artinya, untuk memperebutkan satu suara yang dimiliki seorang pemilih, para Caleg berramai-ramai memperebutkan dengan berbagai bentuk mobilisasi yang berbeda-beda. Satu suara yang dimiliki pemilih, tentu membuat pemilih tidak mampu menuruti semua mobilisasi yang mengarah kepadanya. Walaupun pemilih menerima bentuk-bentuk mobilisasi tersebut. Pemilih memiliki standar pikir sendiri untuk menentukan mana diantara bentuk-bentuk mobilisasi yang tertuju kepadanya yang akan pemilih jadikan sebagai pilihan politik. Pemilih memiliki ke-arifan sendiri, yang mungkin berbeda dengan pemilih yang lain.

Untuk melihat bentuk-bentuk mobilisasi apa yang lebih berhasil meraih suara pemilih pada Pemilu 2009, hasil wawancara terhadap pemilih dapat menjelaskan

secara sederhana. Pemilih dalam wawancara memberikan pernyataan terkait bentuk mobilisasi yang akan mereka jadikan alasan pilihan politik. Meskipun begitu, pembahasan ini bukan membahas tingkat efektivitas secara komprehensif. Hanya sekedar menggambarkan apa yang ditemui di masyarakat secara singkat.

Bentuk-bentuk mobilisasi apa saja yang lebih dijadikan alasan seorang pemilih ketika akan menjatuhkan pilihan politiknya. Pemilih lebih melihat hubungan emosional yang sudah tercipta, sebagai alasan utama dalam memilih siapa yang akan dipilih. Hubungan emosional yang paling kuat dalam memobilisasi pemilih adalah hubungan persaudaraan atau kekeluargaan. Rata-rata pemilih yang diwawancarai, bersedia memilih saudaranya jika terdapat saudara atau keluarga yang menjadi Caleg. Pemilih memprioritaskan bentuk mobilisasi yang berdasar pada persaudaraan atau kekeluargaan, diantara bentuk bentuk hubungan emosional yang lain serta bentuk-bentuk mobilisasi yang lain. Sebagaimana diungkapkan oleh Masrokan, pemilih di Dapil 3 Kabupaten Demak, beberapa kali mengikuti Pemilu, menyatakan sebagai berikut:

“Kalau ada saudara, pasti milih saudara. Kalau ada teman, ya milih teman. Tetangga kalau baik, pilih tetangga. Kalau gak ada, siapa yang kasih uang deh, hehe. Kemarin warga sini mendapat sembako dari Caleg. Maaf, saya tidak bisa menyebutkan siapa nama Calegnya. Warga menerima dengan senang hati. Rejeki masak ditolak. Memilih atau tidak memilih, ya sesukanya warga masing-masing dong.”¹²³

¹²³ Masrokan, Pemilih di Dapil 3 Kabupaten Demak, 20 Oktober 2009

Ika, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demak, pertama kali mengikuti Pemilu pada Pemilu 2009, menyatakan sebagai berikut:

“Kemarin ada PBB datang kemari mas. PBR juga kemari. Ya minta dipilih namanya. Mereka datang kasih stiker gambar mereka. Ada yang kasih uang juga. Ya saya terima. Stikernya ya gambar mereka. Kalau tahu kamu jadi Caleg, pasti milih kamu mas. Mosok kakaknya jadi Caleg kok gak dipilih. Salahmu sendiri jadi Caleg kok gak bilang-bilang ibu dan keluarga. Kapok rak kowe (Sukurin).”¹²⁴

Yusuf, pemilih di Dapil 2 Kabupaten Demak, sudah beberapa kali mengikuti pemilu, menyatakan:

“Kebetulan ada saudara saya yang menjadi Caleg. Tentu saya memilih dia. Emm, sempat ada Caleg yang mendatangi saya. Tapi saya kasih tau kalau ada saudara saya yang menjadi Caleg. Saya rasa dia paham kata-kata saya, kalau saya gak akan memilih dia.”¹²⁵

Dibawah hubungan kekeluargaan atau persaudaraan, bentuk-bentuk hubungan emosional seperti hubungan pertemanan, hubungan tetangga, hubungan spiritual (hubungan emosional yang terbentuk pada forum-forum keagamaan), hubungan kerja, menjadi bentuk mobilisasi yang juga mampu menguatkan alasan pemilih untuk memilih seorang Caleg. Artinya, ketika pemilih tidak menjumpai bentuk mobilisasi yang berdasar hubungan kekeluargaan atau persaudaraan, maka pemilih akan lebih memperhatikan mobilisasi yang berdasar hubungan emosional

¹²⁴ Ika, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demak, 10 Oktober 2009

¹²⁵ Yusuf, pemilih di Dapil 2 Kabupaten Demak, 21 Oktober 2009

yang lain. Semisal, seorang pemilih memiliki saudara yang menjadi Caleg. Maka pemilih tersebut akan memprioritaskan saudaranya sebagai pilihan. Jika pemilih tersebut tidak memiliki saudara yang menjadi Caleg, maka pemilih tersebut akan memprioritaskan temannya yang menjadi Caleg, tetangganya yang menjadi Caleg, Majikannya yang menjadi Caleg, Gurunya yang menjadi caleg atau Caleg yang mereka restui, serta orang-orang yang sudah dia kenal jauh sebelum musim mobilisasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Arif Faishol, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demak, sudah beberapa kali ikut serta dalam Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut:

“Kali ini, ada beberapa Caleg yang membujuk saya, dengan uang dan lain-lain. Saya tetap pada cara fikir yang biasa saya gunakan pada Pemilu-pemilu sebelumnya. Tetap Caleg yang saya kenal dan saya rasakan manfaatnya. Ngapain memilih orang yang belum jelas kemanfaatannya. Jadi saya tetap memilih Caleg tetangga saya. Bagaimanapun juga, tetangga gak akan melupakan tetangganya. Kalau saudara, saya lihat dulu peluang dia jadi DPR. Kalau kecil, mending saya milih tetangga yang peluang jadinya lebih besar. Toh untuk kebaikan bersama.”¹²⁶

Bejo, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demal, sudah beberapa kali mengikuti pemilu, menyatakan:

“Pak muhlisin, saya pilih Pak Muhlisin. Dia kepala sekolah di tempat saya bekerja. Dia bisa kerja atau tidak (kinerja di DPR), yo embuh (tidak peduli).

¹²⁶ Arif Faishol, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demak, 10 Oktober 2009

Saya sudah kerja ikut dia. Dia yang menggaji saya selama ini. Tapi aku tetep menerima uang dari Caleg lain”¹²⁷

Ali, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demal, sudah beberapa kali mengikuti pemilu, menyatakan:

“Saya mengikuti Mbah Munif aja (Mbah munif adalah tokoh PKB). Sebagai murid, saya takzim ke beliau. Mungkin itu salah satu yang bisa saya berikan sebagai murid kepada guru. Beberapa Caleg dari PDIP dan partai lain sempat membujuk saya. Ya saya terima baik-baik. Siapapun Caleg yang mendapat restu Mbah Munif akan saya pilih. Kebetulan tidak ada saudara saya yang jadi Caleg. Semisal ada, mungkin saya akan memilih saudara. Karena agak ada, ikut mbah munif aja. Kalau ada yang kasih duit ya saya terima. Diterima aja, gak dipilih.”¹²⁸

Icuk Aditama, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demal, sudah beberapa kali mengikuti pemilu, menyatakan:

“Saudaraku gak ada yang jadi Caleg. Pasti milih kamu bal bal. Lha ada temen jadi Caleg kok gak dipilih. Daripada milih Caleg yang gak jelas, mendingan milih kamu bal. Masak kalau kamu jadi DPR akan lupa ma teman? Kalau lupa, ketemu di jalan kutarik jenggotmu. Saya dikasih uang 20 ribu untuk milih tetanggaku, tidak kupilih. Mending milih jenggotmu bal”¹²⁹

Sedangkan mobilisasi yang berdasar pada bantuan-bantuan, menjadi prioritas terakhir. Artinya, ketika seorang pemilih tidak menjumpai Caleg yang berasal dari

¹²⁷ Bejo, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demak, 14 Oktober 2009

¹²⁸ Ali, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demak, 19 Oktober 2009

¹²⁹ Icuk Aditama, pemilih di Dapil 5 Kabupaten Demal, 16 Oktober 2009

keluarga atau saudaranya, kemudian juga tidak menjumpai Caleg yang berasal dari tetangganya, temannya, gurunya, majikannya, maka pemilih akan melihat seberapa besar atau seberapa dibutuhkannya bantuan-bantuan yang diberikan oleh Caleg sebagai alasan pilihan. Pada tahap ini, pertarungan bantuan dari Caleg sangat menentukan apakah seorang Caleg akan dipilih atau tidak. Dari sisi pemilih, bisa jadi sikap rasional tidak terjadi pada pemilih. Sebagaimana diungkapkan oleh Yulidatul khoiriyah, pemilih di Dapil 4 Kabupaten Demak, beberapa kali mengikuti Pemilu, menyatakan sebagai berikut:

“Partai gak penting sekarang. Yang penting siapa yang mendekati dan memberi hasil, ya itu yang saya pilih. Buktinya memang Caleg yang datang, dan kasih uang. Bukan partai. Uang itu uang dari Caleg bukan dari partai. Saya tahu itu. Saya gak peduli dari partai apa. Kalau Calegnya saudara sendiri, ya liat-liat dulu, dia saudara yang baik atau tidak. Kalau gak baik, kenapa dipilih. Sama-sama memilih orang gak jelas, siapa yang kasih uang aja.”¹³⁰

Tingkatan-tingkatan bentuk mobilisasi sebagaimana di atas, hanya merupakan gambaran kualitas “tekanan” mobilisasi. Namun, pada konteks Pemilu 2009, tingkatan-tingkatan tersebut tidak begitu saja dapat difokuskan pada bentuk tertentu, khususnya bentuk mobilisasi yang berdasar pada hubungan emosional. Hubungan emosional memang menjadi prioritas pemilih dalam menentukan pilihan. Namun jumlah pemilih yang memiliki hubungan emosional dengan Caleg jauh lebih

¹³⁰ Yulidatul khoiriyah, pemilih di Dapil 4 Kabupaten Demak, 17 Oktober 2009

sedikit daripada jumlah pemilih yang tidak memiliki hubungan emosional dengan Caleg, baik hubungan kekeluargaan persaudaraan, pertemanan, tetangga, hubungan kerja, dan lain sebagainya. Kondisi ini menyebabkan bentuk mobilisasi berupa bantuan-bantuan menjadi bentuk mobilisasi yang lebih banyak dijumpai di masyarakat pemilih. Sehingga, Caleg menyadari sepenuhnya bahwa bentuk mobilisasi melalui bantuan-bantuan menjadi penting untuk dilakukan.

Asumsi sederhananya, seorang Caleg memiliki keluarga besar tidak lebih dari 100 pemilih. Seorang Caleg memiliki teman tidak lebih dari 2000 pemilih. Seorang Caleg memiliki tetangga tidak lebih dari 200 pemilih. Seorang Caleg memiliki karyawan tidak lebih dari 500 pemilih. Seorang Caleg memiliki muri tidak lebih dari 1000 pemilih. Jika semua hubungan emosional tersebut dimiliki oleh seorang Caleg, dan mereka dapat dipastikan memilih Caleg tersebut, maka Caleg tersebut baru memperoleh 3800 pemilih. Sedangkan Bilangan pembagi pemilih (BPP), berkisar antara 10.000 pemilih. Belum mencapai 50% BPP. Dengan sisa kekurangan pemilih yang harus terpenuhi, maka seorang Caleg tidak mungkin mengabaikan mobilisasi dalam bentuk bantuan-bantuan. Mobilisasi bentuk bantuan-bantuan dianggap dapat memenuhi kekurangan suara tersebut. Jadi, bantuan-bantuan dari Caleg tetap menghiasi dan mendominasi mobilisasi-mobilisasi yang dilakukan.

Keberhasilan-keberhasilan mobilisasi pemilih dengan tingkatan bentuk-bentuk mobilisasi sebagaimana diatas, dapat dijelaskan dengan berbagai faktor. Pertama, sistem sosial masyarakat yang dapat memunculkan hukuman sosial. Di masyarakat yang menjadi obyek penelitian, sistem sosial yang terbentuk masih tradisional. Ikatan-ikatan antar individu masih erat dan saling mempengaruhi pada

kehidupan sehari-hari mereka. Artinya, individu tidak mudah untuk menyimpang dari norma-norma sosial yang ada. Jika penyimpangan itu terjadi, maka terdapat hukuman sosial bagi dirinya. Norma-norma tersebut diantaranya adalah lebih mementingkan saudara, lebih mementingkan tetangga, lebih mementingkan teman, lebih mementingkan majikan, dan lain sebagainya. Sedangkan hukuman-hukuman sosial yang bisa muncul adalah pengkucilan dari lingkungan keluarga atau saudara, pengkucilan dari masyarakat terdekat (semisal kampung), pemutusan hubungan kerja, dan lain sebagainya.

Kedua, tingkat pengenalan pemilih terhadap Caleg. Interaksi-interaksi sosial yang sudah terjadi sebelum musim mobilisasi, menciptakan hubungan emosional yang berdasar pada pengenalan pemilih terhadap seorang Caleg. Semakin akrab tingkat pengenalannya, maka dapat memunculkan “tekanan” mobilisasi yang semakin kuat. Pengenalan disini tidak dapat tercipta secara tiba-tiba, hanya untuk tujuan mobilisasi. Cara fikir yang muncul pada pemilih adalah lebih baik memilih orang yang sudah dikenal daripada memilih orang yang belum dikenal. Motivasi menyenangkan orang yang sudah dikenal, selupa-lupanya orang yang sudah kenal baik tidak akan benar-benar melupakan, kepada siapa meminta tolong bila tidak kepada orang yang dikenal, dan lain sebagainya, menjadi alasan-alasan kenapa tingkat pengenalan pemilih terhadap Caleg menjadi bentuk mobilisasi yang memberi hasil.

Ketiga, sikap apatis masyarakat terhadap politik. Masyarakat pemilih kurang memiliki kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan politik. Bentuk-bentuk sikap apatis yang muncul di masyarakat adalah perasaan ketidak bermanfaat lembaga dewan

bagi masyarakat, Pemilu tak lebih dari sebuah perjuangan mencari pekerjaan bagi Caleg, Siapapun yang menjadi anggota DPR tidak akan memberi perbaikan kehidupan masyarakat, dan lain sebagainya. Di dasari cara fikir tersebut, maka pemilih akan menjatuhkan pilihannya berdasar logika-logika yang sederhana dan terkesan jangka pendek. Penjatuhan pilihan berdasar hubungan emosional dan bantuan-bantuan, tidak terlepas dari hal ini. Artinya, sikap apatis pemilih dapat menyebabkan pemilih secara mudah dan cepat, tanpa memikirkan faktor-faktor yang bersifat rasional, memilih Caleg yang berasal dari keluarganya, memilih temannya yang menjadi Caleg, memilih majikannya yang menjadi Caleg, memilih tetangganya yang menjadi Caleg, memilih Caleg yang memberi uang, memilih Caleg yang memberi bantuan, dan memilih Caleg berdasarkan instruksi Gurunya.

Tabel Kesimpulan 5.4
Bentuk-Bentuk Mobilisasi Yang Muncul

Ikatan Emosional	Bantuan-Bantuan
Hubungan kekeluargaan, hubungan tetangga, hubungan pertemanan, hubungan kerja, dan hubungan guru-murid/spiritual.	Bantuan kepada lembaga publik, bantuan sarana publik, bantuan komunitas masyarakat, dan bantuan kebutuhan pribadi pemilih.

BAB VI

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Perubahan sistem pemilu terjadi ketika tahapan Pemilu 2009 sudah berjalan. Partai telah menyelesaikan tahap pengajuan daftar Calon anggota legislatifnya ke KPU. Situasi ini membuat strategi beberapa Partai menjadi terganggu. Perubahan cara penentuan caleg yang berhak menempati kursi yang diperoleh Partainya, berakibat pada strategi perolehan suara. Perlombaan perolehan suara antar Caleg menjadi sangat menonjol, baik Caleg sesama partai maupun Caleg dari partai lain. Sehingga kemampuan Caleg secara pribadi sangat diperlukan untuk memenangi perebutan suara. Perebutan suara berubah dari antar partai menjadi antar Caleg. Beberapa partai, seperti PDIP dan PKB, sudah menentukan strategi sebagaimana pada Pemilu-pemilu sebelumnya. Sedangkan Partai baru seperti Gerindra, masih berpikir pada sistem yang sudah digunakan pada Pemilu-pemilu sebelumnya. Sehingga, partai-partai tersebut menentukan Caleg lebih menggunakan *Spoil System*. Partai-partai tersebut menempatkan para pengurus partai dan orang-orang sekitarnya pada daftar Caleg. Nomor urut menjadi dasar sebagaimana pada Pemilu-pemilu sebelumnya. Artinya, partai-partai tersebut menganggap bahwa identifikasi kepartaian masih menentukan dan mencoba diperkuat. Pada sisi ini, Caleg sebagai aktor tidak terlalu dilihat.

Ketika sistem suara terbanyak diterapkan setelah daftar Caleg sudah masuk ke KPU, partai-partai tersebut merasa kecewa. Partai-partai tersebut telah menentukan Caleg bukan berdasar pada pertarungan suara antar Caleg. Sementara

sistem yang baru memaksa Caleg bertarung secara pribadi. Partai-partai tersebut menetapkan Caleg berdasar posisi dan kedekatan pada partai. Kemampuan Caleg untuk mengarahkan pemilih tidak dilihat. Di sini lah letak “kalah langkah” mereka. Tidak sedikit protes yang mereka kemukakan sebagai wujud kekecewaan terhadap perubahan sistem pemilu yang terjadi di saat tahapan pemilu telah berjalan.

Kondisi menguntungkan dialami oleh partai-partai yang sudah menerapkan strategi suara terbanyak secara internal partai, seperti Partai Demokrat. Sebelum tahapan pengajuan daftar Caleg, partai telah menetapkan sistem suara terbanyak. Sehingga nomor urut tidak menjadi persoalan. Meskipun saat itu, awal tahapan pemilu, belum ditetapkan sistem pemilu yang baru. partai memiliki celah hukum untuk melaksanakan kebijakan internalnya, dengan meminta mundur Caleg yang memperoleh kursi berdasar nomor urut, dan digantikan oleh Caleg yang suaranya lebih banyak. Partai menindak lanjuti kebijakan internalnya ini berdasar *Merit System*, meskipun masih juga menggunakan *Spoil System*. Partai menempatkan Caleg-caleg yang memiliki kemampuan mengarahkan pemilih, semisal aktris, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Posisi mereka dalam partai tidak menjadi pertimbangan dalam menentukan daftar Caleg. Ketika sistem pemilu suara terbanyak diterapkan, partai ini secara strategi tidak memiliki kendala. Bahkan merasa diuntungkan karena strategi-strategi pengarahannya pemilih partai-partai lain belum tentu sejalan dengan sistem pemilu yang baru.

Pada tataran sebelum Pemilu, beberapa partai mengalami permasalahan internal. Semisal PDIP dan PKB Kabupaten Demak, yang mengalami perseteruan antar pengurus partai. Akibat yang muncul dari perseteruan tersebut, adalah ketidak

siapan partai-partai tersebut secara lembaga untuk menghadapi Pemilu 2009. PKB Kabupaten Demak mengalami perseteruan internal akibat perseteruan PKB di tingkat pusat. Salah satu imbas dari perseteruan, PKB Kabupaten Demak tidak berhasil membentuk lembaga pemenangan pemilu. Bahkan, PKB Kabupaten Demak hampir tidak dapat menjadi peserta Pemilu 2009. Perseteruan yang terjadi di PDIP Kabupaten Demak sempat memunculkan dua daftar Caleg yang diajukan ke KPU. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa partai masih membutuhkan konsolidasi internal yang kuat sebagai sebuah organisasi, dalam rangka menghadapi tujuan organisasi.

Partai-partai lain mengalami kendala juga, meskipun tidak sebagaimana PDIP dan PKB Kabupaten Demak. Partai-partai mengalami ketidakterediaan elemen-elemen pendukung atau biasa disebut mesin partai. Semisal Partai Demokrat dan Gerindra belum memiliki struktur pengurus secara lengkap hingga tingkat bawah. Di tingkat Desa, kedua partai belum memiliki kepengurusan secara lengkap. Padahal kepengurusan terbawah adalah pihak yang paling dekat dengan pemilih. Organisasi-organisasi sayap di tingkat Kabupaten belum bisa digerakkan, hanya sebatas memiliki kepengurusan. Jadi, partai-partai tersebut secara lembaga juga belum memiliki kesiapan penuh dalam melakukan pengarahannya.

Kelanjutan dari ketidaksiapan partai-partai adalah munculnya sikap tidak percaya diri mereka mengarahkan pemilih pada Pemilu 2009. Sikap tersebut tercermin dari kebijakan partai-partai terkait kampanye. Terdapat 3 sikap yang dimunculkan oleh partai-partai tersebut. Pertama, Partai mengambil sikap menempuh jalur mobilisasi pemilih melalui identifikasi kepartaian. Partai sebagai sebuah

lembaga mengambil peran dalam usaha-usaha mempengaruhi pemilih. Peran-peran tersebut terwujud dalam beberapa bentuk, diantaranya iklan-iklan partai, manuver-manuver politik atas nama partai, ketersediaan atribut-atribut Partai, dan lain sebagainya. Sikap ini semisal diambil oleh PDIP, Partai Gerindra. Kedua, Partai mengambil sikap menempuh jalur kompetisi antar Calon anggota legislative untuk melakukan pengarahan pemilih. Sebagai sebuah lembaga, Partai melepas perannya, dan mempercayakan mobilisasi pemilih pada masing-masing calon. Partai tidak mencampuri aktivitas kampanye para Calon. Sikap ini semisal diambil oleh DPC PKB Kabupaten Demak dengan tidak menginstruksikan mesin partainya untuk terlibat pada kampanye para Calon anggota Legislatif. PKB secara penuh lepas tangan terhadap kampanye-kampanye Calonnya. Ketiga, Partai mengambil sikap menempuh kedua jalur, yakni jalur identifikasi kepartaian dan kompetisi antar Calon anggota legislative, untuk mengarahkan suara pemilih. Pemanfaatan kedua jalur ini dinilai sikap yang tepat, karena memberikan pilihan kepada pemilih terkait alasan kenapa memilih. Apakah akan memilih karena Partai, atautkah memilih karena Calon anggota legislatifnya. Sikap ini diambil oleh Partai Demokrat yang tercermin dengan iklan-iklan partai, kebijakan mekanisme suara terbanyak, pernyataan-pernyataan politik partai, penyelenggaraan sepeda santai oleh DPC Partai Demokrat, ketersediaan atribut partai, pemberian kebebasan bagi calon-calon untuk melakukan pengarahan pemilih, dan lain sebagainya.

Sistem pemilu proporsional terbuka, serta keadaan lembaga partai yang demikian, memaksa Calon anggota legislative secara pribadi melakukan pengarahan pemilih bagi dirinya. Caleg berjuang dengan segala kemampuannya memperoleh

suara bagi dirinya. Caleg memanfaatkan berbagai cara untuk mempengaruhi pemilih. Bentuk-bentuk pengarahannya terbagi dalam 2 kategori, yakni bantuan-bantuan, dan penciptaan hubungan emosional. Pertama, bentuk mobilisasi berupa bantuan-bantuan meliputi bantuan pembangunan, bantuan perlengkapan public, pemberian uang kepada pemilih, pemberian barang-barang kebutuhan, dan lain sebagainya. Kedua, bentuk mobilisasi berupa penciptaan hubungan emosional. Bentuk ini membutuhkan waktu panjang sebelum proses pemilu. Artinya, hubungan emosional ini tidak dapat dibentuk secara singkat saat musim Pemilu. Namun melalui interaksi-interaksi sosial dalam berbagai bentuk dan dalam tempo tertentu. Bentuk mobilisasi ini adalah penggunaan jalur persaudaraan, penggunaan jalur religius (hubungan yang terbentuk dalam kegiatan keagamaan), hubungan tetangga, hubungan pekerjaan, dan lain sebagainya. Munculnya berbagai bentuk mobilisasi yang dilakukan oleh Caleg, disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kerasnya persaingan antar Caleg memaksa Caleg untuk melakukan berbagai macam bentuk mobilisasi. Caleg dihadapkan pada perebutan suara pemilih yang kemungkinannya sama. Kedua, keterbukaan pemilih untuk menjadi sasaran mobilisasi. Pemilih kebanyakan belum memiliki pilihan. Sehingga masih sangat mungkin untuk diarahkan. Di samping itu, pemilih juga mempersepsikan ajakan mobilisasi sebagai kesempatan untuk memperoleh materi. Hal ini bukan hanya berlaku bagi diri pribadi pemilih. Namun juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sosial, semisal masjid. Ketiga, posisi pemilih yang memang sudah berada pada berbagai “tekanan” mobilisasi. Dengan banyaknya jumlah Caleg, seorang pemilih dapat mengalami dilema.

Dari berbagai hubungan emosional, hubungan kekeluargaan atau persaudaraan menjadi faktor paling kuat dalam mobilisasi pemilih. Sedangkan bentuk bantuan-bantuan menjadi faktor penting mobilisasi setelah hubungan emosional. Seorang pemilih dapat mengalami bentuk mobilisasi yang bermacam-macam pada dirinya. Semisal saudaranya ada yang menjadi Caleg, tetangganya menjadi Caleg, temannya menjadi Caleg, menerima bantuan, dan lain sebagainya dalam satu waktu. Pertimbangan terkuat terletak pada bentuk hubungan emosional. Namun, ikatan emosional yang demikian antara Caleg dan pemilih tidak cukup untuk memenuhi perolehan suara satu BPP. Sehingga, bentuk mobilisasi berupa bantuan-bantuan menjadi sangat penting untuk mengarahkan pemilih yang belum memiliki hubungan emosional dengan Caleg. Keberhasilan-keberhasilan mobilisasi pemilih dengan tingkatan bentuk-bentuk mobilisasi sebagaimana di atas, dapat dijelaskan dengan berbagai faktor. Pertama, sistem sosial masyarakat yang dapat memunculkan hukuman sosial. Di masyarakat yang menjadi obyek penelitian, sistem sosial yang terbentuk masih tradisional. Ikatan-ikatan antar individu masih erat dan saling mempengaruhi pada kehidupan sehari-hari mereka. Kedua, tingkat pengenalan pemilih terhadap Caleg. Interaksi-interaksi sosial yang sudah terjadi sebelum musim mobilisasi, menciptakan hubungan emosional yang berdasar pada pengenalan pemilih terhadap seorang Caleg. Semakin akrab tingkat pengenalannya, maka dapat memunculkan “tekanan” mobilisasi yang semakin kuat. Pengenalan disini tidak dapat tercipta secara tiba-tiba, hanya untuk tujuan mobilisasi. Ketiga, sikap apatis masyarakat terhadap politik. Masyarakat pemilih kurang memiliki kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan politik. Bentuk-bentuk sikap apatis yang muncul di

masyarakat adalah perasaan ketidak bermanfaat lembaga dewan bagi masyarakat, Pemilu tak lebih dari sebuah perjuangan mencari pekerjaan bagi Caleg, Siapapun yang menjadi anggota DPR tidak akan memberi perbaikan kehidupan masyarakat, dan lain sebagainya.

Pada tataran ini, Caleg menjadi aktor tunggal dan aktor dominan dalam mobilisasi pemilih. Meskipun, sebagaimana diketahui, peserta Pemilu adalah Partai Politik, bukan Caleg. Hubungan antara Caleg dengan Partainya seakan berhenti pada pengajuan daftar Caleg ke KPU. Setelah itu, antara Caleg dan Partainya tidak terjadi hubungan kerjasama dalam mobilisasi pemilih. Partai menjadi tidak menjalankan fungsinya sebagai lembaga politik. Meskipun begitu, Caleg dapat memanfaatkan elemen-elemen partai secara mandiri. Semisal bekerjasama dengan individu-individu partai. Namun posisi mereka bukan sebagai lembaga partai. Dari sikap partai dan pemanfaatan mesin partai oleh Caleg, dapat dilihat berbagai ketidak sesuaian. Partai yang bersikap tidak terlibat dalam mobilisasi, ternyata tidak mampu menghadang individu-individu partainya untuk terlibat dalam mobilisasi yang dilakukan oleh Caleg. Partai yang bersikap terlibat, ternyata juga tidak mampu menggerakkan mesin partainya. Dengan kata lain, Pemilu 2009 tidak berbeda dengan Pemilihan Kepala Desa atau Daerah dalam hal mobilisasi pemilih.

5.2. Saran-Saran

Setelah peneliti melakukan kajian pengarahannya pada Pemilu 2009, ditemukan berbagai fenomena positif dan negatif di sekitar Pemilu sebagaimana dijelaskan di atas. Terdapat beberapa saran yang muncul menyikapi hal-hal tersebut.

Pertama, partai harus mampu menyadari peran dan posisinya dalam Pemilu. Sehingga partai akan mengambil sikap yang tepat sesuai fungsinya. Sebagai peserta pemilu, partai harus mengambil sikap sebagai aktor.

Kedua, partai sebagai sebuah lembaga politik harus membenahi internalnya agar dapat melaksanakan fungsi-fungsinya. Diantara hal-hal yang harus dibenahi adalah sebagai berikut:

- Membentuk struktur partai dan organisasi sayap hingga tingkat terbawah, desa atau kelurahan. Hubungan nyata antara konstituen dan partai sebenarnya lebih dapat dibentuk di tingkat ini.
- Mempererat hubungan antar elemen maupun individu-individu partai. Persaingan kepentingan dalam sebuah partai dapat memicu ketidakberfungsian mesin partai.

Ketiga, partai harus mampu mempersiapkan individu-individunya agar laku dijual ke pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, kemampuan individu caleg sangat menentukan.

Keempat, partai dan caleg harus mampu menunjukkan perilaku positif sebagai pendidikan politik bagi pemilih. Meskipun kondisi masyarakat sangat mendorong untuk caleg melakukan perilaku negatif dalam pengarahannya pemilih.

Kelima, melihat kenyataan yang terjadi pada Pemilu 2009, bagi partai sebaiknya mengusulkan untuk kembali pada sistem pemilu sebelumnya. Dengan sistem proporsional terbuka, eksistensi partai sebagai sebuah lembaga lambat laun akan terancam jika partai stagnan dan tidak melakukan perbaikan diri. Dari sisi pemilih, sistem proporsional terbuka memberi jalan bagi kemunduran sikap rasional dalam berpolitik. Kondisi masyarakat belum siap untuk menghadapi sistem proporsional terbuka.

Demikian tesis ini dikemukakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baines, Paul. Fritz Plasser & Christian Scheucher, 1999. *Operationalising Political Marketing: A Comparison of US and Western European Consultants and Managers*. Middlesex University Discussion Paper Series, No. 7, July 1999.
- Budiarjo, Miriam, 1989. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Butler, P & N. Collin, 2001. *Payment on Delivery: Recognising Constituency Service as Political Marketing*. *European Journal of Marketing*. (35), 9-10.
- Chapter 3 Mobilization and Party Recruitment*,
<http://www.olemiss.edu/courses/pol324/guo02ch3.pdf>
- Firmansyah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Hadi, Sutrisno. 1986, *Metodologi Penelitian*
- Heryawan, Ahmad. Selasa, 02 Juni 2009, *Latar Belakang Berdirinya Partai Politik*,
<http://www.ahmadheryawan.com/kolom/94-kolom/4206-latar-belakang-berdirinya-partai-politik.html>
- Heryaman, Oman, *Political Marketing Dan Kualitas Demokrasi*,
<http://www.scribd.com/doc/5988402/Political-Marketing-dan-Kualitas-Demokrasi>.
- Heryaman, Oman. 2007. *Memenangkan Pemilu dengan Political Marketing*, makalah Orientasi Pemenangan Pemilu DPD PKS Kabupaten Bandung, 2007 dalam <http://digilib.unpas.ac.id>
- Hukum Liddle*, Kolom Artikel Umum,, TEMPO, 27 Agustus 2000
- Irsan, *Keputusan MK Soal Suara Terbanyak Didukung Caleg Sumut*,
<http://www.antarasumut.com/berita-sumut/pemilu-2009-berita-sumut/keputusan-mk-soal-suara-terbanyak-didukung-caleg-sumut/>
- Karp, Jeffrey A. dan Susan A. Banducci, 2007, *Party Mobilization And Political Participation In New And Old Democracies*, SAGE Publications
- Karp, Jeffrey A. Susan A. Banducci dan Shaun Bowle, 2007, *Getting Out the Vote: Party Mobilization in a Comparative Perspective*, Cambridge University Press.
- Lees-Marshment, J, 2001. *Political Marketing and British Political Parties: The Party's Just Begun*, Manchester University Press.

Heryawan, Ahmad, Selasa, 02 Juni 2009, *Latar Belakang Berdirinya Partai Politik*,
<http://www.ahmadheryawan.com/kolom/94-kolom/4206-latar-belakang-berdirinya-partai-politik.html>

Menggugat Efektifitas Fungsi Partai Politik,
<http://bakpiajogja.blogspot.com/2008/07/menggugat-efektifitas-fungsi-partai.html>

Muhammad, Djibril. *Putusan MK Suara Terbanyak Amburadul*,
<http://www.inilah.com/berita/politik/2008/12/24/71166/putusan-mk-suara-terbanyak-amburadul/>

Nedelmann, Birgitta. 1987, *Individuals and Parties - Changes in Processes of Political Mobilization*, European Sociological Review, Oxford University Press.

Nonprobability Sampling Strategies: Purposive Sampling,
http://www.wadsworth.com/psychology_d/templates/student_resources/workshops/res_methd/sampling/sampling_29.html

Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Jakarta: Gramedia Pusataka Utama.

Partai Politik Di Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik_di_Indonesia

Plasser, Fritzs dan Gunda Plasser, 2002. *Global Political Campaigning: A Worldwide Analysis of Campaign Professionals and Their Practices*. Greenwood Pub Group.

Political Marketing, <http://political-marketing.net/>

Purposive Sampling, <http://www.answers.com/topic/purposive-sampling>

Purposive sampling,
http://changingminds.org/explanations/research/sampling/purposive_sampling.htm

Putusan MK ‘ Suara Terbanyak ‘ Kurangi Konflik Internal Partai, sumber: beritasore.com, inilah.com, pikiran-rakyat.com, <http://andika-pemilu.blogspot.com/2008/12/putusan-mk-suara-terbanyak-kurangi.html>

Sampling, <http://www.uiah.fi/projects/metodi/152.htm>

- Setianto, Benny D. *Dogma Dangkal Politik Mobilisasi*.
http://suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=
- Simanjuntak, Laurencius, *PDIP Pasrah Putusan MK Soal Caleg Suara Terbanyak*,
<http://www.detiknews.com/read/2008/12/24/075051/1058711/10/pdip-pasrah-putusan-mk-soal-caleg-suara-terbanyak>
- Simon, János. 2003. *The Change of Function of Political Parties at the Turn of Millennium*, <http://www.slideshare.net/alafito/the-change-of-function-of-political-parties-at-the-turn-of-millennium-2003>
- Sinambela, Yuni Herlina. 2008. *MK Kabulkan Uji Materi Caleg Sistem Suara Terbanyak*, <http://pemilu.okezone.com/read/2008/12/23/267/176428/mk-kabulkan-uji-materi-caleg-sistem-suara-terbanyak>
- The Functions of Political Parties,
<http://www.cliffsnotes.com/WileyCDA/CliffsReviewTopic/The-Functions-of-Political-Parties.topicArticleId-65383,articleId-65501.html>
- Ummah, Rahmatul. *Memperkuat Sistem Pemilu 2009*,
<http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2008111222412611>
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008
- Wibowo, Arinto Tri. *Putusan Mahkamah Konstitusi timbulkan produk hukum baru*,
http://politik.vivanews.com/news/read/18096-putusan_mk_picu_masalah_baru
- Yes! Caleg terpilih oleh suara terbanyak*
<http://www.kompas.com/read/XML/2008/12/24/04240134/yes.caleg.terpilih.oleh.suara.terbanyak>.